



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT KERJA
KOMISI V DPR RI
DENGAN
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI**

- Tahun Sidang : 2023-2024
Masa Persidangan : V
Rapat Ke- : 5
Jenis Rapat : Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat RI
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Kamis, 6 Juni 2024
Waktu : Pukul 10.10--14.25 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi V DPR RI, (Ruang KK V) Gedung Nusantara DPR RI - Jakarta
Acara : 1. Evaluasi pelaksanaan APBN TA 2024 sampai bulan Mei 2024;
2. Pembicaraan pendahuluan RKA K/L dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) TA 2025; dan
3. Lain-lain.
- Ketua Rapat : Lasarus, S.Sos., M.S.i
(Ketua Komisi V DPR RI F-PDI Perjuangan)
Sekretaris Rapat : Nunik Prihatin Budiastuti, S.H.,
(Kepala Bagian Sekretariat Komisi V DPR RI)
- Hadir : **A. Pimpinan**
1. Lasarus, S.Sos., M.Si. (Ketua Komisi V DPR RI/F-PDI Perjuangan)
 2. Ir. Ridwan Bae (Wakil Ketua Komisi V DPR RI/F-PG)
 3. Robert Rouw (Wakil Ketua Komisi V DPR RI/F-Nasdem)
- B. Anggota DPR RI:**
- FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN (F-PDI PERJUANGAN)**
4. Sri Rahayu
 5. Harvey B. Malaihollo
 6. Irine Yusiana Roba Putri, S.Sos.
MCOMN&MEDIAS

h

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA (F-PG)

7. Ir. Ridwan Bae
8. Drs. Hamka B Kady, M.S.
9. Dr. H. Ali Mufthi, S.Ag., M.S.i
10. H. Tubagus Haerul Jaman, S.E.

FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (F-GERINDRA)

11. Ir. Eddy Santana Putra, M.T.

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-NASDEM)

12. Roberth Rouw
13. Drs. H. Tamanuri, M.M.
14. H. Syarif Abdullah Alkadrie, S.H., M.H.
15. Sri Wahyuni

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)

16. H. Ruslan M. Daud, S.E., M.A.P.
17. H. Dedi Wahidi, S.Pd.
18. H. An'im Falachudin Mahrus
19. Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, M.M.
20. H. Syafiuddin, S.Sos.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)

21. Dr. H. Irwan, S.IP., M.P
22. Willem Wandik

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)

23. Dr. H Syahrul Aidi Maazat, Lc., M.A.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)

24. H. Boyman Harun, S.H.
25. Hj. Hanna Gayatri, S.H.
26. Mesakh Mirin, SKM.

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)

27. Dr. H. Muh Aras, S.Pd., M.M.

Izin

- : 1. Hj. Sadarestuwati, S.P., M. MA. (F-PDI Perjuangan)
2. Cen Sui Lan (F-PG)
 3. Ilham Pangestu (F-PG)
 4. Hj. Novita Wijayanti, S.E., M.M. (F-Gerindra)
 5. Drs. H. Soehartono, M. Si. (F-Nasdem)
 6. Drs. Fadholi, M. Ikom. (F-Nasdem)
 7. Lasmi Indaryani, S.E. (F-PD)

8. Ir. H. Sigit Sosiantomo (F-PKS)
9. KH. Toriq Hidayat, Lc. (F-PKS)

Undangan

- :
1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI (Dr. Ir. Mochamad Basuki Hadimoeljono, M.Sc.).
 2. Pejabat Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI beserta jajaran.

h

Jalannya Rapat:

KETUA RAPAT/F-PDI PERJUANGAN (LASARUS, S.Sos., M.Si/KETUA KOMISI V DPR RI):

Baik.

Bapak-Ibu Sekalian,

Sekarang kita sudah lewat 10 menit dari jadwal, *nuwun sewu*, Pak Menteri, kita mulai rapat kita pada siang hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang, dan
Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI,
Yang terhormat Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat beserta seluruh jajarannya,
Hadirin yang berbahagia,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat dan karunia-Nya, kita dapat bertemu pada rapat siang hari ini sesuai dengan jadwal dengan tema bahasan yang sudah juga kami sampaikan lewat undangan dalam keadaan sehat dan walafiat.

Menurut laporan dari Sekretariat Komisi, sudah menandatangani absen 25 Anggota dari 50 lebih Anggota dan dari 6 unsur fraksi yang berbeda, maka sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 281 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, izinkan saya membuka rapat kerja pada hari ini dan sesuai ketentuan Pasal 276 ayat (1) dari Peraturan Tata Tertib DPR RI, rapat kerja ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.09 WIB)
(RAPAT DINYATAKAN TERBUKA UNTUK UMUM)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta seluruh jajarannya yang telah memenuhi undangan kami pada hari ini, untuk hadir membahas evaluasi pelaksana APBN tahun 2024 sampai dengan bulan Mei 2024 dan pembahasan pendahuluan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah atau RKP tahun 2025 dan lain-lain yang kita pandang perlu untuk kita bahas bersama pada hari ini.

Kami juga mengucapkan selamat kepada Bapak Menteri PUPR atas tugas barunya sebagai Plt. Kepala Otorita IKN, semoga selalu amanah dan dapat menjalankan tugas sebaik-baiknya. Kita kasih *applause* buat Pak Menteri.

(TEPUK TANGAN DARI PESERTA RAPAT)

Saya tahu tugas ini tidak mudah, tapi semakin mudah ketika langsung di bawah Pak Menteri, *toh* juga semua anggarannya di sini, Pak.

Jadi cerita IKN ini, Pak Menteri, saya pernah menyurati ke Pimpinan DPR, Pak, mempertanyakan IKN ini mitra kerja komisi mana? karena semua anggaran infrastruktur IKN kan di sini, Pak, tapi kami tidak pernah bersentuhan sama dengan bersama apa, dengan struktur di otorita IKN. Ini menjadi agak rumit di kami, memang banyak pertanyaan juga jadi, rupanya otorita IKN itu rapat kerjanya dengan Komisi II, Pak, sementara seluruh anggarannya ada di sini.

Nah, sekarang sudah langsung,

Bapak-Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI,

Sekarang sudah langsung ditangani oleh sebagai Plt-nya adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Saya pikir ini memperpendek apa namanya, rentang koordinasi, Pak, mempermudah ya, karena seluruh beban sekarang memang ada di komisi ini, Pak, terkait dengan IKN. Jadi kita ucapkan selamat Pak Menteri, selamat bertugas dan semoga Bapak sehat walafiat selalu ya sehingga bisa mengawal proses pembangunan IKN yang sedang berjalan ini.

Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI, dan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang kami hormati,

Sesuai dengan jadwal yang disusun oleh Badan Anggaran DPR RI, setiap komisi dialokasikan waktu untuk membahas pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun 2025 dan RKP tahun 2025 bersamaan dengan kementerian/lembaga mitra kerja yang hasil pembahasannya akan disampaikan secara tertulis kepada Badan Anggaran DPR RI selambat-lambatnya tanggal 13 Juni 2024 untuk disinkronisasi. Jadi, pembahasan pendahuluan *nih*, Pak, kami hanya diberi waktu sampai tanggal 13 Juni. Oleh karenanya, kita adakan rapat hari ini melihat dari hari libur dan seterusnya, memang waktu kita sangat mepet, ini masih pendahuluan.

Berdasarkan data yang kami peroleh bahwa realisasi anggaran Kementerian PUPR per 31 Mei 2024 adalah sebesar 34,81%. Untuk itu, pada kesempatan rapat kerja ini kami perlu mendapatkan penjelasan dari Menteri PUPR tentang upaya-upaya yang harus dilakukan agar penyerapan anggaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Selanjutnya terkait dengan Rencana Kerja Pemerintah/RKP, rencana kerja pemerintah dan pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun 2025, pemerintah telah menyampaikan dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025 dengan tema akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Terkait dengan hal tersebut, pagu indikatif Kementerian PUPR tahun 2025 adalah sebesar 75,632 triliun. Pagu indikatif tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 71,741 triliun atau mengalami penurunan 48,67% dari tahun 2024.

Bapak-Ibu sekalian,

Tentu ini banyak pertanyaan, Pak, di kami kenapa pagu ini terjadi penurunan yang begitu besar ya, tapi kami masih menduga-duga saja ini, apakah ini terkait dengan transisi pemerintahan dan seterusnya? atau mungkin juga akan ada program-program dari pemerintahan yang akan datang yang, karena selama ini kita, Pak Hamka ada di sini ya? Teman Banggar yang ada ya. Selama ini kan kita tidak mengenal APBN perubahan, Pak, sudah beberapa tahun ini kita tidak mengenal APBN perubahan.

Nah, barangkali tentu kita berharap Pak Menteri akan ada perubahan APBN nanti yang sehingga anggaran Kementerian PUPR terutama untuk terkait dengan program strategis kita, beberapa misalnya contoh: jalan paralel perbatasan, ini salah satu yang belum tuntas di 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi ini memang ini masih menjadi PR kita. Tentu kami berharap program ini tidak terhenti Pak, terutama kami dari, saya sendiri dari Kalimantan, ya sekarang menangani daerah batas Kaltim ya, sampai ke Kaltara ini kami berharap ini program tetap terus kita laksanakan, ya untuk kiranya ini bisa selesai, karena ini menyangkut marwah bangsa ini ya. Karena di sisi Malaysia sana kita sudah lihat mereka sudah *ring road*, Pak. Kita kalau ke Malaysia itu sudah dari batas sampai ke pantainya dia bisa mutar sudah kita ya. Sementara di sisi kita bahkan belum ketemu antara Kalbar, Kaltim dan Kaltara. Saya rasa ini tetap untuk dilanjutkan, ya.

Bapak-Ibu sekalian,

Pada kesempatan ini pula kami ingin menyampaikan beberapa isu strategis yang berkembang yang perlu mendapat perhatian Kementerian PUPR, antara lain sebagai berikut:

1. Perlu evaluasi dan percepatan pencapaian target Renstra Kementerian PUPR tahun 2020-2024, termasuk program pemenuhan kebutuhan dasar seperti perluasan pasokan air baku, pembangunan konektivitas dan aksesibilitas, memperkecil *backlog* perumahan, serta langkah-langkah untuk mengantisipasi bencana yang berulang seperti banjir dan tanah longsor;

2. Perlu untuk selalu meningkatkan pengawasan audit dan *review* terutama terhadap pelaksanaan prosedur tender dalam rangka mewujudkan proses lelang yang transparan dan akuntabel;

3. Kementerian PUPR agar dapat memastikan bahwa semua proyek strategis nasional, kawasan strategis nasional, dan kegiatan *multi-years* kontrak yang direncanakan selesai pada tahun 2024 benar-benar dapat dituntaskan;

4. Perlunya peningkatan dan perluasan proyek padat karya dan infrastruktur berbasis Masyarakat;

5. Perlu untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi lintas sektoral terkait percepatan proses rehabilitasi dan rekonstruksi di berbagai daerah yang terkena bencana;

6. Perlu peningkatan pengawasan terhadap proses perencanaan dan konstruksi proyek-proyek infrastruktur strategis di berbagai sektor seperti jalan tol, bendungan, sistem penyediaan air minum dan rumah susun.

Terkait dengan poin empat, itu perlunya peningkatan dan perluasan proyek padat karya. Ini tentu berkaitan dengan kondisi masyarakat ya hari ini ini kita merasakan ya US Dolar sudah menyentuh angka di 16.300 per hari ini, ini pasti berdampak kepada inflasi dan tekanan ekonomi di masyarakat. Oleh karenanya, program padat karya ini salah satu solusi bagaimana kita bisa membantu masyarakat yang paling bawah untuk menggerakkan paling tidak untuk meningkatkan daya tahan ekonomi masyarakat.

Oleh karena itu, kami harapkan agar dalam proses penyusunan pagu indikatif belanja kementerian/lembaga mitra kerja Komisi V DPR RI terkhusus Kementerian PUPR benar-benar dapat memperhatikan dan mengakomodir saran dan masukan dari Komisi V DPR RI yang disampaikan dalam seluruh rangkaian rapat kerja dan rapat dengar pendapat selama ini.

Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Pak Menteri untuk menyampaikan bahan paparan sesuai dengan undangan rapat yang sudah kami sampaikan.

Kami persilakan, Pak Menteri.

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bapak-Bapak Pimpinan,
Ibu-Bapak Anggota Komisi V DPR RI yang terhormat dan saya hormati,

Terima kasih atas perhatiannya dan mohon dukungannya atas penunjukan kami sebagai Plt, Pak, baru Plt saja *Insya Allah, Insya Allah* akan cepat terpilih yang definitif.

Bapak sekalian,

Sesuai dengan undangan rapat kerja hari ini, kami juga ditemani oleh seluruh Eselon I kami, Pak Sekjen, Pak Irjen pamit menunaikan ibadah haji.

Sesuai dengan undangan, kami ingin, izinkan kami melaporkan dua hal seperti yang disampaikan oleh Pak Pimpinan tadi.

Pertama adalah evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2024 sampai bulan Mei 2024 ini; dan

Yang kedua hasil-hasil pembicaraan pendahuluan tentang RKA K/L dan rencana kerja pemerintah tahun 2025.

Untuk laporan yang pertama tentang evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2024 sampai dengan Mei ini.

Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati,

Kementerian PUPR pada tanggal 1 April 2024 tentang program kegiatan 2024, maka dapat kami laporkan menindaklanjuti tersebut progresnya adalah sebagai berikut:

1. Sesuai arahan Bapak Presiden, fokus program tahun 2024 adalah pertama menuntaskan seluruh pekerjaan konstruksi pada tahun 2024, kecuali beberapa paket kegiatan pembangunan infrastruktur *multiyears* kontrak yang baru dimulai di Oktober 2023. Ini sesuai dengan izin yang diberikan oleh Bapak Sekab, dispensasi kontrak-kontrak mana yang dapat diselesaikan semester I, kemudian semester II tahun 2024 dan kegiatan yang diluncurkan sesudah tahun 2024 karena memang baru dimulai pada Oktober 2023;

2. Tentang arahan Bapak Presiden adalah melaksanakan pembangunan infrastruktur yang menjadi direktif Presiden, seperti pasar, seperti renovasi pasar yang kira-kira ada 30 pasar, sekolah, stadion, ini adalah 22 stadion dan rusun. Dalam kunjungan kerja biasanya beliau memerintahkan satu di satu kabupaten biasanya ada yang mengusulkan rusun dan instruksi Presiden jalan daerah yang ini adalah masuk tahap kedua dan Inpres air minum dan air limbah;

3. Adalah melaksanakan program operasi pemeliharaan, optimalisasi, dan rehabilitasi, sehingga ya infrastruktur yang sudah dibangun dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Kedua, pagu awal Kementerian PUPR tahun 2024 adalah sebesar 147,37 triliun dan mengalami penambahan sebesar 10,36 triliun, sehingga pagunya menjadi 157,73 triliun yang rinciannya adalah:

1. Luncuran SBSN tahun 2023 sebesar 1,38 triliun antara lain untuk perkuatan tebing sungai-sungai, pengamanan pantai, serta pembangunan jalan dan jembatan akibat bencana alam;

2. Percepatan hutang luar negeri sebesar 5,71 triliun antara lain adalah EDFC dari Korea, *Emergency Assistant for* untuk Sulawesi Tengah, kemudian Indonesia *Tourism Development Project* untuk 5 kawasan strategis wisata dan *National Urban Water Supply Project*, kemudian

3. Tambahannya Rupiah murni dari BA BUN pengelolaan belanja lainnya sebesar 3,27 triliun untuk pembangunan IKN sebesar 2,82 triliun, serta rusun, rusun dan bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum daerah otonomi baru Papua sebesar 450 miliar, saya kira perubahan ini juga atas persetujuan Komisi V DPR RI.

Kemudian yang ketiga, dalam evaluasi anggaran 2024 realisasi anggaran per 31 Mei sebesar 34 triliun koma 81 atau 22,1% dari total anggaran dengan progres fisik sebesar 28,2%. Progres ini lebih tinggi 4 koma... 4,5% dari realisasi anggaran 2023 sebesar 17,6% pada bulan yang sama, Mei 2023.

Progres lelang hingga 31 Mei 2024 adalah sebagai berikut:

1. Paket terkontrak sebesar, sebanyak 2.516 paket dengan pagu DIPA 107 triliun atau 95% dari total kegiatan kontraktual 111,63 triliun meliputi paket tender seleksi baru baik yang *single years* kontrak maupun *multi years* kontrak sebanyak 1.183 paket dengan pagu DIPA 14,5 triliun dan melanjutkan paket lintas tahun yang telah terkontrak pada tahun anggaran sebelumnya sebanyak 1.333 paket dengan pagu DIPA 92,42 triliun;

2. Tentang progres lelang, paket yang belum terkontrak sebanyak 647 paket dengan pagu DIPA 4,63 triliun atau 4,1% dari total kegiatan kontraktual yang tadi kami sebutkan 111,63 triliun.

Kelima, dukungan infrastruktur pembangunan IKN tahun 2024 adalah sebesar 37,41 triliun. Berdasarkan data 30 Mei rinciannya adalah pertama infrastruktur sumber daya air 1,57 triliun, kemudian pengendalian banjir DAS Sanggai lanjutan di KIPP dengan progres 100% dan pembangunan embung sebanyak sekitar 20 embung di KIPP dengan progres 96%.

Infrastruktur jalan dan jembatan 17,56 triliun antara lain adalah pembangunan jalan tol IKN di ruas 5A progresnya adalah 85%, kemudian di ruas 3B 83% dan duplikasi jembatan Pulau Balang bentang pendek progres 74%, jalan akses bandara progres 18%, jalan sumbu kebangsaan sisi barat progres 14% dan sisi timur progres 10%, serta jalan *feeder* distrik di kawasan IKN dengan progres 73%.

Yang ketiga, di IKN infrastruktur pemukiman 11,42 triliun antara lain pembangunan IPA progres 65%, ini yang kami harapkan nanti Juli sudah bisa berfungsi di IKN. Jaringan perpipaan transmisi SPAM Sepaku paket dua progresnya 95% dan gedung istana negara dan lapangan upacara 69%, dan kantor kementerian koordinator progres 64%. Semua ini kami, kita harapkan bisa berfungsi pada bulan Juli 2024 ini.

Infrastruktur perumahan 6,68 triliun antara rumah tapak menteri sebesar progresnya 91%, hunian yang kemarin sebagian atau ...(rekaman suara kurang jelas) dari total 34 sudah dipakai oleh Bapak Presiden dan rombongan pada saat kunjungan IKN kemarin hari Selasa dan Rabu. Kemudian hunian Polri dan BIN 58%, ini merupakan hunian rusun dan hunian ASN progres 53%,

serta hunian Paspampres progres 48%. Hunian ASN Polri dan BIN, serta Angkatan Darat ini Paspampres total 47%, 47 tower dan kami sekarang ini yang sudah *topping off* sekitar 14 tower dan nanti pada bulan Juli *Insyallah* sudah Agustus, pada bulan Agustus *Insyallah* 12 sudah bisa operasi.

Yang keenam, alokasi program padat karya tahun 2024 sebesar 77,11 triliun dengan progres 15,8% dan serapan tenaga kerja 69.030 orang dari total target 297.000.

Bapak-Ibu sekalian,

Untuk yang padat karya ini yang kami kemarin dalam rapat-rapat kerja sebelumnya membutuhkan tambahan anggaran, pertama yang pada rapat kerja pertama ada tambahan 400 yang kami janjikan dari hasil... sisa hasil lelang, yang pertama 400. Yang kemarin yang kedua Raker yang kedua ada tambahan lagi menjadi 700 totalnya dan saat ini bisa kami laporkan akan tambahannya dari sisa lelang yang sudah di dalam yang, sisa lelang dari kontrak-kontrak yang dari paket-paket yang sudah ditandatangani kontraknya ada sekitar 1 triliun, jadi ada tambahannya sudah 1 triliun.

Kemudian kami sudah meminta anggaran tambahan untuk kegiatan lain, termasuk yang untuk padat karya ini 1 triliun, yang itu belum, mudah-mudahan akan segera disetujui oleh Ibu Menteri Keuangan. Jadi untuk padat karya dari total anggaran yang ada di tahun 2024 ada tambahan 1 triliun dari sisa hasil lelang kita.

Yang ketujuh, upaya percepatan pelaksanaan anggaran tahun 2024 adalah dengan memaksimalkan penajaman anggaran yang sudah dialokasikan antara lain, mempercepat proses pengadaan barang dan jasa. Jadi tadi yang masih belum terkontrak dan belum tender akan kami selesaikan *Insyallah* pada bulan paling lambat Juli 2024 ini.

Kemudian yang kedua, mempercepat penyelesaian administrasi dan revisi anggaran. Karena ini tambahan-tambahan anggaran juga baru disetujui 2 minggu yang lalu, jadi kami mempercepat penyelesaian administrasi dan revisi DIPA-nya.

Kemudian menyelesaikan masalah tanah, saya kira ada beberapa bendungan di Lau Simeme, di Way Sekampung, dan di Bendungan Jragung, namun itu sudah selesai diselesaikan dengan baik di 3 bendungan tersebut. Yang lainnya di Temef, di NTT juga sudah dapat kami selesaikan.

Kemudian yang empat, mempercepat penyelesaian kegiatan padat karya sesuai dengan target dan sasaran. Ini tadi kami laporkan progresnya baru 15,8%, ini akan kami percepat.

Kemudian recomposisi anggaran sesuai prioritas pelaksanaan kegiatan, ini terutama untuk pekerjaan-pekerjaan yang *multi years* kontrak karena sesuai dengan progresnya, karena ada musim hujan dan sebagainya, sehingga

anggarannya kita rekomposisi untuk kegiatan-kegiatan yang lebih cepat dan lebih membutuhkan, kita rekomposisikan.

Bapak Pimpinan,
Anggota Komisi V DPR RI yang terhormat dan kami hormati,

Selanjutnya, bagian kedua kami ingin melaporkan hasil pembicaraan pendahuluan RKA K/L dan rencana kerja pemerintah tahun anggaran 2025.

Pertama, tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 yaitu, akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan arah pembangunan sebagai berikut:

1. Sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan produktif.
2. Infrastruktur berkualitas, infrastruktur untuk peningkatan produktivitas. Ke depan kami ingin membangun infrastruktur ini dari segi kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan.
3. Ekonomi inklusif dan berkelanjutan untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja berkualitas dan menurunkan ketimpangan dan penciptaan produk ramah lingkungan.

Kebijakan belanja bidang infrastruktur antara lain, pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dan ekonomi antara lain dilaksanakan dengan Inpres Jalan Daerah dan Inpres Air Minum dan Air Limbah.

Kemudian yang kedua, mendukung pembangunan proyek strategis nasional termasuk melanjutkan pembangunan IKN dan mendorong skema pembiayaan kreatif dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk meningkatkan peran badan usaha.

Yang kedua, berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan Nomor: MK022024 dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor: D8PP0403 2024, tanggal 5 April 2024, ditetapkan pagu indikatif Kementerian PUPR tahun 2025 sebesar 75,63 triliun ditindaklanjuti dengan surat menteri kerja, surat kami Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8... 481 tanggal 29 Mei 2024 tentang Pemanfaatan Pagu Indikatif Kementerian PUPR dengan distribusi pagu per unit organisasi sebagai berikut:

- Ditjen Sumber Daya Air 26,53 triliun;
- Ditjen Bina Marga 32,31 triliun;
- Ditjen Cipta Karya 10,48 triliun;
- Ditjen Perumahan 4,53 triliun;
- Ditjen Bina Konstruksi 0,56 triliun; dan
- Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, badan-badan dan badan-badan pembiayaan sebesar 1,22 triliun.

Pagu indikatif masih jauh di bawah usulan kebutuhan anggaran sebesar 212,58 triliun sesuai menteri, surat Menteri PUPR tanggal 4 April tentang

usulan kebutuhan anggaran Kementerian PUPR dengan usulan kebutuhan pagu per unit organisasi adalah Ditjen Sumber Daya Air 68,47 triliun, Ditjen Bina Marga 81,8 triliun, Ditjen Cipta Karya 38,71 triliun, Ditjen Perumahan 21,19 triliun, Ditjen Bina Konstruksi nol...880 miliar dan SIBBP 1 triliun 750 miliar.

Selanjutnya, rincian kegiatan per unit organisasi sesuai dengan pagu indikatif sebesar 75,63 triliun adalah sebagai berikut:

Bidang Sumber Daya Air dengan pagu anggaran 26,53 triliun rinciannya adalah untuk menyelesaikan pembangunan 12 unit bendungan lanjutan, ini yang baru dimulai yaitu Jenelata di Sulsel, Cibeet Jabar, Cijurey di Jabar, Riam Kiwa Kalimantan Selatan, Cabean Jawa Tengah, Karang Nongko Jawa Tengah, Pelosika Sulawesi Tenggara, Tiga Dihaji Sumsel, ini lanjutannya, Bener di Jateng lanjutan, Kedunglanggar di Jateng, Mbay di NTT, dan Rukoh di Aceh.

Kedua, pembangunan irigasi seluas 2.000 hektar, ini pembangunan baru DI Komering di Sumsel, Batang Sinamar di Sumbar, Batang Asai di Jambi, DI Sadawarna Jabar memanfaatkan bendungan yang sudah jadi, DI Tugu di Jatim ini juga memanfaatkan bendungan tugu yang baru, DI Way Apu demikian juga memanfaatkan bendungan yang baru, DI Randangan di Gorontalo, ini memperluas karena adanya bendungan yang baru.

Kemudian rehabilitasi dan peningkatan irigasi seluas 15.000 hektar DI Rentang ini lanjutan, DI Way Sekampung karena ada bendungan yang baru, DI Jragung, DI Pacal ini bendungan lama, DI Baro Raya, Seluma di Bengkulu, DI Cisadane Banten, DI Ciujung Banten dan Ameroro di Sultra, serta Gelapan di Jawa Tengah.

Kemudian pembangunan pengendali banjir dan pengamanan pantai sepanjang 32,5 kilometer masing-masing antara lain di Sungai Pamaluan, Kali Bekasi, Sungai Bolango, Sungai Bendung di Sumsel, Sungai Ciliwung, Sungai Buntung, Sungai Batang Lembang dan sebagainya sampai dengan Pulau Lamau Satu di Papua Selatan.

Kemudian pembangunan prasarana air baku dengan kapasitas 1,5 meter kubik per detik antara lain untuk memanfaatkan air baku dari bendungan Karian di Banten, kemudian Air Baku Lobener di Jabar, Air Baku Kabupaten Kobar di Kalteng, Intek Sungai Rejoso di Jatim, DAS kawal di Kepri, Air Baku Kawasan Anggrek di Gorontalo untuk mensuplai Pelabuhan Anggrek di Gorontalo, serta air baku Kota Tangsel di Banten.

Kemudian untuk bidang Bina Marga dengan pagu anggaran 32,31 triliun kegiatan prioritasnya antara lain adalah pertama peningkatan konektivitas jalan bebas hambatan sepanjang 26 kilometer, antara lain di Serang–Panimbang, Semarang–Demak dan Padang–Pekanbaru, kami ingin mempercepat penyelesaian Serang–Panimbang, Semarang–Demak dan Padang–Pekanbaru.

Kemudian yang kedua, pembangunan jalan sepanjang 291 kilometer antara lain Jalan Jantho–Keumala Aceh, Labuhan Bajau–Sigapokna Sumbar, Tering-Long Bagun Kaltim, Malinau–Semamu Kaltara, Batas Kota Singaraja–Mengwitani Bali, Manado *out ring road* 3 tahap 4 di Sulut, Kota Baru-Air Nanang Maluku, Warmare–Anggi Papua Barat, Waghete–Timika Papua Tengah, Iwur–Waropko Papua Selatan, Towe Hitam–Oksibil Papua Pegunungan.

Yang ketiga, pembangunan dan duplikasi jembatan sepanjang 2.064 meter antara lain Jembatan Aek Batahan, Jembatan Teratak Buluh, Jembatan Ruas Nanga Era–Batas Kaltim Kalbar, Pile Slab Aruk–Batas Kecamatan Siding/Seluar Kalbar, Jembatan Sungai Balandete Sultra, Jembatan Rendani Papua Barat, dan Oksibil - Iwur Papua Pegunungan.

Selanjutnya peningkatan aksesibilitas *flyover*, *underpass*, terowongan sepanjang 324 meter antara lain *flyover* Sudirman Sumsel, *underpass* Bitung Banten.

Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya, peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan struktur jalan sepanjang 558 kilometer, serta preservasi dan penggantian jembatan sepanjang 107, 200, 107 meter 259 meter, 107.259 meter. Kemudian preservasi rutin jalan sepanjang 47.763 meter dan jembatan nasional sepanjang 548.513 meter, revitalisasi *drainase* serta padat karya, dukungan IKN atau pembangunan jalan di jalan di dalam KIPP, jalan tol IKN dan jembatan Pulau Balang.

Yang ketiga, di bidang Cipta Karya dengan pagu sebesar 10,48 triliun dengan kegiatan prioritas antara lain, pertama pembangunan dan peningkatan sistem penyediaan air minum sebesar 773 liter/detik, antara lain pembangunan SPAM regional Wasusokas di Wonogiri, Jawa Tengah. Sistem Hilir SPAM regional Karian-Serpong, yang tadi kami sampaikan memanfaatkan air dari Bendungan Karian, SPAM Pulau Rondo Kota Sabang, prasarana SPAM IKN yaitu untuk jaringan interkoneksi IPAL Sepaku Semoi, JDU-JDP SPAM Sepaku di wilayah pengembangan 1A tahap 2 dan PP 1B dan 1C.

Kemudian perluasan SPAM untuk layanan 42.738 sambungan rumah antara lain perluasan jaringan perpipaan SPAM Kamijoro di Kabupaten Kulonprogo, karena air bakunya sudah dibangun tahun ini, tahun lalu. Kemudian optimalisasi SPAM IKK Donggala, SPAM Tanah Miring Merauke Papua, SPAM Sebaif Grati Kabupaten Pasuran dan SPAM berbasis masyarakat melalui kegiatan Pamsimas di 500 desa.

Yang kedua, di bidang Cipta Karya adalah sistem pengelolaan air limbah untuk layanan 3.200 KK antara lain Jakarta *sewerage* zona 1, IPLT Kabupaten Samosir, IPAL Banjardowo Semarang, IPAL RPH Martapura, IPAL Tanjung Karang Mataram, Prasarana Sanitasi IKN yaitu di IPAL 1, 2, 3 kawasan inti pusat pemerintahan. Kemudian sistem pengelolaan persampahan dengan layanan 6.200 KK, antara lain pembangunan TPST Kota Cilegon, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tuban, Kota Denpasar, Kota Bandung, Kabupaten Indramayu, dan lain-lain serta kegiatan sanitasi berbasis masyarakat (Sanimas) di 450 lokasi, dan TPS3R di 100 lokasi.

Pengembangan kawasan permukiman seluas 110,7 hektar, antar lain penataan kawasan Danau Dendam Tak Sudah di Bengkulu, kawasan Perkotaan Muaro ini perlu di, perlu kita lanjut, kita mulai karena Pemda juga sudah memindahkan jalan di pesisir Danau Dendam Tak Sudah.

Kemudian kawasan perkotaan Muara Bungo dan kawasan Morowali, kemudian peningkatan kualitas permukiman seluas 163 hektar, antara lain peningkatan kualitas pemukiman kumuh kawasan Semanggi Kota Surakarta, kawasan Lililef Waibulan Weda Maluku Utara, kawasan Pulau Penyengat Kepulauan Riau, dan kawasan Surya Bahari Kabupaten Tangerang.

Kemudian penataan kawasan pariwisata prioritas seluas 14 hektar, antara lain, penataan kawasan wisata di Bangka Belitung dan Raja Ampat dan pembangunan infrastruktur permukiman berbasis masyarakat melalui program PISEW di 540 lokasi.

Selanjutnya adalah pengembangan penyelenggaraan bangunan gedung seluas 8.300 meter persegi, antara lain pembangunan kawasan gedung Mako Paspampres, gedung Koni, renovasi KBRI di Malaysia, kawasan TSTH Pulung tahap 2 di Sumut.

Selanjutnya adalah pengembangan penataan bangunan dan lingkungan sebanyak 10 kawasan, di antara lain rehabilitasi bangunan cagar budaya istana kediaman Gedung Agung Kota Yogyakarta dan Balai Kerapatan Tinggi Siak. Kemudian pembangunan bangunan gedung dan penataan kawasan IKN sebanyak 17 kawasan, bangunan gedung dan kawasan kantor IKN, gedung Wing 2 dan sarana-prasarana pemerintahan 2.

Prioritas selanjutnya adalah rehabilitasi dan renovasi sekolah/madrasah sebanyak 56 unit, antara lain renovasi bangunan sekolah MAN 3 di Kampar Lipat Kain, rehabilitasi dan renovasi prasarana sekolah penunjang IKN di Kalimantan Timur dan lain-lain. Dan selanjutnya adalah rehabilitasi dan renovasi perguruan tinggi negeri, PT Islam Negeri sebanyak 22 unit, kemudian pembangunan gedung GK UGM sediakan, SeTIAKIN, SeTIAKIN di Bangka Belitung, Slamet Riyadi di Solo, dan lain-lain. Dan rehabilitasi dan renovasi prasarana strategis lainnya sebanyak 4 unit, antara lain Universitas Syeikh Nawawi Albatani, Banten, renovasi Pasar Banyuwangi, Pasar Manggung di Kabupaten Sleman, Pasar Sungai Penuh, Pasar Purwodadi Kabupaten Grobogan, dan lain-lain. Pelaksanaan strategi mendukung sebanyak 3 unit yaitu, pembangunan sekolah, pasar dan puskesmas, di kawasan hunian ASN.

Dukungan teknis lainnya adalah pembinaan bangunan gedung hijau dan bangunan cerdas. Fasilitasi pusat studi kegempaan (Pusgen) dan pengembangan teknologi air minum dan sanitasi, tanggap darurat dan cadangan bencana.

Bapak Ketua,
Ibu-Bapak Anggota Komisi V yang terhormat dan kami hormati,

Untuk bidang perumahan sebesar 4,53 triliun, prioritasnya adalah pertama pembangunan rumah susun antara lain lanjutan pembangunan hunian vertikal untuk personel TNI di IKN sebanyak 240 unit, pembangunan rumah susun mendukung DOB di Papua sebanyak 360 unit, kelanjutan pembangunan rumah susun reguler sebanyak 44 unit dan pembangunan baru rumah susun ASN, TNI, MBR, pekerja dan lembaga perguruan berasrama sebanyak tiga... 3.240 unit.

Yang kedua, prioritasnya dari pembangunan perumahan bidang perumahan adalah pembangunan rumah khusus untuk mendukung DOB di Papua di 4 Provinsi di Papua sebanyak 200 unit, yaitu pembangunan rumah khusus, rumah khusus untuk masyarakat terdampak bencana, terdampak program pemerintah daerah 3T sebanyak 396 unit.

Kemudian, pembangunan PSU untuk membantu prasarana, sarana umum di pembangunan rumah komersial umum untuk MBR sebanyak 10.550 unit untuk perumahan MBR yang tersebar di seluruh provinsi. Kemudian pembangunan rumah swadaya BPS untuk program padat karya sebanyak 18.238 unit.

Dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya Ditjen Bina Konstruksi, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur, Ditjen perumahan *eh*, dan Perumahan, BPPSDM, BPIW, Sekjen dan Inspektorat Jenderal sebesar 1,77 triliun ini sama dengan tahun 2024.

Demikian, Bapak Ketua, Ibu-Bapak Anggota Komisi V DPR RI yang kami dapat laporkan di dua hal, pertama adalah evaluasi pelaksanaan program anggaran 2024 sampai Mei 2024 dan hasil pembicaraan per atau laporan dari pagu indikatif yang diberikan oleh Bappenas dan Menteri Keuangan kepada Menteri PU sebanyak 75 triliun. Kami mohon arahan selanjutnya.

Terima kasih, Bapak.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Walaikumsalam.

Terima kasih, Pak Menteri.

Baik.
Bapak-Ibu sekalian,

Demikian paparan dari Pak Menteri terkait dengan agenda rapat kita hari ini.

Saya langsung saja ke Anggota untuk pendalaman ya.
Yang pertama Pak Harvey Malaihollo sesuai daftar hadir.

Bersiap-siap Ibu Sri Rahayu.

Silakan, Pak Harvey.

F-PDI PERJUANGAN (HARVEY B. MALAIHOLLO):

Terima kasih, Pimpinan.

Yang terhormat Pimpinan Komisi V dan Anggota Komisi V yang saya cintai,
Bapak menteri PUPR beserta jajarannya,

Selamat siang,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om Swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan.

Pak, saya sedikit aja terkait program rumah khusus yang sudah dari tahun 2023 saya terima, untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri dan juga Bapak Dirjen Perumahan beserta jajarannya yang terlibat.

Pemda sudah, sampai sejauh ini Pemda sudah melaksanakan tugas-tugasnya dalam pembangunan yang menunjang seperti tanggul penahanan longsor yang setinggi 65 meter sudah 60% dan bulan Juni sudah kemungkinan akan telesaikan, demikian juga dengan *drainase*, serta mereka juga akan melaksanakan pembangunan jalan, lingkungan air bersih, dan penerangan, serta TPS dibangun dengan tahun anggaran berjalan.

Yang saya ingin tanyakan adalah tolong disampaikan ke kami proses dan progresnya sudah sejauhmana menyangkut kepastian anggaran dari pusat dan kapan dipastikan pembangunan rumah masyarakat Suku Moi ini terlaksana. Itu saja.

Terima kasih banyak, Pimpinan.

Selamat siang.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Terima kasih, Pak.

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):

Di Sorong ya, Pak?



F-PDI PERJUANGAN (HARVEY B. MALAIHOLLO):

Ya, di Sorong ya betul, Pak.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Ya, makasih Pak Harvey.

Selanjutnya Bu Sri Rahayu.
Bersiap-siap Pak Syahrul Aidi.

F-PDI PERJUANGAN (DRA. SRI RAHAYU):

Terima kasih, Pimpinan.

Pimpinan dan Anggota yang terhormat,
Bapak-Ibu,
Pak Menteri dan seluruh jajaran yang saya hormati,

Yang pertama, saya ingin meminta informasi terkait dengan IKN, Pak. Kita di Komisi V ini tidak pernah tahu gambarannya seperti apa sebenarnya sampai detik ini. Kita tahunya dari media, baca media. Untuk itu tolonglah barangkali kita diberikan gambaran lewat *slide*-nya, sarana prasarananya sampai sejauhmana, kemudian bangunan-bangunannya kayak apa, yakinkah kalau ditanya yakinkah kita bisa memanfaatkan pada bulan Agustus, pasti jawabnya eksekutif pasti yakin. *Nah*, kita ini lihatnya di media, maka kita ini enggak yakin kalau itu mampu untuk dimanfaatkan, padahal undang-undangnya sudah harus pindah ke sana begitu.

Oleh karena itu, saya mohon dengan hormat berikan kami informasi secara utuh untuk IKN, termasuk anggaran-anggaran yang ada di tahun 2024 ini kita juga enggak tahu, dari 2024, kan ini terpisah semua anggaran untuk bina marga sekian, untuk Cipta Karya sekian yang terealisasi kan masing-masing. Itu kalau di global di total semua itu total anggarannya sekian, kemudian yang sudah terealisasi sekian yang belum itu karena apa? apakah karena faktor teknis atau karena faktor lain-lain? mohon dengan hormat. Karena kalau saya perhatikan kan kebutuhan dari infrastrukturnya luar biasa di sana ini dan kalau melihat gambaran-gambaran yang diberikan di media itu kayaknya kita melihatnya masih-masih begitu-begitu *gitu*, makanya ini sudah bulan Juni, sebentar lagi bulan Agustus, tinggal 6 bulan sampai sejauhmana progresnya.

Kemudian yang kedua, terkait dengan realisasi program padat karya tunai, Pak. Sampai sejauh ini memang masih 0% untuk pemukiman ya, permukiman, termasuk PISEW dan Kotaku sanitasi pendidikan ini belum ada *problem*-nya apa ini, kenapa belum terealisasi sama sekali sampai laporan ini tanggal 31 Mei ini belum ada. Dan juga, Pak, terkait dengan tenaga kerja atau padat karya ini saya mohon dengan hormat dan sangat, program untuk tahun 2025 pun untuk sertifikasi tenaga kerja terutama untuk para kuli ya, kuli bukan

kuli apa namanya, tukang-tukang, baik itu tukang batu, maupun tukang kayu, ini mohon benar-benar menjadi perhatian dan ini menurut saya penting sekali, Pak, karena apa? kalau mereka punya sertifikat seperti yang disampaikan harapannya adalah dia punya standar untuk upah tenaga kerjanya, tetapi sekali lagi dalam kenyataan di lapangan program-program yang dilaksanakan oleh anggaran APBN terkait juga ini pinjaman luar negeri, PHLN, ternyata ketika melakukan pekerjaannya mereka memberikan upahnya di bawah garis di bawah apa UMR, 1 hari 80.000 masih ada. Kenapa? karena masih sebagian besar menggunakan subkontrak-subkontrak, nah itu berdampak yang kurang bagus.

Oleh karena itu, pelatihan ini menjadi satu hal yang penting menurut saya baik di bidang PUPR-nya itu sendiri, bina marga maupun dari sumber daya air ini menurut saya juga penting untuk-untuk hal tersebut, mohon ini menjadi perhatian. Karena sebagian besar tenaga-tenaga itu tidak mendapatkan keamanan di dalam melakukan kegiatan-kegiatan, terutama kegiatan kegiatan yang apa berhadapan dengan bahaya-bahaya termasuk kecelakaan kerja dan biasanya tidak diberikan asuransi itu. *Nah*, ini sebagai *owner*-nya atau yang punya anggaran yang kemudian dikerjakan oleh kontraktor mohon ini menjadi perhatian, jangan sampai rakyat kecil menjadi korbannya.

Kemudian tahun 2025, yang pertama bidang sumber daya air. Ketika Dirjenya masih, Pak, siapa yang sudah pensiun, Dirjen Sumber Daya Air?

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):

Pak Jarot, Bu.

F-PDI PERJUANGAN (DRA. SRI RAHAYU):

Pak Jarot, ya. Saya ingat betul waktu itu di bandara Dhoho, Kediri itu akan ada program yang namanya, apa namanya, bukan penyederhanaan ya, ada enam sungai yang kemudian dibuat hanya dua Sungai, kalau enggak salah, sungai besar yang itu tujuannya supaya tidak banjir di sana, sehingga itu alirannya apakah nanti dibawa ke Semantok atau Semantok Nganjuk atau di tempat lain, itu secara teknis saya kurang paham, tapi sampai hari ini di sini saya perhatikan tidak ada, tidak ada hal itu, tidak ada program untuk itu, ini yang ada sungai Lamong dan di Jawa Timur hanya sungai Lamong dan sungai Buntung, saya kurang paham ini Sungai Lamong dan Buntung itu di mana itu enggak ada, padahal ini penting menurut saya supaya tidak banjir.

Itu sudah-sudah benar-benar disampaikan oleh Pak Dirjen waktu itu, tapi ternyata 2004 juga enggak ada, 2025 juga tidak ada. Saya mohon Pak ini di ini kembali.

Kemudian berikutnya adalah jembatan gantung. Jembatan gantung ini menurut saya sangat dibutuhkan, sangat-sangat dibutuhkan. Kalau kita melihat media apakah itu media lama atau baru terutama di luar Jawa yang sungai-

sungainya besar, kemudian menghubungkan daerah yang satu dengan yang lain. Kemudian anak-anak sekolah melalui hal tersebut dengan kondisi jembatan yang kurang bagus, tolong Pak dari Bina Marga, ini kalau ada hal semacam ini tolong langsung dilihat, disampaikan, kemudian dianggarkan secepatnya atau dilakukan untuk melakukan pembangunan hal tersebut. Menurut saya ini mengingat kebutuhan dari jembatan gantung ini sangat besar juga, maka ini juga perlu mendapatkan perhatian dari sudut jumlah juga perlu untuk ditambah.

Selanjutnya dari Bu Cipta Karya. Ibu, seingat saya tahun kemarin Ibu sudah memberikan *sign, gitu ya*, untuk Pembangunan *eh* tahun 2023 kalau enggak salah, Pasar Kesamben yang kebakar habis yang Ibu juga ada yang kita kunjungan ke sana, Komisi V kunjungan ke sana, ini juga ada anggarannya juga belum ada sampai hari ini dan kami sudah mengajukan-mengajukan apa proposal tapi juga *ndak* ada. Kenapa ini menurut saya penting? karena memang kebakarannya habis sama sekali enggak bisa, sehingga segera perlu dilakukan pembangunan untuk pasar tersebut.

Selanjutnya P3TGAI. P3TGAI menurut saya juga program yang memang-memang-memang dibutuhkan karena dalam rangka untuk peningkatan kedaulatan pangan tidak hanya ketahanan pangan tetapi kedaulatan pangan, menurut saya ini perlu mendapatkan perhatian untuk P3TGAI terutama di Jawa Timur ya. Jawa Timur ini banyak daerah-daerah yang memang memerlukan hal tersebut dan kalau kita-kita memberikan perhatian dan kemudian menambahkan irigasi tersier ini saya yakin itu akan berdampak pada panen padi meskipun kita juga tidak harus sepenuhnya menggunakan menanam padi, tetapi bisa tanam... tanaman lain, tetapi yang, yang ini menurut saya perlu mendapatkan perhatian, sehingga jangan dikurangi, Pak, untuk hal ini.

Oh, ya masih tadi BSPS, yang BSPS belum tadi. BSPS ini yang ada di sini hanya 18.000 sekian, apakah memang sudah enggak dibutuhkan *nih* BSPS? Padahal kita tahu bahwa masyarakat kita ini sangat-sangat membutuhkan dan menurut saya turunnya terlalu jauh dari tahun anggaran 2024, kemudian 2023 juga, 2024 aja masih ini ya turun juga dan 2025 jauh-jauh lebih turun lagi....

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):

Jauh terjungkal.

F-PDI PERJUANGAN (DRA. SRI RAHAYU):

Ya, terjungkal, terjunnya terjun bebas *nih*. Apakah masih dianggap? apakah dianggap tidak perlu atau seperti apa? saya mohon alasannya ini kenapa. Kalau dikaitkan alasan dengan anggaran pasti, pasti nanti arahnya ke sana, tetapi paling enggak terjun, terjunnya jangan bebas gini, Pak, kalau jatuh sakit nanti kalau terjun bebas. Makanya saya mohon dengan hormat ini juga menjadi perhatian untuk anggaran ini.

Kemudian yang terakhir, Pak, embung, Pak, tadi ada kelupaan terkait dengan sungai yang ada di Dhoho tadi di seingat saya juga sudah pernah disampaikan saya sampaikan untuk embung di dalam rangka untuk mengurangi banjir dampak dari pembangunan bandara itu adalah embung, tapi di sini juga tidak ada, tidak ada anggaran untuk itu.

Saya mohon dengan hormat, jangan sampai bandara ini berjalan dengan baik tapi di sisi lain merugikan masyarakat untuk banjirnya. Kalau banjir itu luar biasa Pak di situ karena agak tinggi kan Dhoho itu agak tinggi, kemudian *ndak* mampu menampung sungainya, sungainya yang memang perlu dinormalisasi tapi sampai hari ini juga belum, yang tadi saya sampaikan itu akan dibuat sungai baru bukan sungai baru, akan menghubungkan empat sungai menjadi dua sungai sehingga mohon dengan hormat embungnya ini juga menjadi perhatian.

Terima kasih, Pimpinan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

(PERGANTIAN KETUA RAPAT)

KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):

Walaikumsalam,

Terima kasih, Bu Sri.

Pak Syahrul Aidi silakan.

F-PKS (DR. H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, L.C., M.A.):

Makasih, Pimpinan.

Pimpinan dan komisi dan Anggota Komisi V yang saya hormati,
Pak Menteri dan seluruh Dirjen, dan
ASN di lingkungan Kementerian PUPR,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Menteri dan Bapak Dirjen dan Bu Dirjen yang telah mengunjungi Riau minggu kemarin, dalam rangka peresmian jalan tol dan peresmian IPAL. Saya dapat banyak berkah dari kehadiran Pak Menteri bersama Pak Presiden, saya bilang kalau Pemilu dalam bulan ini suara saya bisa dua kali lipat, *gitu*. Terima kasih Pak Menteri luar biasa dan terima kasih juga kepada Pak Menteri masyarakat Riau khususnya.

Dan beberapa catatan saya, Pak Menteri, di antaranya adalah kita sekarang sudah selesai membangun tol Pekanbaru 13 Koto Kampar dan sedang dibangun tol baru yaitu dari penyambungan Dumai ke Pekanbaru. Kemarin saya mendapatkan pengaduan dan baru saja tadi saya menerima serikat kerja regional, yang mereka ini tergabung pada serikat pekerja lintas negara. Jadi intinya ada pekerjaan yang sifatnya besar seperti ini, ini perlu juga pengawasan kita kepada sub-subkon, sub-subkon, jadi memang kaitannya dengan tenaga kerja begitu, hak-hak tenaga kerja. Jadi hanya mengingatkan saja bahwasannya kita yang memiliki pekerjaan, kemudian pekerjaan itu dilakukan oleh kontraktor besar, kontraktor besar mengoporkan ke subkon, subkon dan seterusnya, kadang-kadang ada kelalaian di subkon baik itu hak tenaga kerjanya dan seterusnya hanya titipan itu.

Pak Menteri, yang kemudian IPAL, IPAL kemarin kita anggarkan lebih kurang 900 miliar di Pekanbaru ini. Tentu saja yang kita harapkan bukan pada pembangunan IPAL, tapi budaya bersih lingkungan ini yang mesti kita tekankan. Kemarin saya diskusi dengan teman-teman di balai, di satu sisi saya katakan Cipta Karya bagaimana membuat pengelolaan-pengelolaan limbah kita ini bagus, tetapi di perumahan justru kita membiarkan ini terkait *developer* yang membangun rumah, membiarkan pengelolaan limbah ini tidak standarnya standar Cipta Karya.

Jadi di perumahan contoh saya *ndak* tahu dalam regulasi yang kita keluarkan *developer* ketika membangun rumah, itu tidak ada penekanannya bahwasanya, IPAL-nya dibangun secara terpusat, setahu saya atau walaupun sifatnya personal itu IPAL-nya standar apa namanya, di bawahnya itu tidak seperti standar yang sekarang kita bangun, SPALD-S, SPALD-S itu kan ya. Kalau yang dibuat oleh perorangan itu kan sifatnya sangat tradisional begitu. *Nah*, ini perlu ada kebijakan embung antara semangatnya Cipta Karya ya membangun IPAL terpusat dengan program yang ada di perumahan sehingga kita jangan akhirnya Cipta Karya memperbaiki tetapi perumahan dibiarkan menambah pengelolaan limbah ini tidak terpusat. Ini luar biasa, kaget masyarakat ketika dikatakan hanya untuk mengurus IPAL, kita mengeluarkan dana sebanyak 900 triliun eh 900 miliar, mohon maaf.

Kemudian Pak Menteri, saya kemarin bersama Pak Iqbal menerima kunjungan Gubernur Sumbar. Kami, saya, Pak Iqbal, kebetulan Pak Iqbal hari ini berangkat haji dan saya ingin menyampaikan di gedung ini, terima kasih atas apa namanya, gerak cepatnya Kementerian PUPR dalam penanganan

pasca, pasca bencana yang ada di Sumbar, bahkan saya dengar ada Pak Dir, selain Pak Menteri, Pak Dirjen dan Pak Presiden ke sana kemarin ada penanganan, tetapi yang paling penting dari beberapa catatan adalah bahwa ternyata ada kebutuhan pembuatan sabo dam, sabo dam untuk Gunung Merapi yang ada di Sumbar, perbandingannya Merapi Sumbar itu *ndak* ada sabo dam, yang ada *check* dam, dua. Nah, di Merapi Jogja itu 250 sabo dam, di Gunung Agung Bali itu 90-an, 92 sabo dam, *nih*, saya istilah baru *nih* yang yang saya tau hanya *check* dam, ternyata sobo dam itu lebih besar, Pak ya, lebih besar. Nah, ini kan bisa mengurangi apa namanya, musibah bagi warga ya khususnya, karena kan ini kan menghambat bebatuan yang datang dari Merapi, itu yang saya pahami.

Tadi ini sangat timpang sekali, Pak Dirjen, antara yang di Sumbar dengan daerah lain, mudah-mudahan ini menjadi perhatian, ini di betul-betul di-*highlight* oleh Pak Gubernur, selain daripada penanganan-penanganan yang jalan nasional saya lihat sudah berjalan, sudah sangat bagus.

Kemudian Pak Menteri, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kunjungan Pak Menteri dengan Pak Dirjen, Bu Dirjen, ke Candi Muara Takus, ini sangat harap sekali masyarakat di sana, sehingga keberadaan tol di Kampar, di Pekan eh di Riau itu betul-betul memberikan *multiplayer effect* bagi ekonomi masyarakat dengan ditumbuhkannya destinasi wisata, mudah-mudahan bisa terwujud nantinya. Hanya saja titipan, Bu Dirjen, ketika mendesain ini saya kemarin didatangi oleh pemangku adat dan budaya yang ada di Riau agar nanti berkoordinasi ketika harus kita mendesainnya, sehingga itu betul-betul desain itu sesuai dengan latar belakang sejarah dan budaya yang ada di Kampar.

Kemudian saya titip juga kemarin ada Pasar Cipuan untuk ke depannya, ini memang saya melihat ketika Pak Kepala Balainya adalah Pak Ikhwanul, dulu beliau mengatakan bahwasanya sudah menjadi daftar rencana pembangunan kita untuk Pasar Cipuan, pasar regional.

Kemudian *flyover* Subrantas, Pak, ini kalau memang jadi nanti apa namanya bundaran yang ada di Rimbo Panjang, otomatis banyak sekali mobil-mobil yang akan turun di Rimbo Panjang yang akan melewati Jalan Subrantas, Jalan Subrantas yang apa namanya, Garuda Sakti, Subrantas Garuda Sakti, itu akan mengakibatkan macet, maka Pak PJ Gubernur kemarin mengusulkan agar dibangun *flyover* Subrantas dan untuk apa namanya, ganti ruginya sudah dibuat oleh Pemprov provinsi.

Kemudian pelebaran Garuda Saktinya juga, Pak, ini jalan kita tetapi jalannya masih sempit. Kemarin saya diskusi dengan kepala balai itu kayaknya belum masuk, sementara titik kemacetan yang paling parah di antaranya adalah Garuda Sakti, Pak.

Kemudian hah ini desain untuk sungai, Pak. Yang selama ini desain sungai untuk pembangunan turap kita itu *spot*, Pak, sifatnya *spot-spot*, satu kecamatan, satu kecamatan, sehingga apa yang terjadi, ketika kita ingin mengusulkan untuk pembangunan turap di satu titik alasannya ini belum ada

desainnya, tunggu lagi desainnya. Saya meminta desainnya ini mumpung apa itu sepanjang sungai. Saya kemarin sampaikan ke Pak Menteri, Pak Dirjen bahwasanya di Riau itu ada empat sungai besar panjang, lebih dari, kalau totalnya itu lebih dari 1000 kilometer panjang sungai yang menjadi kewenangan BWS 3 itu, 4 sungai yang pada hakikatnya 5 sungai, Pak, tetapi sekali lagi tahun ini kita hanya dapat lima titik saja. Saya kewalahan untuk menampung aspirasi masyarakat, di mana sungai-sungai mereka tebingnya sudah runtuh, mengancam banyak sekali keadaan, mulai dari jembatan, rumah warga, kemudian sekolah, masjid, kuburan, dan seterusnya, ratusan keadaan kasus itu, Pak, tetapi kita hanya mendapatkan 5 titik. Mudah-mudahan tahun depan bisa tertampung dan bahkan kalau ada perubahan anggaran di pertengahan tahun ini bisa ditampung, Pak.

Kemudian yang terakhir Embung Stanum, Pak. Jadi Embung Stanum kemarin saya didatangi oleh Pemda Kampar, karena Embung Stanum ini bergantungnya ekonomi masyarakat yang selain irigasi adalah untuk pembibitan ikan, Pak, ikan. Jadi ada *hatchery* ikan di hilirnya, tetapi karena hancurnya Embung Stanum, apa Stanum ini akhirnya air bakunya tidak bisa mereka dapatkan. Mudah-mudahan bisa ditampung nanti, Pak, untuk 2025 Embung Stanum.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

F-PAN (MESAKH MIRIN):

Interupsi, Pimpinan, interupsi.

KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):

Silakan, Pak.

F-PAN (MESAKH MIRIN):

A5 eh B, A-521 Mesakh Mirin.

Terima kasih Pimpinan dan para Anggota semua.

Coba kita spesifik, ini kita bicara, saya setelah saya amati ini kita ke 2025 jauh, coba lebih spesifik mengarahkan untuk 2024 kita bahas dulu ini, Pimpinan.

Saya mohon untuk teman-teman kita lebih fokus 2024 seperti apa, supaya jangan mengambang ke 2025, Pimpinan. Nah, itu yang harus kita memahami sama-sama untuk lebih fokus ini dulu, Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):

Iya, hari ini memang kita bahas juga antara lain itu, apa untuk RKL tahun 2025, jadi Anggota juga punya kesempatan untuk bicara tentang itu, tapi namun demikian dengarkan oleh teman-teman semua.

Saya persilakan Pak, Pak Ilham, Ilham Pangestu, silakan, Pak.

F-PG (ILHAM PANGESTU):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yang saya hormati Pak Menteri bersama Dirjen dan keluarga besar PUPR,

Yang saya hormati kawan-kawan Komisi V,

Saya sepakat sama Pak Isakh, bahwasanya kita fokus pada tahun 2024. Perlu ada beberapa catatan di Aceh tentang 2024, kita ..karena beberapa Cabor PON di Aceh ini yang *venue*-nya sedang dilaksanakan, salah satunya di Aceh Tengah tentang bagaimana usulan kita pada tahun 2023 itu tentang air bersih yang ada di Lelebu Aceh Tengah dan beberapa bendungan-bendungan di Aceh PSN, kita mempertanyakan kapan kira-kira selesainya agar bisa diresmikan pada tahun 2024 ini, Ketua.

Dan juga saya apresiasi kepada Pak Menteri bahwasanya, program-program selama ini yang ada di Aceh itu sangat membantu sekali terutama kami yang ada di Dapil Aceh ini semuanya terpilih dan bahkan secara pribadi suara kami meningkat daripada tahun 2019. Dan juga apresiasi kepada program Inpres yang ada di Aceh, kami berharap program ini terus berjalan di pada tahun 2025 yang akan datang.

Tentu Inpres ini banyak kepala daerah yang sangat membutuhkan Inpres ini dan terus berkoordinasi sama kami yang ada di Dapil Aceh ini. Ini bagian daripada pembangunan yang ada di Aceh, dan juga seperti kawan-kawan padat karya pada tahun 2024 masih terlalu lama turun ke kegiatannya itu. Ini kami berharap kepada Pak Menteri untuk fokus kepada padat karya dan pembangunan-pembangunan yang telah kita sepakati pada tahun 2024 ini.

Terima kasih, mungkin ini saja Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ANGGOTA KOMISI V:

Walaikumsalam.

(PERGANTIAN KETUA RAPAT)

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Terima kasih, Pak Ilham.

Silakan sekarang Bu Iren.
Bersiap-siap Pak, eh, Bu Hanna Gayatri.

F-PDI PERJUANGAN (IRINE YUSIANA ROBA PUTRI, S.SOS., MCOMN&MEDIASST):

Ya, terima kasih, Pimpinan.

Selamat pagi,

Pak Menteri beserta jajaran yang saya hormati,

Pertama, saya ingin berkomentar terhadap pagu indikatif Kementerian PUPR tahun anggaran 2025 yang jumlahnya sebesar 75,63 triliun. Untuk anggaran tersebut dari semua Ditjen, alokasi terbesar pada Ditjen Bina Marga yaitu 32,31 triliun diikuti Ditjen Sumber Daya Air sebesar 26,53 triliun, di mana kalau kita lihat ini anggarannya turun dari tahun anggaran 2023 dan 2024 dan Pak Menteri, ini tentu harapannya kalau tidak bisa mendapatkan yang sesuai diusulkan yaitu 68,47 paling tidak tidak turun dari tahun anggaran 2023 dan 2024 untuk Ditjen Sumber Daya Air. Kenapa? Karena kita baru saja selesai menyelenggarakan *event* yang saya pikir sangat bergengsi, sangat *prestigious* yaitu *World Water Forum* ke-10, di mana *event* tersebut tentu bagi banyak masyarakat Indonesia secara khususnya ini ingin mendapatkan dampak yang signifikan.

Saya kemarin mengikuti acara tersebut selama 3 hari *full*, saya mendampingi Ibu Ketua DPR dan saya hanya ingin mengutip pernyataan beliau, kalau bisa setiap tahun anggaran pertahanan itu naik, kenapa anggaran untuk pengelolaan air itu tidak bisa ikut naik? karena juga seperti kata Presiden, bahwa air adalah kehidupan, tidak peduli air berarti tidak peduli kehidupan, sehingga Pak Menteri dan jajaran, saya berharap dengan banyaknya prestasi yang juga Bapak torehkan diacara *World Water Forum* ke-10, di mana telah terjadi pertama kali untuk pertama kalinya ada keputusan tingkat menteri yaitu, yang menyetujui pembangunan 113 proyek air dan sanitasi yang senilai 94 miliar untuk 30 negara itu bisa betul-betul membawa dampak positif bagi masyarakat Indonesia terkait dengan tata kelola air.

Tetapi Pak Menteri, perlu juga menjadi catatan yang saya secara pribadi ingin menggunakan forum ini untuk memberikan beberapa catatan terkait *event* tersebut, Pak, karena megahnya *event* tersebut yang tentunya menghabiskan anggaran yang tidak sedikit terutama acara yang dihadiri oleh Presiden pasti enggak ada lah yang anggarannya sedikit, tetapi di saat bersamaan, Pak, pemberita media lokal terkait dengan kekeringan atau tidak adanya air untuk masyarakat Nusa Dua, karena semuanya fokus untuk melayani para partisipan dari WWF ke-10 ini, itu tentu menjadi sangat ironis. Di depan mata kita, kita lagi

membahas tata kelola air yang baik, *no one left behind*, tetapi di depan mata kita, masyarakat Nusa Dua pada hari pelaksanaan *World Water Forum* yang ke-10 itu kekeringan, itu yang pertama.

Catatan yang ke kedua, saya juga mencatat adanya represif dari para aparat. Ini memang bukan ranahnya Pak Menteri, tetapi saya tahu di mana ada perwakilan dari UN bahkan itu terperangkap tidak bisa keluar sehari-hari ketika mau menjadi pembicara untuk *People's Water Forum*. *People's Water Forum* ini dibuat membarengi WWF, kenapa? Karena memang enggak semua orang bisa masuk ke WWF ke-10, Pak, sehingga masyarakat secara inisiatif mereka membuat forum yang sama supaya semakin banyak masyarakat yang juga paham mengenai tata kelola air, bagaimana memanfaatkan air, bagaimana menangani limbah dan kita tahu sehari-hari para narasumber dari *People's Water Forum* itu tersandra.

Jadi Pak Menteri catatannya adalah hasil kemarin yang Bapak sepakati, yang Indonesia dapat ilmu pengetahuannya terkait dengan tata kelola air yang berkeadilan bagi masyarakat itu di-*share* dan diimplementasikan dalam bentuk program kementerian yang nyata, yang *real*. Jadi harapannya itu, Pak, karena kita tau bahwa, Indonesia hari ini belum memiliki hukum, belum memiliki undang-undang terkait dengan tata kelola air yang berkeadilan bagi Masyarakat. Sementara kita juga tahu bahwa harga air kemasan yang menjadi sumber utama masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air bersihnya itu harganya sudah 12 kali per kubik dari harga air PDAM.

Kenapa orang harus beli kemasan? kenapa orang harus beli air? karena pemerintah tidak secara menyeluruh mampu menjawab tantangan sambungan ke rumah tangga. Jadi ini catatan besar Pak, jangan cuman megah-megah kita berhasil menyelenggarakan *World Water Forum*, tapi PR-nya tidak dilaksanakan dan kita tahu pembagian mengenai reservasi, industri, domestik tentang tata kelola air itu juga masih absen dari program pemerintah *gitu*. Kita tahu, Pak, ketidakadilan pemanfaatan air ini masyarakat masih melihat, pemerintah masih melihat bahwa air sebagai sumber daya alam yang tak terbatas itu salah. Air adalah sumber daya yang terbatas sehingga penggunaan dan pengelolaannya harus sangat hati-hati.

Bayangkan, Pak, ada data yang mengatakan, 100 orang turis itu dalam 55 hari menghabiskan air setara dengan 100 keluarga di desa untuk 3 tahun, bayangkan 55 hari untuk 55 orang turis itu setara dengan 100 keluarga di desa untuk 3 tahun, bayangkan, Pak, betapa tidak adilnya pemerintah di dalam mengelola air. Masyarakat kekeringan banyak dan krisis air itu sedang terjadi. Di banyak negara, Pak, krisis air sudah terjadi, sehingga harapannya Pak Menteri mampu di saat-saat terakhir ini Pak-Pak Menteri dan jajaran mampu memberikan sumbangan program terbaik untuk menjawab mengenai krisis air, kelangkaan air, dan ketidakadilan pengelolaan air bagi masyarakat Indonesia. Itu catatan saya yang pertama terkait dengan sumber daya air.

Lalu yang kedua, Pak, ini juga saya pikir tidak kalah menyita perhatian masyarakat yaitu adalah mengenai Ditjen Perumahan, pagu indikatif tahun anggaran 2025 untuk Ditjen Perumahan senilai 4,53 triliun dari yang diusulkan



senilai 21 triliun. Kegiatan prioritasnya antara lain adalah pembangunan rumah susun, rumah khusus, PSU, Perumahan, dan BSPS.

Nah, Pak Menteri kita tahu bahwa, saat ini terkait dengan perumahan ini masyarakat kita sedang lagi viral-viralnya nih, lagi banyak banget dibahas. Pertanyaan saya, Pak, adalah apakah ada data tentang kebutuhan rumah bagi pekerja di Indonesia? misalnya bagi ASN, bagi pekerja swasta, lalu berapa yang selama ini bisa dipenuhi, ya? karena sebagaimana kita ketahui, bahwa Kementerian lembaga yang di yang memimpin untuk sektor perumahan ini adalah Kementerian PUPR. Apalagi Pak Menteri juga merupakan Ketua Komite Tapera yang ini terkait juga dengan Tapera yang kami di Komisi V ini paling banyak ditanya oleh masyarakat dan wartawan.

Jadi bagaimana Pak data tentang kebutuhan perumahan bagi pekerja di Indonesia? karena selama ini saya belum menemukan hitungan data yang detail mengenai proyeksi kontribusi Tapera bagi kebutuhan perumahan para pekerja baik ASN maupun pekerja swasta.

Pertanyaan saya, Pak, yang juga ditanyakan oleh masyarakat hanya ada dua saja, Pak, yang pertama adalah hitungan *gap* atau kebutuhan yang bisa dipenuhi oleh Tapera itu seperti apa? saya mohon ada perhitungan detail dari Dirjen Perumahan, misalnya ya untuk ASN bagaimana, untuk pekerja swasta juga bagaimana. Dan yang kedua Pak, ada enggak *sih*, Pak, ini saya lihat wawancara Pak Basuki di mana-mana, kalau ditanya Tapera ini jawabannya *tuh kok* tidak-tidak *firm*, *gitu* ya.

“Pak ini Tapera gimana *nih*, Pak? kalau pekerja swasta yang sudah menyicil KPR-nya selama ini atau yang punya warisan selama ini sudah punya rumah, enggak butuh lagi perumahan, apakah masih diwajibkan?” nah, ya kan. Terus kadang kala ada beberapa dari pemerintah yang mengatakan ya itu kalau yang mampu nanti untuk subsidi yang tidak mampu. Mohon maaf Pak, subsidi itu kewajibannya negara bukan sesama warga negara memberi subsidi. Kalau sesama warga negara namanya gotong-royong, *gitu* dan alangkah malunya negara yang tidak mampu hadir untuk menjawab dari tantangan yang masyarakat hadapi. Jadi, Pak, mohon penjelasan tentang Tapera, karena saya yakin di sini banyak wartawan masyarakat juga menunggu menanti soal itu.

Lalu yang ketiga, Pak Menteri, saya khusus mau bicara tentang Dapil saya Maluku Utara. Pertama, saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Pak Menteri dan juga jajaran, karena sejak saya ditugaskan oleh partai duduk di Komisi V, ini secara signifikan pembangunan infrastruktur di Maluku Utara dari, dari SDA, dari perumahan, dari jalan itu ada perubahannya Pak, itu saya terima kasih sekali, Pak. Banyak sekali juga usulan-usulan non-reguler seperti pembangunan embung di hilir yang sudah disepakati sudah disetujui oleh Kementerian PUPR, kami sangat mengapresiasi itu, Pak, dan harapannya tentu pembangunan dan beberapa program yang hadir di Maluku Utara itu bisa secara tuntas dan hasilnya bisa dinikmati secara nyata oleh masyarakat. Karena memang beberapa catatan itu penambahan SR bangunannya ada, sambungannya ada, tapi airnya tidak mengalir, itu banyak sekali dan itu juga dibangun beberapa banyak sekali, Pak, hal-hal yang sudah

terbangun, tetapi masyarakat belum merasakan dampak maksimalnya, sehingga harapan saya setiap program dari Kementerian PUPR itu dilihat, apakah program itu visibel untuk dilakukan secara anggaran, dan kalau iya, tolong dipastikan bahwa hasilnya mampu dirasakan oleh masyarakat. Jadi jangan cuman di bangun, tetapi masyarakat merasakan *kok* cuman ada bangunannya, tapi manfaatnya, umpamanya aliran airnya itu belum kami rasakan. *Nah*, itu banyak sekali dan saya yakin itu tidak hanya dihadapi oleh masyarakat Maluku Utara, tetapi teman-teman di sini juga pasti juga merasakan.

Nah, selanjutnya, Pak, saya juga terima kasih untuk target prioritas pada Ditjen Cipta Karya peningkatan kualitas pemukiman di Lelief Waibulan Kabupaten Halmahera Tengah ini sudah sudah terlaksana. Saya juga terima kasih untuk kapasitas dan preservasi peningkatan struktur Jalan Weda-Mafa-Matuting dan Saketa ini target prioritas 2025, Ditjen Bina Marga, ini *urgen* sifatnya, karena ruas jalan ini menghubungkan dua Kabupaten yaitu Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan. Jadi permohonannya ini bisa dikawal dan direalisasikan segera.

Lalu selanjutnya, Pak Menteri, untuk usulan program ada satu kebutuhan yang mendesak di Kabupaten Halmahera Barat yaitu berupa kebutuhan akan Jembatan Kalibutu. Jadi, Pak, ini Jembatan Kalibutu ini, Sungai Kalibutu ini memisahkan ya, antara Kecamatan Loloda dengan kecamatan lain di Halmahera Barat dan terpaksa karena tidak ada penghubung, jalannya putus, sehingga beberapa waktu yang lalu, ketika saya mengunjungi masyarakat di Loloda itu, saya harus mobilnya lewatin sungai. Jadi bukan *my travel my adventure*, tetapi ini adalah *my, my* Dapil tantangannya luar biasa, jadi itu kalau lagi banjir otomatis terputus.

Kemarin saya usulkan untuk sebagai penerima jembatan gantung, tetapi ditolak karena alasan anggaran. Saya mohon, Pak, ini Loloda masih terisolir, bayangkan kalau ada orang sakit, Pak, ini digotongnya lewat Sungai, seperti apa, paling *nggak* ada jembatan yang kalau Viar bisa lewat atau apa, Pak, karena ini bukan sekedar janji kampanye, tetapi saya pikir ini adalah bentuk kehadiran saya sebagai perwakilan masyarakat Maluku Utara yang bisa mengupayakan, bahwa betul-betul tidak ada, tidak boleh ada satupun masyarakat yang tertinggal secara menikmati pembangunan infrastruktur. Jadi jembatan Kalibutu di Loloda menjadi prioritas, Pak, kalau boleh saya fokuskan di situ, boleh yang program-program lain dipotong tapi paling tidak hadir jembatan di Kalibutu, itu yang pertama, Pak.

Dan selanjutnya mungkin Bapak juga mungkin sudah mendengar bahwa, aktivitas gunung berapi di beberapa wilayah di Indonesia Timur sekarang lagi aktif-aktifnya dan di wilayah kami, di Dapil kami, Pak, ada Gunung Ibu di Halmahera Barat dan kemarin sudah erupsi untuk mengantisipasi terjadinya banjir lahar, kami membutuhkan pembangunan infrastruktur sabo dam, Pak, dan selain itu juga kondisi saat ini masih hujan dan potensi banjir itu masih terus bisa terjadi dan kami sangat membutuhkan bahan banjiran seperti *geobox, geobag* dan juga kawat bronjong, Pak, untuk jaga-jaga juga itu juga kebutuhan yang sama juga untuk di Taliabu dan juga beberapa kerusakan

sungai di Halmahera Selatan. Karena memang apa, Pak, di daerah kami itu sangat rawan bencana dan kami juga berbatasan dengan pantai juga sangat banyak jadi bahan-bahan banjir bronjong, *geobox*, *geobag* itu sangat kami butuhkan, Pak. Jadi harapannya Pak Menteri beserta jajaran bisa memberikan dukungan kepada kami di Maluku Utara.

Selanjutnya secara umum, Pak, saya sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kerjasama dan bantuan yang sangat baik dari Pak Menteri PUPR beserta jajaran, selama hampir 2 tahun saya ditugaskan di Komisi V, Maluku Utara sudah kelihatanlah, Pak, ada perubahan untuk dukungan infrastruktur dan harapannya tentu di akhir periode pemerintahan ini Pak Menteri dan juga jajaran, bisa menuntaskan segala sesuatu yang sudah dimulai pembangunan infrastruktur di Maluku Utara. Jadi suvenirnya, oleh-olehnya, kenang-kenangannya untuk Maluku utara ada, Pak.

Terima kasih Pak Menteri, doa kami, Pak Menteri selalu sehat juga Bapak-Bapak dan Ibu jajaran di Kementerian PUPR.

Terima kasih, Pak pimpinan atas waktu dan kesempatan yang diberikan.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Baik, terima kasih Bu Irene.

Selanjutnya Pak, Bu Hanna Gayatri.
Bersiap-siap Pak Muhamad Aras.

F-PAN (HANNA GAYATRI, S.H.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualikum warahmatullah wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati Ketua Komisi V, beserta
Wakil Ketua Komisi V, beserta
Teman-temanku sekalian Komisi V, yang juga
Saya hormati Bapak Menteri PUPR beserta jajarannya,

Untuk itu saya ingin menyampaikan bahwa, pada kesempatan ini saya ingin menanggapi dari paparan yang telah disampaikan bahwa, realisasi anggaran sebesar 4... 34,81 triliun, 22,1% dari total anggaran dengan progres fisik 28,2% lebih tinggi dari tahun sebelumnya 17,6%. Ini menunjukkan peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran. Langkah-langkah percepatan yang diambil meliputi percepatan pengadaan barang dan jasa, penyelesaian administrasi, penanganan masalah tanah, serta re, rekomposisi anggaran sesuai prioritas.

Langkah-langkah ini penting untuk memastikan anggaran dapat diserap dengan optimal dan proyek-proyek strategis dapat selesai tepat pada waktunya. Secara keseluruhan laporan ini menunjukkan progres yang positif, namun tetap perlu adanya upaya percepatan dan pengawasan agar seluruh target dapat tercapai sesuai dengan rencana.

Saran saya, mengingat progres fisik lebih tinggi dari tahun sebelumnya perlu terus mempertahankan dan meningkatkan kinerja ini dengan mengidentifikasi dan menyelesaikan hambatan yang dapat memperlambat pelaksanaan proyek dan mengingat besarnya alokasi anggaran untuk IKN, maka perlu sekali mengembangkan informasi dan data atau laporan secara visual yang dapat diakses oleh semua pihak terkait untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek, serta perlu mengadakan inspeksi lapangan berkala untuk tim independen untuk memastikan bahwa progres di lapangan sesuai dengan laporan yang disampaikan.

Kemudian terkait dengan Bendungan Tiga Dihaji OKU Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, agar pembangunannya dapat diintensifkan pada tahun 2024 ini, supaya dapat diselesaikan sesuai target awal yaitu pada tahun 2025 yang akan datang. Pemerintah dan masyarakat setempat khususnya OKU Selatan, OKU Timur, dan OKI memandang bahwa, pembangunan Bendungan Tiga Dihaji ini merupakan proyek kebanggaan daerah Sumatera Selatan, karena merupakan satu-satunya di Sumatera Selatan.

Oleh karena itu, kami sangat-sangat mengharapkan agar proyek tersebut selesai sesuai rencana, sehingga dapat mengairi lahan irigasi kurang lebih 18.000 hektar, budi daya perikanan untuk air baku dan wisata, serta pembangkit listrik tenaga surya yang sangat dibutuhkan untuk kemajuan ekonomi lokal dan nasional.

Kemudian, terkait dengan program aspirasi Anggota yang ada di Kementerian PUPR ada beberapa hal yang akan kami sampaikan, antara lain:

1. Kami minta ada penambahan program Rusunawa, karena di daerah pemilihan kami Sumatera Selatan II sangat-sangat membutuhkan pembangunan Rusunawa tersebut;

2. Kami juga mohon informasi mengapa program ABSAH atau pembangunan akuifer buatan, buat simpanan air hujan sudah tidak ada lagi, padahal sangat diperlukan terutama di daerah yang sulit mendapatkan air. Untuk program sanitasi LPK di usulan kami dinyatakan bahwa NIS atau Nomor Induk Statistik Ponpes tidak ada, padahal di data kita ada alasannya data NIS tidak *update*, data NIS didapat dari Kemenag, sebaiknya Kementerian PUPR juga berkoordinasi dengan Kemenag agar hal tersebut tidak terjadi lagi, karena banyak program aspirasi tidak memenuhi kriteria karena ketidak *update*-an data yang ada;



3. Bagaimana penghitungan *scoring* pada program Sanimas IPAL, karena pengalaman dari data yang kita masukkan sudah sesuai dan lengkap tapi *scoring* tidak cukup;

4. Pada program percepatan peningkatan tata guna air P3TGAI sudah menggunakan aplikasi untuk penginputan data, kami melihat aplikasi ini belum siap tapi kita sudah dipaksakan untuk segera menginput data di sistem tersebut, padahal waktu itu masih masa kampanye;

5. Kami meminta agar aplikasi SiTIA Dirjen Bina Marga dibuka kembali agar bisa menginput usulan aspirasi Anggota terkait pembangunan jalan yang sudah tidak layak atau rusak berat; terakhir

6. Sangat saya harapkan agar program aspirasi harus sesuai dengan usulan aspirasi Anggota, tidak ditentukan sendiri oleh balai. Contoh kami merevisi program pengembangan infrastruktur, sosial, ekonomi, wilayah atau PISEW tidak diakomodir dengan alasan sudah dilakukan survei, sehingga banyak usulan tidak terakomodir.

Demikian kami sampaikan, harap kami apa yang kami sampaikan mendapat perhatian dan ditindaklanjuti oleh Kementerian PUPR agar program aspirasi yang kami usulkan dapat terealisasi, terutama di Kabupaten Empat Lawang.

Terima kasih untuk semuanya. Untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih Bapak Kementerian PUPR yang sudah banyak memberikan di Kabupaten Empat Lawang jembatan.

*Billahi taufik wal hidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Waalaikumsalam,

Terima kasih, Bu Hanna Gayatri.

Pak Muhammad Aras silakan, Pak.
Bersiap-siap Pak Dedi Wahidi.

F-PPP (DR. H. MUH. ARAS, S.PD., M.M.):

Terima kasih.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yang terhormat Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi V,

Oh, dekat lagi, cek-cek, oh iya, ada, ada, ada, harus lebih dekat, kurang sensitif *mic*-nya.

ANGGOTA KOMISI V DPR RI:

Matikan itu Boy, makanya.

F-PAN (H. BOYMAN HARUN, S.H.):

Iya, iya.

F-PPP (DR. H. MUH. ARAS, S.PD., M.M.):

Oh, iya makasih.

Yang saya hormati Pak Menteri dan seluruh jajaran, dan
Hadirin yang sama berbahagia,

Pertama-tama tentu menyampaikan rasa terima kasih kepada Pak Menteri dan seluruh jajaran atas kerjasama yang baik selama ini, sehingga tentu kedekatan kami dengan masyarakat bisa lebih maksimal bersama dengan program-program yang tentu kita berikan kepada masyarakat bersama dengan Kementerian PUPR.

Yang kedua terkait dengan progres keuangan dan fisik 2024, tentu ini walaupun masih lebih bagus dari tahun kemarin, tetapi ini tidak mencapai target yang telah ditetapkan oleh kementerian, agar ini menjadi perhatian, sehingga tentu dalam pemerintahan Jokowi sampai 2024 ini betul-betul tidak mendapatkan celah yang cukup besar untuk menjadi penilaian selama 10 tahun menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.

Kemudian terkait dengan padat karya, tentu harapan besar kami adalah untuk program tahun 2024 ini secara keseluruhan agar segera dilaksanakan. Kami tidak butuh banyak waktu lagi untuk berada di tempat ini, untuk tahun 2024 ini, kita sisa kurang lebih 6 bulan, 3 bulan, tentu ini menjadi perhatian sehingga kami tidak dianggap bahwa telah menjanjikan lalu juga mengingkari janji kami di masyarakat.

Kemudian yang selanjutnya, tentu kami melihat program-program baik itu yang sifatnya *multiyears* maupun bukan *multiyear*, terutama program dari

ruas Maros Kabupaten Bone tepatnya di Ale Kappang dan Tompo Ladang ini kontrak untuk *elevated* di sana berakhir di Agustus. Sementara progres yang terjadi hari ini memperlihatkan bahwa masih mencapai kurang lebih hampir 70%, sehingga ini harus dikebut mengingat bahwa kondisi di lapangan juga agak berat karena ini masih sering terjadi longsor di sana sehingga tentu dukungan dari teman-teman dari balai jalan dan jembatan Provinsi Sulawesi Selatan ini sangat dibutuhkan untuk selalu meningkatkan pengawasan, sehingga kontraktor bisa melaksanakan dengan tepat waktu, tepat mutu, dan tentu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

Kemudian yang selanjutnya, *bypass* Mamminasata yang hari ini terus digenjut, bahkan pemerintah Sulawesi Selatan menambah lagi satu daerah dari daerah Pangkep tentu ini menjadi perhatian, karena ini sudah kurang lebih 10 tahun lebih ini menjadi program strategis nasional dan sampai hari ini belum memperlihatkan perkembangan yang signifikan, ya.

Nah, untuk program tahun 2025, kami juga miris melihatnya, karena tadi penyampaian terjun bebas dari anggaran hampir 150 triliun kali ini hanya kurang lebih 70-an triliun, ini tentu akan mengurangi banyak program-program yang sangat dibutuhkan oleh Masyarakat. Oleh karenanya, tentu kita harapkan, bahwa perjuangan yang dilakukan oleh kementerian bersama dengan teman-teman Komisi V agar bisa meningkatkan pagu anggaran yang dialokasikan kepada teman-teman dari Kementerian PUPR.

Kemudian selanjutnya, ruas Makassar–Maros yang 5 tahun terakhir ini selalu mengalami kemacetan, bahkan tahun kemarin kami minta sudah dibuatkan DED-nya, agar ini bisa diperlebar atau paling tidak bahwa ini di alternatif untuk dibuatkan jalan tol, sehingga masyarakat pengguna jalan dari Makassar ke Sulawesi Barat melalui Maros–Parepare tentu ini menjadi nyaman dan bisa memanfaatkan waktu yang sesingkat-singkatnya untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

Kemudian Maros – Bone yang kemarin yang tepatnya di Koppe-Taccipi yang masih kurang 12 kilometer dengan 10 jembatan yang lebarnya hanya kurang lebih 4 meter lebar jalan dan jembatannya ini segera juga harus mendapatkan perhatian lanjutan, sehingga ini bisa terselesaikan. Ini terlanjur sudah menjadi jalan nasional, sehingga ini wajib untuk kita laksanakan, sehingga tentu pengguna jalan di area itu bisa memanfaatkan dengan maksimal.

Dan yang terakhir tentu kita harapkan, bahwa Kementerian PUPR untuk 2025 tetap fokus untuk infrastruktur seperti yang telah kita laksanakan kurang lebih 4 tahun terakhir ini, sehingga harapan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan infrastruktur Indonesia bisa sedikit berkurang di akhir masa jabatan Pak Jokowi.

Barangkali begitu, Pak Ketua.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Terima kasih, Pak Muhammad Aras.

Pak Dedi Wahidi.

Bersiap-siap Pak Boyman, Boyman Harun.

F-PKB (H. DEDI WAHIDI, S.PD.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pak Ketua dan rekan-rekan Anggota yang saya hormati,
Pak Menteri bersama seluruh jajaran yang saya hormati,

Makasih kesempatannya.

Pak Menteri, saya merasa kaget RAPBN 2025 naik, kenapa PUPR yang sangat penting ini lagi mestinya memacu pembangunan untuk segala pertumbuhan mengalami penurunan yang sangat drastis. Mohon penjelasannya, apakah karena program makan siang gratis atau karena pembangunan IKN yang dipercepat.

Pak Menteri, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi rencana pembangunan bendungan. Ini sangat penting untuk menjaga pertumbuhan dan ketahanan pangan, tapi saya usul, Pak Menteri, yang sudah dibangun tolong cepat ditindak lanjuti seperti Waduk Jati Gede kalau enggak salah diresmikan tahun 2017, tapi irigasinya sampai sekarang belum selesai, sehingga karena pembangunannya yang lambat, sering mengganggu kebutuhan pengairan pertanian. Tolong pembangunan rentang kiri dipercepat, dilanjutkan pembangunan rentang kanan.

Kemudian selanjutnya di daerah Dapil saya juga telah selesai dibangun Waduk Cipanas yang beberapa bulan yang lalu, akhir tahun malah masih saya sudah mendapatkan undangan peresmian oleh Pak Presiden, tapi batal. Kalau Bapak Presiden terlampau sibuk, saya kira bisa oleh Pak Menteri saja peresmiannya, sehingga kalau sudah diresmikan itu kan dilanjutkan dengan pembangunan irigasi dan tersiernya, supaya segera dirasakan manfaatnya daripada pembangunan bendungan itu. Demikian pula pembangunan Bendungan Sadawarna di Indramayu Barat atau Subang, Sumedang, Indramayu.

Kemudian berikutnya, Pak Menteri, mengenai ya karena turunnya anggaran atau pagu anggaran yang demikian tajam sehingga program aspirasi padat karya sangat minim sekali untuk tahun 2025, Komisi V tidak seksi lagi *nih*, yaitu Pamsimas, TPS3R, PISEW, BSPS, Rusunawa, P3TGAI, malah enggak ada angkanya *nih*, saya tadi konsultasi ke belakang "Bu, malah *enggak* ada angkanya ini, berapa ini barang?".

Pak Ketua dan teman-teman yang saya hormati,

Lanjutnya mengenai kondisi fisik sekolah. Pak Menteri dan Bu Dirjen, SD apalagi di wilayah pesisir sudah hampir ambruk. Menurut saya kalau harus dikasih makan gratis prioritas luar Jawa saja dulu *deh* daripada mereka makan, dikasih makan siang gratis tapi kemudian sekolahnya enggak layak huni, enggak layak pakai. Menurut saya justru prioritas gurunya dipenuhi, guru banyak guru honor 300, 500.000, sehingga kualitas enggak bisa jamin. Sekolah keadaannya betul-betul tidak layak, sehingga pernah saya ngusulkan satu bundel besar tapi realisasinya ya, *ngicir gitu*, tidak sebesar usulannya.

Berikutnya saya juga mengucapkan selamat Pak Menteri ditugaskan sebagai kepala Otorita IKN, tapi tolong Pak Menteri jangan cepat-cepat Pak Menteri, enggak harus selesai sekarang, soal 17 upacara di sana *enggak* masalah, tapi tidak terlalu cepat.

Saya pernah dulu Pak Menteri ke Jerman ada istana kembar dua, Pak Menteri. Saya mendapatkan penjelasan kenapa istana sampai kembar dua, anaknya raja waktu itu anaknya banyak, tapi raja senang kepada anak yang usia 16 tahun, anaknya minta syarat saya mau jadi raja menggantikan Bapak, tapi saya minta dibangun istana baru, sampai raja yang diangkat dinobatkan itu meninggal, istananya belum selesai Pak Menteri, tapi ya bagus sekali. Saya juga kalau kunjungan ke luar negeri sering menyampaikan kepada teman-teman kayaknya kiamat masih jauh, *nih*, bangunan di luar negeri demikian bagus, hebat, kokoh, jadi jangan terlalu ngebut, gedung DPR, istana negara itu lambang negara, jadi betul-betul harus bagus dan berkualitas.

Sabar, Pak Menteri, jangan terlampau tergesa-gesa dan terburu-buru, tidak harus selesai dengan Presiden sekarang, kalau perlu dua tiga Presiden yang akan datang baru selesai.

Selanjutnya Pak Menteri, saya juga menyampaikan terima kasih yang sudah sering saya sampaikan, baik ke Pak Menteri PUPR, maupun ke Pak Menteri Perhubungan, yaitu, *exit* tol tidak berhenti. Kemarin Pak Menteri di TV mulai tahun ini di *exit* tol mobil tidak berhenti, itu luar biasa, akan mengurangi kemacetan. Terima kasih, Pak Menteri.

Yang terakhir mengenai Tapera, Pak Menteri. Usul saya, sukarela saja Pak Menteri jangan dipaksakan, karena banyak PNS di kita ini yang sudah tidak punya SK lagi. SK-nya di bank, bank daerah setempat, tinggal sedikit kalau harus di potong lagi untuk ini, khawatir mengganggu dan ini sudah kelihatan gejala keresahan. Jadi lebih baik ya yang minat silakan, jadi dianjurkan saja dulu tidak diharuskan dulu.

Saya kira demikian Pak Ketua sudah saya sampaikan.

Makasih Pak Ketua, *makasih* Pak Menteri, Bapak-Bapak dan Ibu Dirjen *makasih* semuanya.

Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq,

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Terima kasih, Pak Dedi.

Selanjutnya Paki Ali Mufthi, silakan Paki Ali Mufthi ya silakan, setelah Pak Ali Mufthi nanti bersiap-siap Pak Syafiuddin.

Oh, *sorry* Pak Boy *sorry* Pak Boy dulu Pak, baru Pak Ali Mufthi, *sorry* Pak Boy, Pak Ali Mufthi, baru Pak Syafiuddin.

F-PAN (H. BOYMAN HARUN, S.H.):

Baik, terima kasih Ketua.

Bapak Ketua, Pimpinan beserta seluruh Anggota Komisi V yang saya hormati,

Bapak Menteri beserta seluruh jajaran yang saya hormati dan saya banggakan,

Hari ini nampaknya Pak Menteri ini tidak seperti biasa Pak, biasanya santai, rileks, itu ini agak tegang saya semenjak jadi Ketua Otorita ini, santai-santai aja, Pak, makanya saya hari ini saya santai saja ini, Pak. Saya melihat pagu anggaran di 2025, kemudian pagu indikatifnya seperti itu kayaknya harus berebut juga, *nih*, Pak, berebut informasi, berebut perhatian agar perjuangan kami di Dapil kami mudah-mudahan bisa diakomodir.

Yang pertama, saya hanya ingin mengucapkan terima kasih, Pak Menteri, sudah banyak kerjasama kita yang sudah terlaksana di daerah di daerah Dapil kami, terutama berkaitan dengan masalah pembangunan jalan, Pak, Inpres. Jadi Inpres dari Kendawangan ke Sungai Tengar itu sudah beres Pak, sudah selesai, *cuman* dari Sungai Tengar ke Pesaguan itu yang belum. Saya sudah dikirim beberapa video, Pak, video orang melahirkan di jalan antara Sungai Tengar dan Pesaguan, kemudian orang meninggal juga di daerah Sungai Nanjung, itu antara Sungai Tengar dan Pesaguan, karena jalannya sangat luar biasa jeleknya, walaupun saya tahu anggaran untuk 2024 ini *alhamdulillah*, Pak, sudah diplot dan ada anggarannya *Insyallah* di 2024 ini akan dibangun, diteruskan Inpres itu dari Sungai Tengar sampai ke Pesaguan. Makanya dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan juga kepada masyarakat Pak, tenang saja Pak Menteri PU sudah menganggarkan untuk terusan pembangunan Sungai Tengar dan Pesaguan, itu yang pertama, Pak.

Yang kedua, ini kaitan dengan untuk 2025, Pak. Saya dan Pak Syarif ini baru saja menerima, Pak, delegasi dari Kabupaten Sambas, tujuannya hanya satu, Pak, ada proposalnya nanti Pak Syarif yang sampaikan, tolong dibangun stadion sepak bola. Menurut mereka itu prestasi orang Sambas ini sudah luar biasa berkaitan dengan masalah sepak bola, tetapi stadion sepak bolanya belum ada, makanya mereka menyampaikan aspirasinya melalui kami

dari Anggota DPR RI yang ada di Komisi V untuk disampaikan kepada Bapak Menteri, agar diakomodir, dibangun stadion sepak bola di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.

Selanjutnya, Pak Menteri, barangkali kalau yang lain-lain ini ngomongnya agak malu-malu, agak apa gimana enggak jelas, saya perjelas berkaitan dengan masalah padat karya, Pak Menteri. Jadi kalau bisa dalam jangka waktu 3 bulan ini, Pak Menteri, status padat karya ini sudah jelas, Pak Menteri. Karena apa Pak Menteri? ada teman-teman kita di Komisi V ini yang sudah tidak terpilih kembali, Pak Menteri. Kedua, belum tentu juga Anggota Komisi V yang ada sekarang ini masih tetap di Komisi V, sementara janji-janji kita kepada masyarakat pada waktu Pileg kemarin, Pemilu kemarin adalah sudah berhamburan janji itu kita akan membangun bantuan ini, bantuan itu sesuai dengan pengalaman di tahun-tahun sebelumnya berkaitan dengan masalah padat karya.

Jadi maksud saya, Pak Menteri, untuk menghindari agar jangan sampai wanprestasi kami dianggap oleh masyarakat ini, tolong disisa-sisa masa jabatan kita di tahun 2024 ini realisasi padat karya secepatnya untuk dilaksanakan, Pak Menteri. Mungkin kawan-kawan ngomongnya tadi agak-agak tenggelam, timbul, tenggelam, timbul, begitu kalau saya jelaslah biar Pak Menteri juga enak dengarnya dan pelaksanaannya bisa dengan jelas juga.

Kemudian, Pak Menteri, saya berharap Ibu Dirjen Cipta Karya berkaitan dengan pembangunan sekolah-sekolah dasar yang 2024 kemarin sudah kita usulkan dan itu kondisinya sangat parah, Ibu, terutama di daerah Kuala Karang, Teluk Pakedai itu di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, itu bahkan kalau mau dibangun itu harus direlokasi, Bu, tidak cocok lagi untuk dibangun di situ karena kalau air pasang dan ombaknya itu masuk itu sampai ke sekolah tidak bisa untuk siswa itu sekolah.

Dan *alhamdulillah* terima kasih Pak Menteri di tahun ini, abrasinya sudah dibangun di Kuala Karang, di Teluk Pakedai, untuk menghindari ombak-ombak yang begitu besar yang membuat rumah-rumah penduduk, kemudian sekolah itu pada hancur, bukan rubuh lagi, Bu, hancur karena terjangan ombak dan *alhamdulillah* tahun ini dibangun abrasi.

Jadi saya pikir itu saja, Pak Menteri, hal-hal lain nanti saya berpikir dululah apa-apa yang harus dipikirkan untuk disampaikan kepada Bapak Menteri, karena ini berkaitan dengan anggaran ini, Pak Menteri. Artinya mencari yang sangat prioritas, mudah-mudahan dikabulkan oleh Pak Menteri dan *Insyallah* tidak mengganggu pikiran Pak Menteri, sehingga Pak Menteri bisa senyum, jangan tegang lagi seperti sekarang ini, Pak Menteri.

Demikian, Ketua.

*Billahi taufik wal hidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*



KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Terima kasih, Pak Boy.

Selanjutnya Pak Ali Mufthi, bersiap-siap Syafiuddin.

F-PG (DR. H. ALI MUFTHI, S.AG., M.SI.):

*Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Yang saya hormati Ketua, dan
Wakil Ketua Komisi V, beserta
Seluruh Anggota Komisi V,
Yang saya hormati Pak Menteri dan seluruh jajarannya,
Hadirin semua yang saya hormati,

Terima kasih atas waktunya, Pimpinan.

Pertama, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kementerian ini, karena saya menilai kementerian ini sangat *perform* di dalam melayani masyarakat, sehingga kalau ada persoalan-persoalan yang berkembang di daerah-daerah responnya sangat cepat. Oleh karena itu, saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kementerian ini dan mudah-mudahan perjalanan ke depan lebih baik dan lebih cepat di dalam merespon persoalan-persoalan kemasyarakatan.

Berikutnya, saya ingin mengingatkan dua hal yang saat itu disepakati di ruang ini: yang pertama bahwa padat karya 2024 itu sama dengan 2023, ya ini-ini ini kesepakatan yang ditulis, yang dibacakan. Mudah-mudahan Pak Menteri dan Bapak, Ibu semua tidak hanya kalau sudah ingat ya mengingatkan kembali aja, mengingatkan kembali, mudah-mudahan kita apa komitmen dengan kesepakatan itu karena komitmen itu adalah jadi diri kita.

Komitmen yang kedua, adalah bahwa program itu bisa dikasih kawan-kawan di luar Dapil, ya mohon tolong ini juga menjadi atensi. Karena dulu ada kesepakatan itu suka kami juga ngasih beberapa teman yang di luar Dapil, tapi kalau sekarang seandainya ada aturan atau beberapa *item* yang kurang dalam rangka itu ya tolong itu diperhatikan di luar Dapil tetap menjadi bagian dari komitmen ini.

Pak Menteri,
Pak Ketua,
Bapak-Ibu yang saya hormati,

Yang berikutnya, saya ingin menyampaikan berkaitan dengan Inpres Jalan Daerah. Pak Menteri, Pak Dirjen Bina Marga, yang saya dengar setelah APBN 2024 disahkan pelaksanaan IJD ini, prasyarat untuk IJD itu mengikuti persyaratan jalan nasional ya, jadi lebarnya sekian meter, *gitu* ya, dan

sebagainya-sebagainya. Pertanyaan kami atau harapan kami atau kritik saya kepada kata kritik saya kepada persoalan ini adalah jalan daerah itu bukan jalan nasional tentu *space*-nya beda, karena *space*-nya beda, maka regulasinya harus tidak sama.

Nah, oleh karena itu, saya tadi mendengar Pak Menteri katanya di tahun ini ada tahap kedua, saya harapkan tahap kedua itu apa di *space* ini menjadi penting agar tidak seperti ketentuan jalan nasional, kan aneh *wong* jalan daerah *kok* jalan nasional.

Berikutnya, Pak Menteri yang saya hormati, di Dapil saya itu ada dua Bendungan, di Trenggalek sama di Ponorogo. Saya harapkan ini bendungan sangat indah sekali bagus, *view*-nya bagus dan semuanya baguslah, top, saya ucapkan terima kasih atas dua bendungan itu, tapi kritik saya atau apa *review* saya, adalah efektivitas bendungan ini untuk melayani masyarakat, khususnya masyarakat tani.

Ini yang kedua adalah karena ini apa bagus dan sebagainya tadi saya sampaikan, saya mengharapkan agar fungsi bendungan ini bisa dioptimalkan di sektor yang lain ya, di sektor yang lain, artinya bisa untuk wisata, bisa untuk apa dan sebagainya yang itu tentu menjadi wewenang Bapak untuk sehingga bisa ada produktivitas, masyarakat juga bisa menikmati libur di suasana yang sangat baik itu. Ini yang berkaitan dengan 2024.

Yang berikutnya APBN 2025.

Pak Menteri, dan
Bapak-Ibu sekalian,
Pimpinan,

Saya kemarin di dalam Rapat Paripurna mendengarkan pidatonya Bu Menteri Keuangan. Jadi ada tiga istilah, dua istilah yang saya tangkap dengan APBN 2024, *spending better* dan *prudent*. Nah, itu saya tanyakan, saya cari analisa, itu kayaknya APBN '25 itu *perform* ya intinya begitulah, baik itu ya, posturnya baik, *gitu*, tapi menjadi pertanyaan kita adalah kalau APBN proyeksi prognosisnya bagus itu tentu anggaran kementerian itu ya apa minimal sebanding dengan anggaran yang sudah berjalan, sebanding begitu, tidak terus terjadi apa penurunan yang cukup banyak, 145 sekarang cuma 75, *gitu* ya. Dalam ilmu fikih itu kalau pendapatan kita, Pak Menteri, pendapatan kita tahun depan itu lebih rendah daripada uang yang kita kelola tahun ini, maka kategori miskin ya, kita kan enggak mungkin ini, kementerian yang begitu hebatnya masuk dalam kategori itu.

Nah, oleh karena itu, ini perlu dijelaskan, ini sebenarnya proses desain menentukan pagu ini seperti apa sehingga kita akan selalu seperti itu, pagunya 75 nanti *ending*-nya di 100 lebih dan sebagainya.

Terakhir, Pak Menteri, saya dapat titipan proposal ini untuk embung di tahun 2025, Pak Menteri. Kalau diizinkan nanti saya akan serahkan oleh Pak

Pimpinan. Embung ini penting, karena ada embung yang cukup puluhan tahun rusak dan ini butuh ada ininya.

Terima kasih Pimpinan, Pak Menteri, kurang lebihnya mohon maaf, prinsipnya Kementerian PUPR *top*, kesepakatan itu kalau bisa jangan sampai dirubah karena dalam Al Qur'an itu "*fa idza azamta fatawakkal alallah*", "apabila sudah ada kesepakatan bertawakallah kita kepada Allah".

Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, izin serahkan Pak Pimpinan.

Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

(PERGANTIAN KETUA RAPAT)

KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/ WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):

Walaikumsalam,

Lanjut Pak, silakan-silakan sekarang, bagi ada yang mau menyerahkan sekaligus, sekarang supaya kita agak cepat dikit, kalau ada yang mau menyerahkan.

Baik. Iya sudah serahkan?

Makasih, Pak Menteri.

Kemudian Pak Syafiuddin, silakan Pak Syafiuddin.

F-PKB (H. SYAFIUDDIN, S.SOS.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yang saya hormati Ketua,
Wakil Ketua, beserta
Sahabat-sahabat Anggota yang hadir,
Pak Menteri,
Pak Sekjen,
Pak Dirjen, dan
Segenap jajaran Kementerian PUPR yang hadir yang saya hormati dan saya banggakan,

Alhamdulillah, pertama saya cuma ingin mengapresiasi terkait evaluasi APBN tahun 2024 kepada Kementerian PUPR, terutama di Dirjen Bina Marga. Jadi, *alhamdulillah* saya waktu jadi DPR 2019 sampai sekarang sudah tinggal 4 bulan ini, jadi pelebaran jalan nasional yang walaupun secara *multiyears* ini sudah berjalan bagus dan *alhamdulillah* tidak ada hambatan di bawah.

Sesuai janji saya, bahwa Madura sekarang sudah tidak apa namanya sudah ramah terhadap pembangunanlah kira-kira begitu. Jadi tidak ada riak-

riak, tidak ada penghadangan, tidak ada pengunggajian atau apalah stigma negatif tentang Madura. *Cuman* di rencana anggaran tahun 2025 ini kami tadi, apakah memang ada berapa yang belum saya lihat, ini kayaknya Pulau Madura tenggelam kembali, tidak muncul satupun itu Madura di rencana anggaran 2025 ini.

Mungkin ini di sini ada Mas Sekjen, saudara saya, Mas Sekjen, filosofinya mungkin beliau ini filosofi lilin, *gitu* kan, jadi menerangi yang lain, namun ditubuhnya sendiri meleleh. Jadi Madura ini tidak, tidak dibangun, kira-kira kan begitu, atau mungkin filosofinya, filosofinya, filosofinya pandai besi. Kalau pandai besi ini tukang buat arit, tukang buat celurit, tukang buat pisau, ini *ndak* mungkin punya pisau atau celurit yang bagus, sebab kalau ada celurit yang bagus, pasti dijual atau dikasihkan kepada orang lain, kira-kira begitu. *Cuman* saya sebagai Anggota DPR RI, mungkin Mas Sekjen malu saya suarakan atau saya dorong, *gitu* kan, saya dorong bahwa Madura ini masih butuh anggaran, masih butuh pembangunan.

Saya *alhamdulillah* terpilih kembali sebagai Anggota DPR RI 2024-2029, maka dari itu sesuai janji kami pada waktu pertama kali jadi DPR RI pelebaran jalan nasional, mohon kepada Pak Dirjen, walaupun secara *multiyears* lagi. Jadi posisi volume ini kan *finish* di Sampang nanti, jadi Sampang–Sumenep ke wilayahnya Mas Sekjen itu, tolong juga diakomodir untuk tetap dibangun pelebaran jalan nasional itu, jadi sampai tuntas sampai Madura, enggak apa-apa, meskipun secara *multiyear*, enggak apa-apa.

Terus yang kedua Bangkalan-Sampang ini tiap tahun, Pak, ini ada musibah banjir. Jadi Bangkalan-Sampang ini memang tempat banjir semua, enggak tahu karena apa, namun dulu pada waktu saya jadi DPRD di daerah, itu ada wacana untuk apa Namanya, pembangunan Waduk Blega. *Nah*, mohon kepada Dirjen SDA ya, atau Pak Menteri, melalui Pak Menteri ini, melalui Pak Menteri, bagaimana pembangunan Waduk Blega Ini ini diwacanakan kembali. Saya berharap bahwa stigma negatif yang mengatakan bahwa penolakan itu *alhamdulillah* ini tidak terjadi, pelebaran jalan nasional, Pak Menteri, *alhamdulillah* bisa dilihat, bisa dicek, tanya Ka.balai dan segala macam kami melalui beberapa tokoh memang wanti-wanti untuk tidak mengganggu jalannya program nasional yang ada di Madura.

Maka dari itu saya berharap bahwa, solusi pembangunan Waduk Blega ini merupakan solusi untuk dampak banjir yang selalu tiap tahun itu ada, walaupun kemarin sebelum saya jadi DPR ada pembangunan apa Namanya, Sungai Kemuning ya, yang menelan sekitar 63 miliar atau berapa banyaklah, itu bukan solusi yang-yang konkret, Pak Menteri. Kalau pembangunan Waduk Bleba..., Blega ini bagus, selain memang untuk bagaimana buat solusi tentang banjir juga itu menjadi penyerapan atau adanya sumber-sumber air bersih di wilayah Madura yang memang notabene sangat kekurangan air bersih, Pak Menteri.

Saya berharap wacana itu melalui Kementerian PUPR itu di...diangkat kembali dan saya jamin *Insya Allah* pasti Madura sudah tidak seperti dulu, Pak Menteri. *Alhamdulillah* sekarang banyak bupati-bupatinya masih muda, ini

calon-calon bupati juga masih muda dan saya *alhamdulillah* tidak nyalon bupati, saya tetap jadi DPR RI Pak Menteri, jadi orang tua, jadi orang tua. Jadi kalau jadi orang tua kan enak gitu marahi anak-anak itu katakan gitu.

Jadi saya berharap melalui Kementerian PUPR semuanya Pak Dirjen tolong dibantu Madura, karena Pak Sekjen ini orang baik jadi malu untuk bersuara takut dimarahi sama Pak Menteri mungkin, dianggap monopoli gitu, kan tapi lihat ini dari halaman 1 sampai sekian tidak ada namanya makhluk Madura lagi, *gitu* kan. Jadi mungkin seperti itu, Pimpinan.

Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/ WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):

Waalaikumsalam,

*Makasih, Pak.
Pak Fadholi.*

F-NASDEM (DRS. FADHOLI, M.I.KOM.):

Baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yang saya hormati Bapak Pimpinan, dan
Bapak-Ibu Anggota Komisi V,
Yang saya hormati Pak Menteri dan seluruh jajarannya,

Saya hanya memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran terutama Pak Menteri dan seluruh jajarannya. Mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan selama ini mendapatkan pahala *jazukumullah khair jaza* dan menjelang di masa periode akhir ini mudah-mudahan *husnul khatimah*, Pak, itu aja saya-saya berharap banyak mudah-mudahan.

Untuk pertanyaan saya tidak ada pertanyaan, Pak, nanti akan saya pertajam di dalam rapat RDP ya bersama dengan para Dirjen aja, karena enggak mungkin saya sampaikan pada hari ini, hanya saya minta usulan jembatan *siratul mustaqim* yang tadi saya sampaikan, Pak Menteri, ini mohon bisa dibantu itu aja, ini jadi hanya satu itu.

Nah, selebihnya saya berdoa mudah-mudahan Pak Menteri panjang umur, kemudian ya ini besok masih lanjut lagi kalau auranya kayak gini gambarannya *Insya Allah* mudah-mudahan masih tetap menjadi Menteri PUPR periode yang akan datang.

Saya rasa itu Pak Ketua, sehingga penajaman saya nanti akan saya sampaikan karena banyak hal dan biar lebih detail nanti pada saat rapat bersama-sama dengan para Dirjen.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/ WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):

Walaikumsalam,

Saya kira perlu kita cermati ini saya punya Pak Fadholi bagus sekali waktunya dipakai, mudah-mudahan teman yang lain juga waktunya pendek-pendek semuanya.

Ibu Novita silakan.

F-GERINDRA (HJ. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M.):

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yang saya hormati Pimpinan,
Anggota,
Pak Menteri dan jajaran,

Pertama, saya ucapkan terima kasih ke Pak Menteri karena programnya luar biasa. Berkat program PU ini keterpilihan kita pasti tinggi gitu, suara saya juga meningkat dua kali lipat, apalagi Pak Menteri sampai *nginep* di sana kan ya Pak ya, di Dapil Banyumas–Cilacap bersama Presiden. Jadi luar biasa terima kasih, terima kasihnya tidak hanya Pak Menteri, tetapi kepada Pak Dirjen juga. *Nginep*-nya sama Pak Presiden pastinya, rombongan.

Kemudian saya di sini cuma mau tanya tentang Tapera, Pak Menteri, ini kan sekarang lagi heboh banget, tadi sih teman-teman sudah nyampaikan tentang Tapera. Ya, tolong nanti ada penjelasan sedikit karena banyak banget masyarakat dan wartawan yang pada nanya ini gimana *gitu*, itu.

Kemudian tentang aspirasi aja walaupun anggarannya sekarang apa pagu indikatifnya turun, saya berdoa semoga nanti pagu anggarannya bisa berubah, bisa naik kembali dan aspirasi kita bisa terealisasi. Kades-Kades ini sudah pada nanya juga, karena kemarin Pemilu sudah bantu akhirnya sekarang mereka pada nanya, kapan ini realisasi? *gitu*, sedangkan kita sudah mengusulkan banyak. Semoga walaupun turun anggaran pagu-pagu anggarannya, tetapi, tapi kan pagu anggarannya untuk 2025, sedangkan yang 2024 masih berjalan. Itu aja *sih*, ada aspirasi BSPS, irigasi, jembatan gantung, embung, Rusunawa, dan semuanya.

Berikutnya yang Pasar Kroya waktu itu nanya belum sempat dijawab detail karena ramai juga di Cilacap, sudah ya, Pak, ya? Sudah, cuman katanya anggarannya belum ada sudah dilelang, tapi anggarannya belum ada benar apa enggak itu? Jadi saya kali ini tanya lagi.

Terus yang jalan tol ke Cilacap itu jadi apa enggak ya, Pak Menteri, mungkin minta dijelaskan. Sama saya kemarin dapat titipan dari teman tanya tentang jalan tol Gilimanuk–Mengwi ini, jadi ada jalan tol di sana apa enggak?

Berikutnya usulan tentang IJD, kemudian banjir di Cilacap nanti sama Dirjen lebih detail, tapi sekilas saja banjir di Cilacap tinggi di Wanareja, di Karang Pucung, Cipari, Cimeneng dan usulan-usulan embung yang sudah masuk berharap untuk bisa direalisasikan, terutama yang Inpres, Pak, karena desa-desa ini senang banget dapat Inpres, *gitu*, bisa menyambungkan perekonomian di sana.

Berikutnya ini di Komisi V kan enggak ada Anggota DPR Dapil NTT, kemarin ada bupati nitip juga Pak Menteri, di jalan lintas Pantai Selatan Nangalili ini menuju wisata, rusak banget di daerah Labuan Bajo ke Manggarai Tengah, ini berharap siapa tahu ada anggaran.

Kemudian terakhir, saya tanya, ini ada program sumber daya air di bendungan di Cabean Jateng, *bener* Jateng dan Kedung Langgar Jateng itu dimana ya, Pak, ya kabupatennya? mau tanya itu. Itu aja *sih* Pak Menteri, enggak banyak, nanti berikutnya bisa detailnya sama Dirjen.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/ WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):

Makasih, Bu Novita.

Pak Syarief Abdullah silakan, yang mau naik haji tanggal 10.

F-NASDEM (H. SYARIEF ABDULLAH ALKADRIE, SH., MH.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera.

Bapak Menteri beserta seluruh jajaran,
Pimpinan Komisi V,
Teman-teman Anggota Komisi V yang saya muliakan,

Tentu pertama mungkin ini rapat yang terakhir kali ya, untuk periode ini, ya tapi tentu kita berharap mudah-mudahan Pak Menteri masih berlanjut, karena masih kita butuhkan atau mungkin naik kepada posisi Menko, tapi yang ada-ada di sini mungkin bisa melanjutkan, ini kan doa, kan masih ada beberapa

ini Pak Dirjen, Pak Sekjen, kenapa? karena pasti nyambung gitu visinya ya. Karena saya lihat dengan program-program yang kita rasakan dengan program-program yang ada terutama program padat karya itu betul-betul sangat menyentuh kepada masyarakat dan juga sangat bermanfaat, terutama dalam rangka mengentaskan *stunting*, karena cukup besar peran dari program padat karya baik BSPS, kemudian PISEW apa dulu ada Kotaku, ini kan dalam rangka untuk cepat menuntaskan terhadap salah satu indikator untuk memenuhi supaya tidak lagi *stunting*.

Hal itu sangat dirasa dan kita, saya dulu ada di kampung itu kalau masuk saja di muara jalan itu masih banyak rumah yang atap daun, dinding daun, tapi sekarang *ndak* ada, Pak, kenapa? karena program yang Bapak itu sangat betul-betul di apa, mempercantiklah wajah, apa meletakkan terhadap keberadaban bagi kehidupan manusia. *Nah*, walaupun kami rasakan dengan apa pagu yang disampaikan ini, ini hampir 100% tapi kan ini transisi mungkin ke depan setelah pelantikan pemerintahan yang baru tentu juga akan ada penyesuaian-penyesuaian, tetapi ini memang sangat kecil.

Namun dengan demikian, tentu dengan kebutuhan kita yang begitu besar tetapi juga yang mendasar perlu kita-kita apa kita selesaikan, tentu kita harus juga memilih hal-hal yang betul-betul sangat diperlukan, sehingga mungkin ada hal-hal yang perlu juga kita apa kita tunda dalam rangka untuk menyelesaikan itu.

Nah, ada beberapa yang menjadi perhatian tadi, Bapak, saya sampaikan itu pembangunan stadion itu. Itu memang sangat diperlukan dalam rangka itu juga memperkuat terhadap kebersamaan, karena Sambas ini adalah daerah yang berbatasan langsung dengan negara sebelah, tapi jaraknya dekat. Karena selama ini sarana sepak bola ini yang selalu mereka kedua negara ini mengadakan *event-event*, tetapi ketika mereka datang ke negara kita memang ya sangat jauh dibandingkan infrastruktur yang ada di dia, lapangan sepak bolanya begitu megah dan sebagainya. Juga saya kira memang ini harus menjadi perhatian karena ini juga termasuk wajah terhadap apa tampilan sebagai wajah negara, negara kita.

Kemudian kaitan yang lain, tentu kami tetap berharap kegiatan-kegiatan seperti infrastruktur, Inpres, yang memang sangat masih cukup besar terhadap ketertinggalan kita ya, karena ini, ini salah satu yang menopang terhadap mempercepat terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sebagai contoh, Pak, di daerah saya dulu itu sebelum jalan itu begitu baik seperti sekarang, ya, boleh dikatakan sudah mulai ada peningkatan, dulu kita kalau musim *duren* itu ya paling 1 tahun. Kenapa itu? karena daerah perhuluhan *ndak* juga lancar, ya habis menumpuk di tempat, ya dibuat gula, tapi sekarang hampir sepanjang tahun ada, kenapa? Karena ya mereka sudah lancar, sudah bisa sampai ke ibukota. Itu salah, salah, salah satu indikator terhadap keperluan mempercepat terhadap pembangunan infrastruktur, kemudian hal-hal yang lain.

Nah, jadi saya kira berkaitan ini secara global ya tentu secara detail kami nanti juga akan mengajukan, tentu beberapa hal ya saya terima kasih program-program yang lalu sudah berjalan seperti SDA kemarin, ya sisa lelang, Pak, katanya sudah masuk walaupun itu masih cukup panjang tebing yang harus diselesaikan, karena itu di tengah kota dan Ibu Menteri, *alhamdulillah*, makam kesultanan sudah berjalan. Ya, mudah-mudahan bisa terus berlanjut, karena itu merupakan destinasi wisata religius yang juga situs sejarah ya, karena itu makam itu sudah berkisar lebih kurang hampir 300 tahun sekarang dan secara temurun Kesultanan Pontianak itu dikebumikan di situ.

Saya kira inilah beberapa hal berkait dengan apa yang saya sampaikan dalam rapat kerja pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan terus terang cukup besar peran dari Kementerian PU dan terus terang juga cukup besar juga keterpilihan Anggota di Komisi V ini. Mungkin *ndak* terlalu banyak Pak, ya mungkin salah satu ya program-program yang Bapak sampai kepada masyarakat.

Walaupun sampai saat ini apa yang dikatakan Bu Novita, kami masih tetap ditagih, ternyata setelah Pemilu lebih banyak tagihannya, karena dia merasa "Pak dulu ini *kok* banyak, *kok* sekarang ini, kami sudah membantu ini" ya saya, kita mau jawab apa ini ya, mudah-mudahan dengan apa yang kami sampaikan ini ya tentu juga Pak Menteri merasakan hal itu. Saya kira itu saja.

Terima kasih, saya akhiri.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Selamat siang.

(PERGANTIAN KETUA RAPAT)

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Makasih Pak Syarief.

Pak Willem.

F-PD (WILLEM WANDIK, S.SOS.):

Baik.

Pak Ketua dan Bapak-Ibu Anggota Komisi V, dan juga Pak Menteri, serta Seluruh jajaran yang kami hormati,

Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan beberapa catatan. Pertama Pak Menteri, sebagaimana kita ketahui bersama terkait dengan rencana kerja pemerintah dan kebijakan fiskal tahun 2025 yaitu, tentang

akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, namun pagu indikatif Kementerian PUPR turun 50% dari 2024.

Karena itu kiranya ini menjadi kebutuhan, menjadi perjuangan kita bersama untuk diperjuangkan, karena kami melihat Kementerian PUPR merupakan kebutuhan yang, Kementerian yang, yang berada pada posisi yang biasa tiap tahun *tuh* berada pada posisi penempatan peringkat tertinggi, namun turun sekian persen. Karena itu semoga ini menjadi perjuangan kita bersama dalam pertemuan-pertemuan bersama para Eselon I. Dan yang berikut terkait dengan, di Papua belum lama ini sudah banyak pemekaran provinsi, karena itu juga kiranya menjadi konsen untuk memberikan perhatian terutama dalam hal pemenuhan infrastruktur dasar, baik dalam hal jalan maupun perumahan dan juga air bersih dan selain itu, Pak Menteri, kami menyuarakan lagi Jalan Jayapura–Wamena itu belum maksimal hingga hari ini, karena itu kiranya bisa menjadi perhatian dan juga jalan yang menghubungkan beberapa kabupaten dari Wamena, Tolikara, bahkan Puncak Jaya itu sampai berapa tahun belakangan ini belum ada sentuhan ke sana.

Oleh karena itu, perlu ada perhatian dalam peningkatan ruas jalan ini, karena ini ruas nasional. Karena itu kiranya Pak Menteri dan Dirjen terkait kiranya bisa menjadi perhatian.

Sekian, terima kasih.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Terima kasih, Pak Willem.

Pak Eddy Santana, silakan Pak.

F-GERINDRA (IR. H. EDDY SANTANA PUTRA, M.T.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pimpinan Komisi V sekaligus Pimpinan rapat yang saya hormati,
Beserta teman-teman Anggota,
Menteri PU, Pak Basuki, beserta
Seluruh jajaran yang sama saya hormati,

Yang pertama, maaf, saya ingin menanyakan, Pak, tadi disebut juga oleh Ibu Hanna, Bendungan Tiga Dihaji ini sudah beberapa tahun, *gitu*, *multiyear* malah, ini kapan, Pak, selesainya ini? karena kita sudah mungkin sudah 4 tahun ini ya apakah di 2025 masih kita, kelihatannya masih. Nah, kapan selesainya itu? kita, karena tentu masyarakat, rakyat yang di daerah sana menunggu ini, terutama untuk suplai air ke Sungai Komerling dan ini untuk di untuk pengairan irigasinya *gitu* untuk persawahan, kira ini, ini penting.

Kemudian juga sebetulnya di Sumatera Selatan ada beberapa lokasi terutama di antara Lahat ya, ke Pagar Alam, bisa dibangun bendungan juga, Pak, bendungan. Jadi di sana ada sungai yang jauh di bawah kelihatan seperti jurang, *gitu*, tapi sepanjang sungai itu ada, ada bukit, *gitu* ya, bukit, karena itu daerah pegunungan juga. *Nah*, ini saya kira kalau sekilas saya melihat bisa bangun itu juga.

Ini penting untuk ini untuk apa reservoir daerah Lahat dan sekitarnya *gitu*, Empat Lawang dan sekitarnya juga bisa dibangun apa itu PLTA, jadi pembangkit listrik tenaga air, kemudian yang lain-lain lah termasuk irigasi. Saya kira ini perlu di, disurvei, saya sekilas, Pak, mohon maaf melihat, tapi kalau saya orang sumber daya air jadi kira-kira bisa itu, Pak.

Nah, kemudian jalan tol Pak, nah ini juga jadi pertanyaan dari masyarakat. Ini Palembang–Betung ini kapan, *gitu*, selesainya? saya mendengar ada permasalahan, permasalahannya saya sebutkan saja PT Waskita itu nyerah, Pak, di situ karena *nggak* sanggup lagi ya, apakah betul itu? *Nah*, jadi sekarang diambil alih oleh Hutama Karya atau karena memang di Sumatera tuh penugasan Hutama Karya, tapi dulu berani-beraninya kita ngambil itu kan, ini kan atas jalan tol Palembang–Kayu Agung, Palembang–Betung, itu inisiatornya personal, *gitu*, swasta, dulu ada pengusaha yang kemudian sahamnya diambil Waskita, jadi Waskita suruh jaya itu tolnya nama PT-nya itu, tapi sekarang Waskita nya kewalahan sepertinya itu.

Nah, jadi mohon juga pertanyaan masyarakatnya dijawab bagaimana ini kelanjutannya Palembang–Betung apakah. Saya kira permasalahannya hanya di jembatan, Pak, mungkin jembatan itu memang besar jembatan Musi Lima itu kalau enggak salah, karena menyeberangi ada di Sungai Musi, jadi ya anggarannya tentu cukup besar, *gitu*, tapi tidak tertutup kemungkinan, Pak, Palembang–Betung–Jambi itu harusnya diteruskan *gitu*, dipercepatlah, *gitu*. Kan dari Jambi sudah mulai Jambi–Tempino, Betung–Sungai Lilin, Sungai Lilin–Bayung Lecir, Bayung Lecir–Tempino, Tempino–Jambi. *Nah*, itu juga ada permasalahan lahan dulu, sehingga lambat itu, kalau sudah ditentukan trasenya, tapi pemilik lahan di situ minta pindahkan.

Saya kira di sini juga aneh, Pak, negara itu harusnya kuat *gitu*, kenapa kalah, *gitu*, sama swasta perorangan *gitu*, padahal dia dapatnya dari hutan konsesi dulunya dan berubah dari kebun kelapa sawit ya ambil aja kalau dia *nggak* mau, *gitu*. Saya kira negara harus lebih tegas untuk urusan-urusan seperti ini, jadi sepanjang jalan itu hampir punya, hanya punya satu orang itu. *Nah*, yang dari Betung ke Sungai Lilin Bayung. Rakyatnya marah sekarang, Pak, trase yang dipindahkan dia sudah di taksasi mungkin ya jadi, jadi masalah itu, *loh kok* kami jadi pindah padahal kami sudah siap untuk, untuk dibayarkan *gitu*.

Nah, kemudian tol Prabumulih–Muara Enim, Pak. Prabumulih–Muara Enim, Muara Enim–Lahat, Lahat–Tebing, Tebing–Lubuk Linggau, Lubuk Linggau–Bengkulu, ini juga jadi pertanyaan karena dulu kan kita prioritas, oh ya oke, ke Lintas Timur dulu, *nah*, tapi ini kan sudah harus jalan juga Pak, kasihan juga masyarakat Bengkulu, Lubuk Linggau, *gitu*, rakyat kita di sana,

sedangkan dari Bengkulu sudah dibangun 17 kilo, tapi ini manfaatnya kurang, karena, karena belum sampai ke Lubuk Linggau. Kalau itu sampai ke Lubuk Linggau, saya kira perekonomian di sana lebih cepat. Kasihan juga Bengkulu, Pak, Bengkulu itu dulu seperti terisolir, *nah*, tapi kalau ada jalan tol itu sudah hiduplah Provinsi Bengkulu ini. *Nah*, saya kira ini-ini jadi perhatian kapan dilanjutkan.

Kemudian *exit*-nya Pak, *exit* tol di Prabumulih ini, *nah*, itu mudah-mudahan ada pemikiran Palembang-Prabumulih itu ada *exit* tol sebelum Prabumulih, jadi orang Prabumulih itu tidak balik belakang dulu itu arah Baturaja sekian kilo, 10 kilo kalau tidak salah baru masuk ke tol ya. Saya kira ada *exit* tol di di antara sebelum masuk itu Kota Prabumulih dan itu akan lebih ramai dipakai, *gitu*.

Yang ketiga Inpres Jalan Daerah, Pak. Kita tahu ini kan Inpres itu Instruksi Presiden, nah apakah ini ke depan, ini bagus sekali, Pak, terima kasih, Pak, ini Pak Basuki dan teman-teman ya. Dengan adanya Inpres Jalan Daerah ini yang memang kita turunan dari revisi Undang-Undang Jalan yang kita *review* itu ini manfaatnya besar sekali, karena jalan itu mahal, *gitu* ya, perbaikan-perbaikan bupati enggak sanggup, *gitu*, dengan ada ini mereka juga terbantu *gitu* dan saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya adanya Inpres Jalan Daerah.

APBN sekali lagi untuk kesejahteraan rakyat, rakyat ada di mana-mana, rakyat tidak melihat status jalan, nasional, provinsi, kabupaten/kota *gitu*. Oleh karena itu, ada baiknya ini diteruskan untuk selanjutnya dan kan di sini masih ada, mudah-mudahan Pak Menteri masih, tapi di sini ada Dirjennya, ada ASN, *gitu* kan, ASN yang melanjutkan ini untuk mempertahankan Inpres Jalan Daerah ini.

Yang keempat, pembangunan sekolah, ini Ibu Dirjen juga. Harus ada komitmen, *gitu*, dari kepala daerah, *gitu*. Ibu bangun atau PU bangun 100 misalnya, daerah bangun berapa *gitu*. Satu kabupaten kami bangun SD 10, bupati bangun berapa, harusnya lebih banyak, jangan hanya kita *gitu* di sini. Saya lihat itu bagus sekali, Pak, terima kasih juga, di Padang Selasa itu Pak Basuki tahulah jalan itu-itu SD yang di-*rehab* total itu atas usul saya juga itu, bagus sekali jadinya. Jadi ini yang ini apakah bupati bangun juga, jangan sampai seperti gubernur juga, SMA yang bangun di Palembang itu dua itu dari kita ini Pak, SMA 14, SMA 12, tidak ada yang dibangun oleh gubernur di situ.

Nah, mungkin ada komitmen *gitu* kepala daerah, kami bangun ini ada dua unit, tapi anda harus bangun lebih dari dua, empat misalnya, *nah*, seperti itu. Jadi selesailah masalah kita ini di SMA, SMK. Ini terjadi Pak Menteri mungkin, karena kewenangan SMA, SMK ini ditarik dari bupati, walikota ke gubernur, *nah*, ini dan itu bukan dengan kajian, pertimbangan yang matang, karena hanya untuk politik praktis pada waktu itu saya tahu bahwa di situ banyak pemilih pemula, banyak guru-guru, nah nanti kita ini ceritanya dulu.

Rentang kendali itu terlalu jauh, memang saya bukan Komisi X di sini, tapi ini juga mohon juga kita mengingatkan teman-teman kan bisa juga semua,

bahwa kalau ini berjalan terus, SMA, SMK, pendidikan kita *collapse* 3 tahun lagi urusannya, ini kalau seperti yang terjadi di Sumatera Selatan. Ya, rentang kendali terlalu jauh, kalau bupati, walikota dia pasti datang, Pak, ke SMA, SMK itu, pasti melihat, tapi gubernur terlalu jauh, rentang kendali jauh, enggak tahu dia di lembah-lembah di pegunungan, SMA, ratusan SMA bahkan, ya mungkin di daerah yang luas Jawa Barat, ribuan, apakah bisa dikendalikan oleh seorang gubernur, *gitu*, lebih baik itu diserahkan kembali ke bupati, walikota. Ini konteksnya dengan kita adalah pembangunannya. Jadi Ibu, Bu Dirjen mohon kalau bangun itu diajak juga gubernurnya, berapa kamu bangun, *nah*, kami masuk dua atau 10, kamu bangunnya 20, *gitu, nah*, sehingga selesai masalah pendidikan akan menjadi lebih baik.

Saya kira ini, Pimpinan.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Waalaikumsalam.

Terima kasih, Pak.

Iya silakan Pak, silakan, silakan. Ya, yang mau diserahkan silakan, silakan.

Baik, terima kasih.

Selanjutnya Pak Irwan, silakan.

F-PD (DR.H. IRWAN, S.IP., M.P.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang saya hormati Ketua Komisi V,
Pimpinan Komisi V DPR RI yang saya hormati, saya cintai,
Rekan-rekan Anggota Komisi V yang saya banggakan,
Yang saya hormati Menteri PUPR Republik Indonesia,
Pak Sekjen,
Pak Dirjen, jajaran Direktorat, serta
Seluruh jajaran Kementerian PUPR yang saya banggakan,

Selamat datang juga buat Pak Danis yang punya IKN, akhirnya ketemu lagi Pak Danis, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan.

Pertama-tama, tentu saya menyampaikan selamat kepada Pak Basuki telah ditugaskan Pak Presiden sebagai Kepala Otorita IKN. Tentu kami sebagai masyarakat Kaltim sangat berkepentingan dengan ini dan saya salah satu orang yang sejak awal yang berpendapat bahwa sejak awal harusnya otorita IKN itu ditangani, dipegang oleh kawan-kawan dari Kementerian PUPR dan juga Kementerian ATR/BPN, karena pembangunan infrastruktur dasar IKN berikut penyelesaian masalah hak atas tanah itu menjadi kunci untuk bisa sampai di 2024 ini, sehingga menurut saya, ini kalau bicara percepatan IKN ini adalah kebijakan yang sangat tepat dari Pak Presiden dan mudah-mudahan Pak Basuki bisa menyelesaikan permasalahan lahan dan juga percepatan pembangunan infrastruktur dasar IKN-nya.

Cuma mungkin saya pesan bahwa, memang selama ini seolah-olah kita mengesankan, bahwa masyarakat lokal, masyarakat adat itu seolah-olah selalu bertentangan dengan kebijakan nasional, padahal itu sebenarnya masalahnya adalah konflik lahan, dan saya yakin Pak Basuki bisa, kemudian menyelesaikan masalah konflik lahan ini, karena saya meyakini masyarakat Kaltim khususnya masyarakat sekitar IKN, masyarakat adat itu sangat-sangat mendukung IKN, sehingga mengakui dan melindungi hak-hak komunitas, ini menurut saya hal yang sangat merupakan aspek penting dan ini jangan diabaikan. Itu aja maksud saya, titip saya Pak Basuki dan saya sangat meyakini dan kami siap di belakang Pak Basuki untuk menjalankan IKN ini, termasuk Pak Danis, masih Satgas IKN kan, Pak, ya? Terima kasih, Pak.

Kedua, terkait pagu indikatif tahun anggaran 2025-2029, ada 75 triliun, sementara kebutuhannya 212 triliun. Pimpinan, saya ingin menggaris bawahi terkait ini, maksud saya ini sebenarnya harus disuarakan lebih masif keluar, *gitu loh*, terkait adanya *backlog* antara kebutuhan dengan pagu indikatif ini, karena pertanyaannya prioritas-prioritas kebijakan yang kita bahas ini pasti terganggu, *gitu loh*, program yang bisa dijalankan dengan pagu indikatif seperti ini dari program prioritas ini apa *gitu loh*, kemudian yang tidak bisa dijalankan apa? mungkin yang tidak bisa dijalankan ini sama strategis dan prioritasnya dengan yang hanya bisa dijalankan dengan pagu indikatif yang ada, sehingga saya meminta seluruh kawan-kawan Komisi V juga ini menjadi tugas bersama untuk bisa kemudian diminimalisir ya margin *backlog* antara pagu indikatif dengan usulan kebutuhan anggaran PUPR.

Ketiga, saya sangat berkepentingan Pak Menteri membahas ini, saya sebenarnya *ndak* mengusulkan lagi 2025 itu tugas apa Namanya, Anggota DPR RI berikutnya, tetapi ini PR menurut saya untuk di Kalimantan Timur dan mudah-mudahan ini juga menjadi catatan seluruh kawan-kawan Kementerian PUPR terkait daerah pemilihan saya, Kalimantan Timur.

Pertama, ada banjir tahunan, tiap tahun pasti terjadi dan memakan korban bukan hanya material, tetapi apa yang sudah kita bangun jalan, jembatan, infrastruktur dasar lainnya rusak, belum lagi korban jiwa, rumah masyarakat, mereka puluhan tahun mencari rezeki hancur, banjir tahunan yang terus kita biarkan. Saya sedih *nih*, melihat banjir Kubar, Mahulu, dan pemberitaannya enggak sama, *gitu loh*, dengan kalau ada banjir-banjir di provinsi lain.



Nah, terdapat potensi bendungan Pak Menteri di anak Sungai Boh. Jadi kalau anak sungai ini saya pikir bukan bendungan-bendungan besar ya, tetapi ini mampu mereduksi banjir Kubar, Mahulu ini, dua kabupaten ini. Mahulu ini perbatasan Indonesia–Malaysia, perbatasan paling hulu dari DAS Mahakam yang menjadi kewenangan Kementerian PUPR, ada balai wilayah sungai kita, sehingga kalau kita bisa bangun bendungan di anak Sungai Boh ini, karena sudah masuk juga dalam rencana pengelolaan sumber daya air yang disusun kawan-kawan Kementerian PUPR. Mudah-mudahan kalau kita bisa prioritas ya selama 5 tahun ke depan mudah-mudahan bisa dimasukkan dalam tadi prioritas kebijakan Kementerian PUPR 5 tahun ke depan bisa dibangun bendungan di hulu DAS Mahakam ini, di Hulu Sungai Mahakam ini, itu bisa mereduksi banjir Kubar, Mahulu yang tiap tahun pasti datang.

Kemudian yang kedua, terkait Dapil saya ini. Terima kasih Pak Menteri kita sudah menyelesaikan jalan nasional di Kaltim ini dan masyarakat mengakui, mengapresiasi itu, tetapi masih ada PR kita terhadap lanjutan segmen ini, Pak Dirjen Bina Marga. Dari batas Tenggarong Senoni-Kota Bangun, kemudian dari Kota Bangun sampai Melak Kutai Barat, kemudian ada diskresi Pak Menteri karena ini sebenarnya non-status Tering-Long Bagun, tetapi selama ini kita tangani berapa tahun ini, ini tolong dilanjutkan Pak untuk 5 tahun ke depan, karena poros *line*-nya dari Kalsel ke Paser, Penajam, Paser Utara, Balikpapan, Samarinda sudah mulus, Samarinda, Bontang, Kutim, Berau, ke Kaltara mulus. Nah, segmen yang ke apa Namanya, ke perbatasan ini yang belum tuntas, tetapi saat ini juga sedang ada *multiyear*, tapi saya mohon ini dituntaskan, Pak, terkait segmen yang saya sampaikan tadi Tering-Long Bagun, termasuk juga lanjutan Long Bagun sampai dengan perbatasan Indonesia–Malaysia tembus Kalbar.

Kemudian saya juga titip, Pak, rencana tol Samarinda-Bontang ini dilanjutkan, Pak. Itu juga bisa apa namanya sebagai dukungan infrastruktur terkait adanya IKN, tetapi di sisi lain bisa mengakselerasi pembangunan termasuk pertumbuhan ekonomi di, di Provinsi Kalimantan Timur. Kemarin yang saya tahu *update*-nya baru sampai proses AMDAL-AMDAL lainnya oleh kawan-kawan BPTJ.

Kemudian terkait Dapil yang terakhir Inpres Jalan Daerah tahap dua agar ini, Pak, Pak Menteri. Kemarin saya sudah diskusi juga dengan Pak Menteri, dengan Pak Dirjen juga. Ada dermaga ferry penyeberangan yang nantinya antar provinsi juga, antar kabupaten/kota juga fungsional, tetapi jalan yang 4 kilo meternya itu masih tanah, Pak. Kemarin Pak, Bu Direktur juga sudah ninjau ke sana, mudah-mudahan di tahap dua ini masuk, karena di tahap satunya kelewat, Pak. Kalau enggak ada jalan 4 kilometer ini sayang anggaran Kemenhub ini sudah jadi, bagus sekali dermaga ferry-nya, tetapi enggak fungsional. Saya berharap di Inpres Jalan Daerah tahap 2 ini bisa masuk dan bisa tuntas, termasuk juga akses Pelabuhan Mantaritip yang di Berau itu sudah ditangani juga apa namanya lewat DAK ya, termasuk usulan Inpres Jalan Daerah, mudah-mudahan juga itu bisa. Semuanya ini adalah apa namanya akses ke pusat-pusat apa namanya simpul-simpul transportasi yang strategis, terutama Perhubungan Laut.



Kemudian terkait padat karya, ini penting ya karena menurut saya *sih*, saya merasa sangat bagus ya, kerja keras selama 5 tahun ini dan saya *ndak* ingin ketinggalan janji, *gitu*, Pak. Karena kita sudah mengusulkan ya walaupun saya *ndak* menjadikan itu sebagai *campaign*, tapi menurut saya ini tugas kita bersama untuk mewujudkannya, semua sudah verifikasi usulan padat karya itu ya tinggal tunggu arahan Pimpinan, mudah-mudahan tambahan anggaran 10 triliun ini juga bisa, kemudian menjadi solusi terkait permasalahan pembiayaan padat karya ini.

Semua sudah verifikasi di bawah, artinya enggak ada masalah sebenarnya dari usulan secara teknis juga *clear*, mungkin masalahnya di anggaran ya. Mudah-mudahan ini bisa, karena ini beban kita, enggak ada kesempatan lagi untuk memperjuangkan mewujudkannya ya, yang bisa mewujudkannya ini adalah Pak, Pak Menteri, ya.

Terakhir saya pribadi sebagai wakil masyarakat Kaltim pada periode ini menyampaikan terima kasih, sangat signifikan Pak, selama 4 tahun setengah ini sangat signifikan, puluhan triliun, Pak, selama hampir 5 tahun ini kita bangun jalan, jembatan, bangun infrastruktur sumber daya air kita, bangun terkait Cipta Karya, bangun rehab sekolah, Bangun PISEW dan lain-lainnya ya, termasuk juga perumahan sangat signifikan dan itu sangat-sangat mengakselerasi pembangunan di Kalimantan Timur. Saya menyampaikan terima kasih yang banyak untuk Pak Menteri dan seluruh jajaran, semoga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Mudah-mudahan kita juga apa namanya terus memberikan pengabdian yang terbaik bagi bangsa dan negara.

Mungkin itu, Pimpinan. Saya cuma izin ya, mengambil momentum ini untuk menyampaikan usulan yang 2024 terkait padat karya ini, saya *ndak* usulan 2025 tapi saya mengusulkan kembali semua usulan padat karya yang sudah terverifikasi, mudah-mudahan bisa diperjuangkan dan menjadi apa namanya *legacy* kita bersama untuk seluruh masyarakat, di Kaltim pada khususnya.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Terima kasih, Pak Irwan.

Selanjutnya, oh iya silakan Pak Irwan.

Baik, selanjutnya Pak Tamanuri, siap-siap Bu Sri Wahyuni.

F-NASDEM (DRS. H. TAMANURI, M.M.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang saya hormati Pak Pimpinan beserta Anggota-Anggota Dewan,
Yang saya banggakan Pak Menteri beserta jajaran,

Alhamdulillah syukur kita masih ketemu hari ini dengan kondisi yang agak lain, agak berbeda. Saya jujur aja mengatakan bahwa, enggak berani saya jadi Menteri PU ini, jadi seharusnya rambut Bapak yang putih sudah jadi hitam itu, karena banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi. Ada di antaranya yang sudah lulus tender, tapi tidak bisa dibangun, ada di antaranya 2 tahun sudah beres, enggak bisa diresmikan, *nah*, ini jadi macam-macam kita hadapi. *Alhamdulillah* syukur dengan ilmu-ilmu yang dimiliki oleh Pak Basuki baik ilmu orkestra, baik ilmu *photograph* apa itu fotografi, baik ilmu tenaga dalam ini semua bisa datasi, *alhamdulillah* syukur saya punya teman luar biasa.

Pak Basuki, saya mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan-bantuan yang sudah diberikan kepada Dapil saya. Ada tiga jembatan gantung yang sekarang ini dua akan dibangun, kemudian ditambah lagi jembatan jalan negara, jembatan Wasabi, kemudian yang lain yang lain. Tadinya saya sudah merasa bergembira, kenapa? karena sudah ada jatah-jatah untuk pendamping P3A, tapi dengan sistem yang baru ini, jujur aja mohon maaf, petugas Bapak dari balai sudah ngebantu, bagaimana caranya enggak lulus juga 60 orang hanya lulus 6 orang. Jadi gimana pendampingan P3A nanti karena ada perubahan cara, nah oleh karena itu ini perlu diperhatikan.

Kemudian khusus untuk Pak Bob, ini tolong diperhatikan, Pak. Saya sudah dengar-dengar enggak enak ini, irigasi gantung, Pak. Irigasi gantung yang ada di Rawa Jitu, ini airnya enggak ngalir sampai di ujung situ, jadi jangan sampai kita ini nanti ada hal-hal yang tidak kita inginkan, karena saya sudah dengar hal-hal seperti itu.

Kemudian untuk pembangun abrasi, kanal, dengan menggunakan model apa yang karung plastik yang diisi dengan tanah mungkin saya salah karena saya tidak sampai di situ ilmu saya, itu enggak bertahan lama saya rasa, lain halnya kalau kita bikin bronjong. Kalau ini kan karena deburan ombak deburan ombak itu bisa pecah. Nah, ini tolong dikoreksi kalau memang begitu adanya.

Nah, jadi hal-hal inilah yang perlu saya sampaikan, semoga Pak Basuki terus sebabnya di mana-mana Pak Basuki ini setiap ada kesempatan Gubernur DKI aja ada yang mengusulkan, jadi di mana-mana aja beliau ini di...di...di..., jadi perhatian orang, karena apa? jujur aja saya katakan, saya bersama Pak Basuki bersama dengan Pak Presiden berangkat ke dalam situ justru Pak Basuki, padahal itu Dapil saya, Pak Basuki yang eluh-eluhkan, Tamanuri enggak diomongkan, ini, ini kita bangga punya kawan kita seperti ini.

Sekian, terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Terima kasih, Pak Tamanuri.

Bu Sri Wahyuni, silakan.

F-NASDEM (SRI WAHYUNI, S.SOS.):

Bismillahirrahmanirahim.

Terima kasih, Ketua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yang saya hormati Pak Ketua, beserta
Pimpinan Komisi V yang lain,
Yang saya hormati Pak Menteri, Pak Dirjen, Pak Sekjen, beserta seluruh
jajaran,

Saya langsung saja.

Yang saya hormati, saya sayangi juga rekan-rekan Anggota Komisi V,

Saya terlambat datangnya, tidak mendengar masukan-masukan teman-teman yang lain, tapi saya rasa hampir sama dengan yang saya sampaikan.

Pak Menteri, hari ini judulnya kita rapat evaluasi APBN tahun anggaran 2024, saya masih dan tidak paham, tidak mengerti yang dievaluasi itu yang mana? karena sampai saat ini programnya belum ada yang jalan, terutama di Dapil saya, saya tidak tahu di Dapil yang lain, tapi saya dengar juga di teman-teman yang lain program yang untuk 2024 belum ada yang jalan, seperti itu. Jadi saya enggak paham yang dievaluasi program yang mana, *gitu*.

Terus ada masukan dari TA-TA kami bahwa, sistem yang di lapangan itu sekarang ini lebih sulit atau kata orang Jawa itu *mbulet, gitu. Nah*, itu mempersulit juga pekerjaan di lapangan dan kenapa *sih* harus sistemnya harus diganti-ganti terus, *gitu loh*, yang dulu aja banyak yang merasa kesulitan, apalagi sekarang lebih dipersulit lagi, entah dipersulit atau mungkin mau dipermodern begitu sistemnya saya kurang tahu juga.

Kemudian Pak Menteri, terkait IJD. Program IJD yaitu sudah berpayung hukum, itu juga belum terlaksana, ini khusus di Dapil saya ya, saya tidak tahu tapi saya dengar ada IJD yang sudah, sudah jalan, tetapi kenapa di yang punya saya, Pak Menteri halo, Pak Menteri lihat saya, dengerin-dengerin ya, Pak Menteri tolong ini IJD saya *kok* belum, *gitu loh*, belum ada tanda-tanda. Ini saya sudah bersurat dua kali, Pak Menteri, *kok* enggak didengar, *kok* enggak ada tanggapan, kalau memang tidak ada, tidak bisa ya tolong dijawab *gitu*. Saya sudah sampaikan juga ke staff Pak Menteri barusan tadi, tolong Pak Menteri

disampaikan ini apa WA saya ke Pak Menteri, karena Pak Menteri kan tidak punya WA.

Kemudian untuk program-program semua belum ada Pak Menteri ini, BPS juga berkurang katanya-katanya, *loh* ya, kuotanya berkurang, kan sudah komitmen kita, sudah janji Pak Menteri tidak ada yang dikurangi, tidak berkurang, khususnya BPS *tuh*, ternyata kata anak-anak TA ini infonya kok berkurang lagi, begitu. Kalau Anggota yang jadi lagi mungkin nanti bisa berjuang lagi ke depan, tetapi kami-kami yang tidak jadi ini kan harus berjuangya sekarang, Pak, karena kami kan juga sudah berjanji di mana namanya di Dapil, di masyarakat, kepala desa, dan lain-lain.

Nah, itu saya mohon penjelasan kepada Pak Menteri kenapa *kok* sampai, sampai saat ini belum ada satupun yang jalan program-program yang harusnya sekarang ini sudah dikerjakan.

Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon perhatiannya Pak Menteri untuk yang saya sampaikan ini dan kalau bisa dijelaskan di sampaikan sekarang penjelasannya apa kalau tidak bisa tertulis tapi tertulis itu nanti saya yang lupa ini baca. Saya rasa itu.

Terima kasih Pak Ketua, Pak Menteri, seluruh jajaran yang bisa saya sampaikan.

Wassalamualaikum warahmatullah warakatuh.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Baik, terima kasih Bu Sri Wahyuni.

Sekarang dari meja Pimpinan, Pak Roberth duluan.
Pak Ridwan, silakan Pak Ridwan.

F-PG (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI):

Terima kasih, Pak Ketua.

Yang saya hormati Pak Ketua,
Pak Roberth,
Teman-teman Komisi V,
Pak Menteri tentu dengan seluruh jajarannya,

Saya hanya mau bicara sama Bu Dirjen Cipta Karya dulu ini, mungkin kita perlu samakan pandangan, Bu Dirjen, ini tentang di hadapan Pak Menteri ya, tentang SMP Negeri 4 Raha yang baru-baru Pak Menteri juga dengan Presiden berkunjung ke sana.

SMP Negeri 4 Raha itu sebenarnya lokasinya memang sempit, ada sejumlah bangunan memang yang masih kuat, tetapi ada sejumlah bangunan

yang sudah sangat parah di situ. Kenapa? karena kapan dibongkar yang parah ini, ini akan mengurangi ruang kelas, tidak ada sama sekali di situ. *Nah*, oleh karena itu, saya dengan kepala balai Ibu di sana dengan juga Satkernya, kita turun lapangan kita melihat sebenarnya adalah pantas kalau itu dibangun, membongkar yang sudah yang sudah apa namanya, gunung-gunung yang sudah rapuh, kemudian tinggal satu, dua yang masih kuat kalau dipertahankan juga masih bisa. *Nah*, itu kira-kira harapan kami mungkin bisa jadi perhatian sama Bu Dirjen.

Ya, jadi bisa, tadi kalau Ibu Dirjen menyampaikan, bahwa masih utuh bangunannya, yang masih utuh bangun cuma satu sampai dua biji, mungkin, tapi yang lainnya udah parah sekali, lalu sempit sekali, memuat apa namanya, daya tampung sekolah itu sudah tidak efektif lagi, karena dia berada di tengah-tengah kota, Bu, dan secara kebetulan di anggaran tahun 2024 ini kan juga sudah masuk, Bu, di situ mungkin barangkali bisa menjadi perhatian.

Yang kemudian yang lainnya melalui Dirjen Bina Marga tentang IJD itu, dulu pernah kita usulkan itu di jalan di apa di daerah Kabupaten Buton Utara yang berhubungan langsung dengan Kabupaten Buton. Itu jalan provinsi aduh-aduh hancur sekali, sama sekali hancur di situ, Pak, itu Pak Dirjen, jadi-jadi itu. Yang... yang kedua itu adalah di... di Kabupaten Konawe Selatan, itu di Kabupaten Konawe Selatan dengan tembus di Kabupaten Kolaka Timur, ya itu tembusan juga di dekat Bendungan Ladongi itu di situ, itu juga itu hancur sama sekali jalan itu juga jalan provinsi itu, Pak. Mungkin dari pemerintah provinsi juga sudah mengusulkan kepada Pak Menteri mungkin itu.

Kemudian berikutnya dari Dirjen Sumber Daya Air. Terima kasih *nih*, Pak ya, terutama kepada Pak Menteri karena di sana sudah ada dua bendungan yang sudah diresmikan oleh Presiden, juga hadir sendiri Pak Menteri di situ dengan Pak Dirjen dan kalau saya tidak salah dalam waktu dekat ini juga akan dibangun apa ditenderkan persoalan Pelosika yang mudah-mudahan itu bisa berjalan lancar semuanya.

Itu ada beberapa yang nantinya barangkali kepala balainya saja yang bersurat kepada Pak Dirjen, Pak Dirjen Sumber Daya Air barangkali tentang ada Sungai Konaweha di situ yang sudah menelan korban rumah 43 buah rumah di situ yang sudah dibawa oleh banjir akibat apa namanya abrasi ya yang ada di situ, tapi barangkali sebaiknya nanti Pak Kepala Balainya saja langsung yang berkomunikasi langsung kepada Pak Dirjen.

Kemudian Stadion Dayung yang ada di Kabupaten Muna yang sekarang ini sudah dianggarkan 19 miliar itu dari penata laut gelombangnya, talut penahan gelombangnya di situ sudah ada, masih ada kurang-kurang lebih kalau saya tidak salah masih, kan total panjang itu 100 apa 100...100 sama dengan 1,2 1,3 mungkin sekarang kurang lebih 35 miliar lagi anggaran dibutuhkan di situ untuk lanjutan tahun 2025 ini. Itu Stadion Dayung dengan menghambat jalanan yang ada di depan masjid apa masjid Ibukota Kabupaten Muna itu yang ada.

Selanjutnya barangkali nanti yang lain di surati resmi dari kepala balainya, karena saya lihat Pak Menteri ini sudah lelah ini, sudah dari pagi sampai jam sekarang sudah jam 2 *nih*. Barangkali dari saya cukup itu saja, Pak.

Terima kasih, Pak Menteri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Terima kasih, Pak Ridwan.
Silakan Pak Roberth.

F-NASDEM (ROBERTH ROUW/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI):

Terima kasih.

Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi V yang saya hormati,
Saudara Menteri PUPR dan Sekjen, beserta
Seluruh jajaran yang saya hormati dan saya banggakan,

Saudara Menteri, sesuai nomenklatur kita hari ini yaitu evaluasi APBN 2024 dan pembicaraan pendahuluan APBN tahun 2025. Kita bicara 2024, evaluasi 2024, saya sangat konsen tentang evaluasi ini dulu, Saudara Menteri. Kita bicara evaluasi maka setelah kita selesai evaluasi, maka ada keputusan yang akan nanti tertera di dalam pendapat akhir, di dalam kesimpulan rapat kita pada siang hari ini. Jika itu belum ada maka saya kira harus ada satu rapat lanjutan untuk bisa kita melakukan satu kesepakatan dulu untuk selanjutnya kita masuk ke 2025.

Yang pertama, saya kira sudah banyak teman-teman menyampaikan tentang kegiatan padat karya yang sudah kami putuskan bersama dengan Saudara Menteri dan seluruh jajaran dan hasil evaluasi hari ini saya mau sampaikan bahwa, semua yang kita sepakati bersama Saudara Menteri belum berjalan, Saudara Menteri.

Di kesempatan yang baik ini, saya minta kepada Saudara Menteri untuk bisa lebih tegas lagi bersama kepada saudara-saudara saya, Dirjen-Dirjen yang menjalankan program-program ini. Kenapa saya harus minta demikian, Saudara Menteri? karena banyak sekali syarat-syarat yang dibuat ini maka hampir semua program-program kita yang sudah kita sepakati itu belum berjalan, Saudara Menteri, belum berjalan.

Saya berikan contoh, beberapa contoh, Saudara Menteri ya, kesepakatan kita tentang BSPS terakhir itu sudah kita sepakati, ada anggaran sisa sekitar 700-an, tujuh setengah, 700-an ya miliar itu akan semua di plotkan ke BSPS, kami sepakat, tetapi itu pun belum ada kelihatan penambahan itu dan sampai saat ini belum ada tindak lanjut tentang SK verifikasi. Jadi belum

sampai saat ini tidak ada verifikasi di tempat saya tentang program-program BPS.

Yang berikut ini tentang program-program sanitasi ya, sanitase LPK dan Sanimas. Ibu Dirjen, kemarin saya lihat Ibu Dirjen bersama Presiden, saya kira Ibu Dirjen sudah jadi menteri karena yang bicara sama Presiden, Ibu Dirjen terus di lapangan, Pak Menteri di belakang-belakang, ternyata Pak Menteri diangkat jadi kepala IKN ya. Jadi, mohon, Bu Dirjen, agar ketentuan-ketentuan yang mungkin memberatkan kita ini, apalagi di daerah saya, daerah saya itu kalau ketentuan di dalam 1 hektar itu harus ada 25 sampai 7 sampai 150 jiwa, ini susah, apalagi daerah pegunungan ya untuk LPK ini, ini tidak mungkin dilakukan. Kalau itu dilakuk..., disyaratkan, maka tidak mungkin masyarakat saya di daerah pegunungan itu mendapat program ini, sedangkan program ini diberikan untuk seluruh rakyat Republik Indonesia, tolong, Bu, ya.

Jadi agar ketentuan-ketentuan seperti ini tolong juga diperhatikan agar tidak disamakan seluruhnya ya, karena ada daerah yang memang hampir bisa semuanya diberlakukan, tetapi kami di daerah kami itu masih banyak daerah yang, ya saya kira kalau bicara Papua, Saudara saya, Pak Menteri, ini adalah yang lebih tahu banyak sebenarnya di daerah saya. Jadi, Ibu Dirjen, mohon kalau ini bisa saya mohon untuk bisa minta pendapat dulu kepada Saudara Menteri agar Bapak Menteri ini bisa memberikan satu atensi khusus untuk penyelesaian masalah kami yang ada di Papua. Kalau tidak kami tidak mungkin bisa menyerap program-program yang diberikan, *nah*, itu.

Yang paling utama lagi masalah keadilan di dalam paket anggarannya, karena kalau kita bicara anggaran itu harus berbasis kepada tingkat kemahalan. Kalau tingkat kemahalan di daerah kami ya, saya kira pemerintah tahu benar itu, karena pemerintah yang menentukan tingkat kemahalan di daerah republik ini, maka kami itu di daerah pegunungan itu hampir 350-an perbedaan tingkat kemahalan dengan daerah lain. Jadi ini untuk Saudara Dirjen ya Cipta Karya.

Yang berikut program-program PISEW Ini masih juga diperlukan lampiran surat minat kesediaan kepala daerah dan kepala desa. Kalau di nomenklturnya memakai dan berarti dua instansi, dua ini yang harus-harus berikan. Kalau atau berarti kepala daerah atau kepala desa, tapi kalau pakai dan berarti harus Bersama. Mohon kepada Dirjen yang membawahi PISEW ini untuk bisa nomenklatur ini saya minta supaya diubah, tidak memakai minat kesediaan kepala daerah dan kepala desa, cukup satu, karena kami ini pekerja politik, bupati sama, banyak juga bupati yang masih berbeda politik dengan kami, itu masih tidak menerima, tetapi rakyat melalui kepala desa itu sangat membutuhkan itu ya kan. Jadi mungkin saya kira bisa juga melalui kepala desa, karena merekalah penerima langsung yang menikmati program-program ini. Jadi itu yang kedua.

Yang berikut, saya minta lagi kepada semua Dirjen untuk bisa SK tahap 1, tahap 2 ini, sekarang tahap 2 sudah mulai keluar, kalau nanti belum juga program-program kami terakomodir, saya minta supaya ada SK tahap 3 untuk bisa mengakomodir. Setelah kita rapat ini karena ini untuk evaluasi, saya

mohon kepada Saudara Menteri untuk bisa memperhatikan hasil evaluasi kita ini, untuk bisa menampung semua aspirasi yang kita sampaikan. Kenapa demikian Saudara Menteri? saya melihat bahwa, ada kegiatan-kegiatan kami yang memang dikunci kemarin ini untuk diberikan kepada khusus Dapil ya.

Kalau mungkin teman-teman yang lain ini tidak menyangdang penanggung jawab besar, kalau saya sebagai ketua, wakil ketua komisi, tetapi saya sebagai ketua fraksi, saya punya tanggung jawab besar terhadap pemenangan di daerah dan kepada anggota fraksi saya, maka banyak juga program yang saya berikan kepada itu untuk mendukung anggota saya kembali dan sudah jelas ada daerah yang kemarin tidak menghasilkan kursi dengan program-program yang saya berikan itu hasilnya ada dan sekarang itu belum jalan Saudara Menteri, maka saya minta untuk program yang sudah saya berikan itu bisa berjalan karena ada beberapa daerah yang saya berikan itu kemarin sudah mendapat hasil baik, tetapi komplainnya, bahwa program itu belum berjalan, ya ini tanggung jawab moral, moral yang sangat tinggi kami apalagi partai ya yang menugaskan kami di sini, itu sangat besar. Jadi mohon perhatian khusus dari Saudara Menteri. Saya kira teman-teman semua hampir juga sama seperti itu. Jadi sekali lagi saya mohon ini menjadi perhatian penting, ya.

Yang berikut, Saudara Menteri, saya juga melihat bahwa, tadi sudah disinggung oleh Bu Sri, bagaimana dengan teman-teman yang tidak terpilih, ini pun mohon menjadi perhatian penting, karena teman-teman ini juga sudah memberikan janji kepada masyarakat di Dapilnya. Kalau sampai ini juga tidak bisa terlaksana, bagaimana tanggung jawab mereka di daerah itu dilihat sama masyarakat seperti apa. Jadi jangan karena teman-teman ini tidak terpilih, terus program-programnya tidak jalan, saya mohon supaya program-programnya semua, kita semua yang ada di sini bisa berjalan baik, ya kita keluar di sini Saudara Menteri, kita keluar dengan semua hati gembira karena kita bisa bekerja sama baik dengan mitra Saudara Menteri dan seluruh jajaran untuk menyelesaikan program-program di 2024, itu evaluasi 2024.

Saya masuk ke 2025, kita masuk di, kita bicara pembicaraan pendahuluan. *Nah*, ini saya sangat senang karena kita masuk ke 2025 dengan saya melihat hampir anggaran kita cuman separuh yang baru, yang lalu 140-an, ini sekarang tinggal 70-an, hampir berkurang 49% dari anggaran lalu. Saya mengerti betul bahwa, ada *space* yang besar diberikan kesempatan untuk nanti program pemerintah baru dengan Presiden baru, tetapi di sini dengan anggaran yang ada, saya juga ingin menyampaikan bahwa, tolong diperhatikan, bahwa program atau janji-janji Presiden itu kan sudah selesai, 2025 mungkin bisa mari Saudara Menteri dan jajaran berikan kesempatan kepada kami Anggota Dewan ini untuk bisa lebih banyak, lebih banyak program-program kami yang bisa ditampung di sana. Saya kira teman-teman sudah selesai, kami masih ada yang terpilih ini masih jalan. Jadi bagaimana ke depan di dalam anggaran 2025 ini harus tertampung program-program dari Anggota ini lebih banyak di situ ya kan, karena menurut saya seluruh kegiatan pemerintah Jokowi, semuanya kami dukung penuh selama hampir 4 tahun lebih, Pak Menteri. Kami dukung tanpa syarat, sampai hak konstitusi kita, kami berikan sepenuhnya tentang anggaran ini kepada Presiden dan jajaran.

Maka terakhir ini, saya minta untuk tolong berikan pula apresiasi kepada kami yang sudah memberikan semua mendukung penuh pemerintah ini, agar betul-betul nanti teman-teman yang tidak terpilih pun nanti punya *legacy* di daerahnya bahwa, ada program-program yang dibawa ke daerahnya, ada nyata di daerahnya, dan kami juga yang mungkin yang ada terpilih-terpilih ini mungkin juga besok taruhlah tidak ada di komisi ini, mungkin pindahkan ditugaskan oleh partai di komisi lain, tapi ada *legacy*-nya di dalam pembangunan di komisi ditahun 2025 ke depan.

Maka itu saya minta lagi tolong diperhatikan baik, agar semua program-program yang nanti diusulkan oleh teman-teman itu bisa dapat tertampung dengan baik, ada *space* yang baik untuk itu ya dan saya sangat konsen juga terhadap Inpres Jalan Daerah ini Saudara Menteri, karena yang kemarin terus terang turun kami tidak dikoordinasi, saya mohon kalau nanti yang tahap 2 ini turun kami minta dikoordinasi baik, agar apa yang sudah kami janjikan kemarin itu ada beberapa yang belum terakomodir itu bisa terakomodir semuanya dengan baik, karena Inpres Jalan Daerah ini memang betul-betul sangat bermanfaat.

Saya kira kita semua yang ada di sini yang sudah merevisi undang-undang jalan itulah *legacy* kita yang telah kita tinggalkan untuk daerah-daerah yang kita wakili semuanya. Jadi ini untuk bisa betul-betul kita diberi kesempatan untuk berbuat ke daerah kami ya apalagi teman-teman yang nanti sudah tidak bersama kami di sini itu ya.

Yang berikut, Pak Ketua, apa yang saya sampaikan tadi, saya mohon ini jadi perhatian kita agar kita bicara 2025 yaitu tolak ukurnya ada di evaluasi 2024, kalau memang itu belum ada kesepakatan Ketua, mohon maaf, Pak Menteri dan seluruh jajaran kami harus mengambil sikap yang jelas terhadap ini ya.

Saya sebagai Pimpinan, salah satu Pimpinan di sini yang akan nanti tanda tangan APBN 2025 dengan sangat, dengan sangat berat kalau evaluasi 2024 ini tidak selesai dengan baik, saya tidak akan tanda tangan, saya sampaikan dengan saat ini, karena saya ingin untuk bisa menyelesaikan tugas saya di Komisi V ini dengan baik, yaitu tergambar di dalam APBN 2024 yang sudah kami janjikan ke daerah seluruh Dapil saya dan terakomodirnya nanti di komisi, di anggaran 2025 ini. Itu yang ingin saya sampaikan.

Sekali lagi mohon maaf Pak Ketua, Saudara Menteri, saya harus sampaikan jauh-jauh hari di depan untuk bisa kita semua bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh rakyat kepada kita.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya kembali kepada Pimpinan.



KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Terima kasih, Pak Roberth.

Selesai sudah, oh Pak Tubagus, silakan Pak Tubagus.
Dari Anggota masih ada satu yang kelewat.

F-PG (H. TUBAGUS HAERUL JAMAN, S.E.):

Baik.

Terima kasih, Ketua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang kami hormati Ketua Pimpinan, beserta
Teman-teman Komisi V, dan tentunya
Yang kami hormati Pak Menteri beserta seluruh jajaran, dan
Hadirin yang berbahagia,

Hari ini kita melihat, mengevaluasi pelaksanaan tahun 2024 dan tentunya anggaran tahun 2025. Kami melihat dan membaca apa yang disampaikan oleh Pak Menteri terkait adanya keganjilan dari anggaran tahun 2025 yaitu hanya 75 triliun. Mungkin teman-teman dikomisi juga ini cukup luar biasa *gitu* kan, di mana tahun 2024 Kementerian PUPR mendapat alokasi 157, kemudian tahun 2025, 70...75 dan cukup drastis turunnya hampir 85, 82 triliun. *Nah*, ini tentu menjadi pertanyaan kami, mudah-mudahan Pak Menteri bisa menyampaikan, menjelaskan kenapa kementerian yang cukup strategis untuk infrastruktur pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia, tentu anggarannya cukup menurun drastis dan kemudian apakah dari anggaran yang tidak, tidak teralokasi kepada Kementerian PUPR ini untuk IKN dan untuk yang lainnya. Kami mohon penjelasan.

Dan kemudian, Pak Menteri, tentu apa yang menjadikan harapan teman-teman di Komisi V ini tadi juga teman-teman sudah menyampaikan terkait padat karya. Kami berharap padat karya tentu untuk tahun 2024 apa yang telah disampaikan Pak Menteri, tentunya mudah-mudahan ini dapat terealisasi sama seperti tahun 2023. Karena apa yang menjadikan Pak Menteri telah sampaikan kepada kami beberapa waktu yang lalu dan tentu kami pasti teman-teman juga di Komisi V ketika berkampanye membutuhkan suara-suara dan kemudian juga menjanjikan juga kami kepada warga masyarakat bahwa, program ini akan terealisasi dan akan dibangun tahun 2024. Dan kami melihat suara kami ini ketika ada program-program padat karya kemudian di titik-titik wilayah tertentu dan kemudian ada program Inpres cukup luar biasa, suara kami di sana ada, dan *alhamdulillah* tentunya kami terpilih kembali dan kami juga menyampaikan terima kasih kepada Pak Menteri beserta seluruh jajaran, di mana ketika kami terpilih kembali kemarin, ini kontribusi dari program-program tersebut cukup dapat dirasakan.

Mudah-mudahan harapan kami ini, ini bisa dapat tentunya terpenuhi, dan kemudian Pak Menteri ada tadi kami telah menyampaikan juga beberapa usulan dari Dapil kami dari para kepala daerah sudah disampaikan Pak Menteri. Mudah-mudahan juga ini dapat dengan anggaran terbatas minimal kami berharap dari seluruh teman-teman di Komisi V ini dari usulan itu ada satu atau dua dapat terealisasi, sehingga tentunya ketika ada aspirasi di Dapil kami dan kemudian aspirasi itu dapat terealisasi ini menjadi kebanggaan kami dan menjadi suatu kebanggaan masyarakat yang membutuhkan.

Kemudian juga ada sedikit yang perlu kami sampaikan terkait Kota Serang. Terkait Kota Serang, pemerintah Kota Serang menyampaikan juga kepada kami yaitu kebutuhan berbagai hal tentu terkait IPLT. Bu Diana, Kota Serang masih membutuhkan IPLT, kemudian juga TPST, TPST dibutuhkan karena untuk persampahan ini dan pemerintah Kota Serang untuk *sharing* anggarannya pun *Insyallah* juga mereka akan menyiapkan dan kemudian di wilayah Kota Serang ada wisata religi yaitu Banten Lama yaitu, Kesultanan Banten.

Kami juga berharap agar ada penataan-penataan kawasan Banten lama, sehingga wisata religi ini kami melihat hampir setiap hari yang berkunjung, berziarah ke sana cukup luar biasa, sehingga kita adanya penataan di wilayah tersebut. Mudah-mudahan dengan ada kunjungan wisata religi ini mereka ini bisa nyaman, kemudian wilayah kita bisa tertata baik juga.

Kemudian juga di Dapil kami juga masih membutuhkan untuk kawasan penata-penataan kawasan kumuh *gitu* kan. Kemudian juga terkait peningkatan sarana-prasarana pendidikan juga, tentunya di Dapil kami masih membutuhkan *rehab* sekolah, madrasah, dan sebagainya. Mudah-mudahan ini bisa dapat di apa namanya, juga terus walaupun bertahap bisa dapat di *rehab*, kemudian juga bisa dapat dirasakan oleh masyarakat kita. Dan kemudian Pak Menteri, kami berharap dari awal kami masuk di Komisi V ada usulan *flyover* di wilayah Unsur, sampai saat ini belum, di Kota Serang ya, belum dapat terealisasi. Mudah-mudahan ke depan ini bisa dapat direalisasi. Menurut di balai *flyover* itu hanya 30 miliaran, karena untuk meleraikan kemacetan di wilayah Kota Serang antara wilayah Kasemen dan Serang ini melintas rel kereta api, apakah *underpass*, apakah *flyover*, itu silakan dan ini bentangnya juga tidak panjang *flyover*-nya juga tidak kecil, tidak besar-besar juga, *gitu*. Mudah-mudahan ini ketika ada ini, ini permasalahan di wilayah kami di Kota Serang ini terkait kemacetan dapat teleraikan.

Kemudian terkait kita melihat di Banten kemarin waktu yang lalu ada tsunami, kemudian juga kami berharap Pak Menteri agar terus untuk dapat memperhatikan terkait apa terkait pengamanan untuk warga masyarakat di wilayah-wilayah pantai Selat Sunda dan kami koordinasi dengan Ka. balai masih membutuhkan pengamanan pantai untuk wilayah Selat Sunda, penahan gelombang dan sebagainya.

Mudah-mudahan ini walaupun anggarannya ter, apa bertahap ini bisa dapat ada tahapan-tahapan pembangunannya, sehingga apa yang dicemaskan oleh warga masyarakat di sekitar pantai di sana ketika ada

gelombang tinggi, ketika ada hal-hal yang gempa dan sebagainya, ini meminimalisir agar tidak ada terjadi juga apa namanya korban-korban berikutnya, karena kita melihat Banten Selatan di daerah Selat Sunda Selatan ini kita cukup apa namanya, rentan gempanya, *gitu* kan. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian juga apa namanya oleh Pak Menteri.

Kemudian berikutnya, kejadian di Kota Serang, Kabupaten Serang juga beberapa waktu yang lalu menjadi ada banjir besar yang cukup signifikan, sehingga warga masyarakat banyak korban juga, kami yang dialiri dari sungai Cibanten.

Nah, kami berharap ini anggaran untuk pengendalian sungai Cibanten ini setiap tahun bisa dapat teranggarkan, sehingga apa yang masih dibutuhkan dan dibangun bisa dapat diperbaiki, sehingga ketika ada tadi banjir dan sebagainya, tidak ada lagi korban-korban di wilayah sungai itu atau di wilayah yang kita bisa dapat meminimalisir itu.

Kemudian juga ada sedikit di Kota Serang, di Kota Serang itu ada Pelabuhan Karangantu. Kita melihat juga berharap ada pengurukan alur sungai untuk Pelabuhan Karangantu.

Mungkin itu saja Pak Menteri hal-hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan tentu harapan-harapan kami, harapan-harapan seluruh Anggota di Komisi V ini bisa dapat terealisasi oleh kebijakan Pak Menteri.

Terima kasih.

*Billahi taufik walhidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Terima kasih, Pak Tubagus.

Selesai sudah dari meja Anggota dan terakhir.

Pertama saya ingin sampaikan karena ini sifatnya pembicaraan awal nanti Pak Menteri jawab singkat saja, Pak, nanti di jawab tertulis *toh*, kan yang penting kan usulan ini bisa ditanggapi, kan itu yang penting ya dan saya berharap kita bisa dapat cepat selesai ya. Sekarang sudah jam 13.45 dan pada belum makan, kasihan juga ini ya pasti sudah lapar, jadi tidak diperpanjang dengan interupsi-interupsi lagi bukan saya membatasi. Nanti kalau masih ada usulan yang merasa kurang nanti tinggal disampaikan di rapat nanti setelah nota keuangan pemerintah kita akan rapat dengan masing-masing Eselon I, jadi masih ada kesempatan, Pak.

Ini bukanlah hari terakhir kita membahas APBN 2025. Saya karena Ketua ini juga punya Dapil, Pak, jadi saya juga perlu menyampaikan beberapa hal terkait dengan daerah pemilihan Pak Menteri, apalagi ada rencana mau

maju gubernur, Pak, jadi mana Pak Boy tadi, oh Pak Boy sudah cabut ya, ya cabut dia, dia lagi nanya ketua umumnya partainya boleh kita pakai *ndak*.

Jadi, saya yang pertama Pak Menteri terkait dengan bidang sumber daya air yang pertama ya di program 2025 mulai dari bendungan danau, kemudian irigasi rawa, air tanah, air baku, sampai ke pengendali daya arus air, saya tidak melihat Kalimantan Barat di sini, Pak Menteri. Jadi di seluruh program ini kosong, Pak, ada semua *nih*, Pak, mohon izin Pak Menteri nanti ini bisa di menjadi apa nama perhatian ya. Saya akan tentu sampaikan juga usulan-usulan dari kami setelah melakukan koordinasi dengan para kepala balai, Pak. Saya kalau mengusulkan biasanya jarang kali menyampaikan di rapat pertama, karena saya lebih senang berkoordinasi dulu dengan balai, karena tidak mungkin saya ngusulkan yang di balai belum ada studinya, Pak, ada kadang-kadang ada kendala kita mau usulkan tapi studinya belum dilakukan oleh teman-teman di balai kasihan juga kita.

Oleh karenanya, saya biasanya melakukan diskusi dulu dengan teman-teman di balai terkait, dengan skala prioritas. Kalau keinginan pasti banyak, Pak, dan tentu tidak mungkin dalam satu tahun anggaran itu bisa selesai. Oleh karenanya baik di soal bendungan danau. Bendungan ini contoh Pak, di Kalimantan Barat tuh ada namanya Bendungan Merowi dulu, Pak. Ya ini potensinya ada 1.600 sampai 1.700, Pak, hamparannya yang bisa digunakan untuk tanaman padi, Pak. Dulu ini ditangani oleh provinsi, ada jalan Inpres Jalan Daerah menuju ke situ sampai mentok di Bendungan Merowi, Pak. Saya akhirnya saya melihat yang mana *sih* Bendungan Merowi yang selama ini dibicarakan.

Lokasinya cukup bagus, Pak, potensinya bagus, aliran sungainya juga sangat stabil airnya, hanya memang ya, karena ini APBD provinsi dulu dan tidak mungkin secara teknis tidak semampu kita dari pusat sini hingga bendungan ini bocor, Pak, sekarang, sudah bocor sebocor-bocornya lah, sehingga permukaan air di bendungan dengan di buah bendungan sudah sama, Pak, ya, dan sayang sekali ini dalam kaitan ketahanan pangan, ini saya rasa bisa menjadi perhatian.

Saya sudah diskusi dengan kepala balai sana, Pak, sumber daya air, Mas Pram, untuk bisa melihat ke sana bagaimana ini bisa kita ambil alih dari pusat. Karena kalau nunggu provinsi sepertinya entah kapan ini baru bisa di tangani dalam konteks ketahanan pangan.

Kemudian di irigasi dan di rawa ini juga saya lihat Kalimantan Barat juga tidak mendapatkan prioritas, Pak, ya. Saya rasa kalau salah satunya Merowi ini bisa diperhatikan dengan sendirinya juga nanti akan tertangani irigasi di sini.

Di air tanah dan air baku ini juga Pak Menteri di Kalimantan Barat ini seperti yang saya sampaikan, ini provinsi yang sekarang sangat masif tambang dan perkebunan, Pak, sehingga sumber-sumber air yang tadinya bisa diambil oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari sudah tidak cukup, banyak lagi yang bisa di gunakan secara langsung. Oleh karenanya, saya rasa penguatan

air baku di Kalimantan Barat ini pun, salah satu contoh dulu kita pernah mau ada rencana bangun bendungan di Melawi Pak, Sungai Melawi yang mengakibatkan banjir dan seterusnya, ternyata setelah dicek kemarin debit airnya sangat besar ya, tapi saya tidak tahu, Pak, apakah kelanjutan dari bendungan ini sampai di mana. Tentu kita berharap kelanjutan Bendungan Sungai Melawi ini tetap diteruskan.

Dan kemudian untuk air tanah, kami juga berharap, Pak, karena sudah terbatas sekali sumber-sumber air yang bisa dijadikan untuk air bersih bagi masyarakat. Untuk sumber borya bisa kita perbanyak, Pak, di berbagai titik, karena perkebunan sawit yang masif di sana, investasi begitu masif pasti memberi manfaat kepada negara, tetapi juga ada dampak kepada masyarakat. Tentu negara harus hadir di sana, sehingga solusinya, Pak, dengan daerah-daerah yang masif perkebunan sawit dan pertambangan tidak ada cara lain Pak, hanya mengandalkan sumur bor kita dan sangat sedikit sekali sumber-sumber air yang masih baik ya dalam artian kita menggunakan gravitasi yang bisa kita manfaatkan. Jadi sumur bor ini salah satu solusi yang untuk bisa kita kerjakan untuk memberi jalan keluar bagi masyarakat untuk bisa mengakses air.

Kemudian pengendali daya rusak air, Pak, juga Kalimantan ini daerahnya pantai, Pak, sangat panjang pantainya dan juga beberapa wilayah bahkan terjadi pengerusan. Kalau kita dari Pontianak menuju ke Kijing, Pak, dulu Pak Menteri, kita pernah jalan darat bersama Presiden waktu ke Singkawang, Bapak bisa lihat itu beberapa ruas jalan itu sudah pindah Pak, ratusan meter ke darat, sudah dan saya lihat ada beberapa titik juga masih perlu dilakukan penguatan, sehingga badan jalan yang ada sekarang ya bisa di, tetap digunakan, sembari tentu kita menunggu untuk jalan tol dari Pontianak menuju ke Kijing yang juga kita bahas dengan Pak Presiden bersama Pak Menteri tempo hari.

Di sini saya juga lihat, demikian juga sungai-sungai, Pak, yang ada di Kalimantan Barat ini sungainya besar-besar ya dan pantainya juga banyak yang terjadi longsor dan seterusnya. Contoh seperti Sintang yang dulu kita ada *geobag*, *geotech* yang kita pasang dulu, Pak, dan sekarang sudah ada pekerjaan di sana, tetapi memang belum memadai, Pak Menteri. Saya pikir ini tetap diteruskan pengaman pantai yang ada di Sintang, kemudian di apa di Nanga Pinoh itu Kabupaten Melawi dan yang sekarang sekarang juga ada kegiatan di Kabupaten Kapuas Hulu terkait pengamanan Jembatan Kapuas dan satu lagi jembatan yang sekarang sedang dikerjakan di Kapus Hulu.

Kemudian saya pindah ke Bina Marga, Pak.

Di jalan paralel, saya juga lihat ya, Pak, ya, di Bina Marga ini jalan paralel Kalimantan Barat ke Kaltim ini, saya pikir kalau boleh kita teruskan, Pak, ya, sehingga jalan ini nanti bermanfaat dalam konteks juga masyarakat Kalimantan Barat bisa jauh lebih dekat Pak mengakses IKN kalau melalui lintas utara ini, ketimbang dari lintas tengah atau lintas selatan, sehingga contoh, misalnya ini kan masih ada ruas yang sama sekali belum dibuka, *nih*, Pak Dirjen. *Nah*, dulu kan kita menggunakan TNI untuk membuka ruas ini ya, saya pikir ini program baik, Pak, kita lanjutkan lagi, karena melewati Taman Nasional ya, Betung

Kerihun ini ya, biarlah nanti anggaran dari kita, mau diteruskan TNI yang menangani pun kita serahkan sepenuhnya kepada kebijakan kementerian untuk menangani, supaya ini bisa tanpa hambatan. Karena ini kawasan hutan lindung, saya setuju Pak, kita serahkan saja kepada TNI untuk membukanya, sehingga aksesnya bisa ketemu sudah antara Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Kemudian jalan tol tadi saya yang saya sampaikan, Pak, untuk Pelabuhan Kijing ini, ini Komisi V beberapa waktu yang akan datang sudah nyusun jadwal ya, Bu, sekretariat ya, kami akan meninjau Pelabuhan Kijing, karena peti kemas ini sudah banyak masuk ke sana, Pak, di Kijing, sehingga kelihatannya jalan tol ini menjadi yang *urgent*, Pak Menteri, dalam konteks pemanfaatan Pelabuhan Kijing yang begitu besar. Apalagi nanti kalau *smelter*-nya Antam yang dibangun di sini yang kita lihat kemarin sudah berfungsi Pak, tambah ruwet lalu lintas di sini kalau jalan tol ini tidak cepat kita tangani.

Jadi, saya berharap jalan tol ini bisa segera bisa kita kerjakan untuk Pontianak menuju ke Kijing. Ini bukan hanya bermanfaat untuk Pelabuhan Kijing dan Pontianak kota saja, Pak, tapi juga ini akan mempermudah kendaraan yang dari luar daerah, misalnya dari arah perhuluan, baik dari mulai dari Melawi sampai ke Landak, kemudian Sambas dan Bengkayang dan seterusnya, ini akan mempermudah keluar masuk barang masuk ke Pelabuhan Kijing.

Kemudian yang terakhir *nih*, Pak, soal Inpres, jembatan, jembatan ini juga kami berharap jembatan yang di Sintang, saya pernah sampaikan, Pak, sekarang sudah macet tiap hari dan ini jembatan rawan, Pak. Kalau terjadi sesuatu dan lain hal dengan jembatan ini berarti hubungan ke Sintang, separuh Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu hanya bisa diakses oleh satu jembatan ini, Pak. Kalau ada apa-apa sama jembatan, ini, ini jembatan juga sudah cukup tua, Pak, dibangun tahun 80-an ya, kalau misal terjadi sesuatu dan lain hal hanya kita bisa menggunakan Ferry, Pak, untuk bisa nyeberang, tidak ada jembatan lain yang bisa mengakses Sintang, separuh Kota Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu.

Jadi, mumpung masih belum terjadi sesuatu dan lain hal, kita, menurut saya perlu membangun jembatan Melawi lagi satu, Pak. Kemarin waktu kita ke Pontianak, Pak Menteri berbicara dengan kita semua ya, Pak Dirjen, bahwa Pak Menteri kurang setuju kalau duplikasi. Jadi untuk pembukaan wilayah, *ndak* apa-apa kita mungkin bangun agak ke ujung, sehingga kota itu berkembang. Silakan saja, Pak, solusi apa yang diambil, saya baik juga kalau jembatan Melawi ini kita dorong agak ke hulu sedikit, Pak, ya, sehingga orang yang dari Pontianak mau ke Kapuas Hulu tidak perlu melewati Kota Sintang. Demikian juga orang dari Kapuas Hulu mau ke Pontianak tidak perlu melewati Kota Sintang, Pak.

Jadi ini bisa mengurangi beban jembatan yang ada sekarang dan memperluas kawasan pemukiman Kota Sintang itu sendiri yang memang dalam desain republik ini, Pak, tadinya kabupaten, jadi Ibukota Provinsi Kapuas Raya, Pak, Sintang ini dan ke depan saya pikir manakala dipandang perlu,

kalau jumlah penduduk terus bertambah dan moratorium ini kita cabut, daerah ini dulu, Pak, waktu diusulkan menjadi provinsi baru boleh dicek Pak, hasil penilaian dari seluruh DOB yang diusulkan, ini daerah yang memenuhi nilai paling tinggi dari semua kriteria. Luas wilayah, jumlah penduduk, potensi ekonomi, tiga hal ini dia mempunyai nilai tertinggi semua, Pak. Hanya waktu itu tidak ada kesepakatan antara gubernur sana dengan pemerintah pusat, sehingga tidak jadi dimekarkan waktu itu. Jadi justru kalau ini nanti jadi ibukota provinsi jadi tambah ruwet kalau jembatan ini tidak cepat kita tangani.

Kemudian Cipta Karya, Pak.

Tadi saya juga sudah berdiskusi dengan kepala balai, sempat saya telepon, ada beberapa kecamatan, Pak, di sana masih belum ada air bersih Pak, belum ada, Pak. Ibukota kecamatan tidak ada air bersihnya, nanti saya juga lebih, daripada saya nyebutkan satu per satu, nanti saya bikin tertulis saja Bu Dirjen Cipta Karya ya, kecamatan, ibukota kecamatan ini, Bu, saya enggak ngomong desa ini. Kalau ngomong desa lebih ruwet lagi, Pak. Jadi saya ngomong kecamatan yang belum ada IKK-nya, Pak, jadi nanti akan saya. Ini sumbernya saya dapat dari kepala balai semua. Jadi saya usulkan mana-mana yang menurut kepala balai sudah siap desainnya, itu nanti saya bantu, Pak, untuk diusulkan kiranya bisa mendapat prioritas untuk bisa dibangun di tahun di APBN tahun 2025.

Soal 2024 serapan, tentu kita dukung sepenuhnya Pak Menteri ya, kita juga rapat sudah jarang-jarang Pak Menteri, memberi ruang kepada Pak Menteri untuk bisa bekerja secara maksimal, sehingga kalau Pak Menteri sering-sering dipanggil ke sini, serapannya nanti mandek, Pak, karena terlalu banyak rapat, *ndak* kerja-kerja nanti ya. Jadi kita kasih ruang seluas-luasnya kepada Pak Menteri, apalagi sekarang tambah tugas sebagai Plt. Kepala Otorita.

Jadi, kalau saya menanggapi positif, Pak. Ada banyak media menghubungi kita soal ini, Pak Menteri, kita tanggapannya positif menurut saya itu mempermudah, *toh* seluruh anggarannya juga di sini, saya bilang, semua anggaran infrastruktur IKN itu semua dibahas dan ditetapkan di Komisi V DPR RI dan Pak Menteri bisa mengeksekusi langsung, karena sebagai Plt. juga sebagai menteri yang membidangi itu. Jadi dari sisi manajemen kalau menurut saya ini adalah apa namanya, langkah positif pemerintah untuk mempercepat pembangunan IKN. Kita dukung sepenuhnya Pak Menteri terkait hal ini.

Saya rasa demikian barangkali Bapak-Ibu sekalian ya, dari saya, Pak Menteri, terkait dengan rapat kita hari ini. Bapak cukup menjawab singkat saja dan nanti dijawab secara tertulis, karena masih ada nanti rapat kita dengan para Eselon I.

Saya persilakan Pak Menteri.

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

Ibu-Bapak Anggota yang terhormat dan saya hormati,

Sesuai dengan arahan Bapak Pimpinan, saya akan menjawab beberapa poin, beberapa isu yang menjadi *concern* Ibu-Bapak secara umum.

Pertama tentang kenapa anggaran 2025 hanya 75.

Ibu-Bapak sekalian,

Informasi dari Bappenas bahwa, ini dikhususkan untuk “baru” ya, jadi kata ada kata baru untuk seperti yang diindikasikan oleh Pak Roberth Rouw, Pak Wakil Ketua tadi, sehingga memberikan *room* kepada pemerintah yang baru nanti. Kita lihat sejarah pada tahun 2013, 2014 anggaran PU itu sekitar 76, tapi begitu 2015 permintaan baru menjadi 120 triliun. Jadi saya kira mungkin pendekatan itu yang dipakai oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas dalam mendesain anggaran ini, tapi nanti kalau emang setelah Badan Anggaran dan apa nota keuangan ada seperti arahan Bapak-Bapak sekalian pasti akan kita prioritaskan yang menjadi aspirasi Bapak-Bapak. Itu yang pertama.

Yang kedua tentang padat karya. Tadi kami laporkan pada saat pertama pelaporan kami bahwa, juga tadi sudah sampaikan oleh Bapak Roberth yang rapat kerja pertama kami mendapatkan 400 miliar sisa lelang, karena ini menjadi kesepakatan kita atau janji saya bahwa, itu akan memakai sisa lelang semuanya. Yang rapat, *eh*, yang pertemuan kedua menjadi 700, rapat kerja ini tadi saya sampaikan kita punya sisa lelang 1 triliun oke, nanti pemanfaatannya mungkin dominan untuk BSPS, sedangkan untuk BSPS sendiri juga kita usulkan tambahan anggaran 1 triliun lagi, namun itu sebagai anggaran ABT-nya dari Kementerian Keuangan tapi itu masih dibahas di Kementerian Keuangan.

Kemudian itu sama dengan juga dengan IJD kenapa yang sekarang belum, belum berjalan? karena masih dibahas di Kementerian Keuangan untuk penyusunan DIPA-nya, nah belum keluar DIPA-nya. Sehubungan dengan itu, Bapak-Ibu sekalian, baik BSPS maupun IJD, itu kita punya aplikasi, itu hampir sama aplikasinya karena kami berkoordinasi dan disupervisi oleh KPK untuk bisa semuanya memakai sistem. Jadi kalau IJD dengan SiTIA, BSPS ada yang lain masuk PT, P3TGAI ini untuk mengamankan kita semua, jadi *nggak* ada, tapi kalau untuk relaksasi daerah-daerah khusus seperti yang diusulkan Pak Roberth, saya kira saya setuju.

Jadi kalau di dalam dari apa sistem ada dua usulan dari kepala desa maupun kabupaten, kalau di daerah-daerah khusus tapi tidak untuk semua, bukan *general*, sehingga kita juga harus berpikir tidak secara *general*. Indonesia inikan kalau digeneralisir jadi *enggak* benar. Jadi saya kira, saya untuk hal-hal yang khusus, saya setuju untuk direlaksasi. Saya kira ini untuk semua Dirjen bisa ini kesepakatan kita pada sore hari ini. Jadi tentang aplikasi kenapa *kok* dipersulit? tidak ada untuk tujuan dipersulit, tapi ini semua untuk mengamankan kita, karena kita dimonitor, *gitu*. Kalau semua akselerasi yang

lainnya kalau yang enggak punya Anggota DPR gimana, jadi pertanyaan-pertanyaan itu yang sehingga diperlu dipakai. Contoh BSPS dan JID kemudian P3TGAI semua pakai sistem.

Yang ketiga tentang IKN, izinkan saya melaporkan nanti ada. Jadi sejak tahun 2022 sampai dengan 2024, Ditjen SDA untuk IKN ini apa dialokasikan untuk menyelesaikan pekerjaan Bendungan Sepaku, kemudian juga untuk pengendalian banjir sebanyak 3 triliun. Ditjen Bina Marga untuk menyelesaikan jalan-jalan nasional yang ada sekitar situ, kemudian jalan tol dan jalan kawasan 32 triliun sampai dengan 2024, Ditjen Cipta Karya ya, 22 triliun untuk bangunan gedung, Ditjen Perumahan yaitu untuk HPK/Hunian Pekerja Konstruksi juga untuk me-47 tower hunian untuk ASN, Paspampres, polisi dan Hankam, BIN itu 12 triliun, totalnya sekitar 70 triliun sampai dengan 2024 ini. Progresnya seperti apa, coba saya lanjutkan.

Ini adalah, ini *batch* pertama, itu progresnya sampai sekarang, ini sekitar ini ada, Pak, satgasnya Pembangunan, Pak Danis tadi, itu progresnya sekitar 80%.

Lanjut foto-fotonya, fotonya, ini, ini Bendungan Sepaku Semoi yang kemarin baru diresmikan oleh Bapak Presiden. Bendungan Sepaku Semoi ini merupakan salah satu sumber air bersih untuk air minum IKN dan Balikpapan. Ini dua ini, kapasitasnya 16 juta meter kubik, 200 liter per detik akan menjadi air baku bagi IPA IKN, termasuk nanti yang *intake* Sepaku juga 300 liter per detik ini bisa menjadi suplai air minum sampai dengan tahun 2035 di IKN. Untuk *intake*, untuk *intake* 2.000 liter per detik. Bentar ulangi, ini di dari sini 500 liter per detik dibawa ke Balikpapan, karena memang Balikpapan juga butuh air minum. Ini semua sudah selesai baru diresmikan kemarin tanggal 4 Juni.

Lanjut, ini adalah apa, jembatan Pulau Balang Bentang Pendek, ini duplikasi karena yang jadi itu dulu dibangun oleh, mohon maaf oleh pemerintah daerah secara teknis tidak, tidak handal, sehingga kita, kami tidak yakin, tidak yakin untuk bisa di, difungsikan sebagai akses ke IKN, sehingga kita bikin duplikasinya yang sekarang progresnya 77,6%, mudah-mudahan bulan Juli nanti akan sudah, ini-ini potret yang sebelumnya ini saya kira.

Lanjut, ini adalah tol IKN seksi 5A, progresnya 83,5% ini semua sudah pada levelnya, sehingga tinggal apa tinggal *surfacing*-nya saja. Kita lihat Bapak-Ibu sekalian, yang hijau-hijau ini adalah net atau namanya, apa, apa, Pak? geomet ini, tapi di itu untuk menahan longsornya, kemudian kita tanamin, ditanamin tanaman dan yang sekarang ini, ini yang sudah lalu, ini yang sekarang sudah penuh semua menjadi hijau semua. Inilah makanya tujuan pembangunan kita adalah mutu, estetika, dan keberlanjutan lingkungan.

Ini yang ke arah Pulau Balang, jadi Balikpapan di kilometer 8 ke arah sampai dengan jembatan Pulau Balang tadi akan selesai bulan Juli ini, sehingga kalau dari Balikpapan ke, dari-dari Pulau Balang ke IKN sudah dengan jalan nasional, sudah lebar, sehingga mungkin sekitar 1 jam. Kalau nanti dari Pulau Balang sampai di IKN jalan tolnya jadi tinggal 40 menit.

Lanjut.

F-PDI PERJUANGAN (DRA. SRI RAHAYU):

Interupsi, Pimpinan.
Sedikit aja.

Pak?
Boleh Pimpinan?

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Singkat, Bu, ya.

F-PDI PERJUANGAN (DRA. SRI RAHAYU):

Enggak, saya hanya ingin melihat itu yang jalan tol tadi, kan hanya 5A, yang lainnya?

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):

Ya ini kan satu contoh, kalau mau semua nanti lama.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Baik, nanti dengan Dirjen, Pak Dirjen Bina Marga nanti Bapak siapkan ya kita.

Nah, nanti kita mau Kunker ke sana, saya. Ya, kita sudah punya jadwal Pak Menteri, kami Komisi V akan kunjungan kerja ke sana, harusnya sudah kemarin, tapi ya sampai ...

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):

3 Juli.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Ya, jadi tanggal 1 sampai tanggal 3 Juli, Pak, nanti kita ke sana ya biar kita langsung ke lokasi.

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):

Oke.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Baik, Pak Menteri, mungkin yang lain-lain saya rasa *enggak* perlu di dulu Pak Menteri ya, silakan.

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):

Yang di ujung sana itu adalah ista, kantor Presiden, kemudian istana, lapangan langsung ke, ini yang *deck* ini adalah sumbu kebangsaan. Yang pembangunan-bangunan kantor di kiri kanan adalah Kantor Kementerian Menko, Kantor Menko 1, 2, 3, 4, masing-masing Menko 4 tower, bisa untuk *men-sharing office* dengan kementerian yang dibawahinya.

Lanjut, progresnya sudah 100% nanti.

Ini yang istan... istana yang di bawah, yang, yang di atasnya adalah kantor Presiden. Oke di atasnya yang hijau ini rumput bukan karpet, tapi sudah rumput, ini yang untuk lapangan upacara nanti.

Lanjut, ini yang Kemenko tadi.

Lanjut, ya ini Kemenko 4, 3, ini nanti bulan akhir Juli sesuai jadwalnya Bu Dirjen ini *line up* nya, fasadnya sudah akan jadi semua.

Lanjut, ini *development* untuk sub wilayah pengembangan 1B. Jadi semua sudah kita bikinkan apa jalan-jalannya untuk bisa pembangunan di sekitar situ, kita lihat juga riparian kita jaga betul supaya air ini tetap berada di situ. Jadi kalau ada ini namanya riparian-riparian, dia tidak... kita tata betul, kita bikinkan embungnya dan sebagainya, sehingga ini menjadi estetika untuk satu kota.

Lanjut, ini, ini ada 34 rumah jabatan menteri, 36 yang... yang... yang sedang siap sekarang ini baru empat, tapi nanti akhir Juli, *Insyallah* sudah bisa beroperasi semua.

Lanjut, ini adalah hunian ASN, BIN, Paspampres, Polri, semua 47 tower, pada bulan Juli, akhir Juli sampai awal Agustus *Insyallah* 12 tower sudah bisa operasi *full furnished*. Ini adalah tipenya 98 meter persegi setiap hunian. Jadi ini *full furnished* pada akhir Juli atau awal Agustus, sehingga bisa dimanfaatkan.

Lanjut-lanjut, cukup? oke, demikian Bapak untuk yang IKN.

Kemudian yang juga ingin kami jawab adalah Tapera. Kami apa di-*temenin* oleh Bapak-Bapak dari BP Tapera, Badan Pelaksana Tapera, Pak Heru sebagai komisioner dan beberapa deputinya. Untuk itu nanti beliau akan jelaskan tentang Tapera, tapi apa yang disampaikan oleh Bu Iren tadi *backlog* kita untuk kepemilikan 9,9 Juta, *backlog* untuk rumah tidak layak huni 2,6 Juta, sedang pertumbuhan rumah tangga baru 800.000 per tahun, ini berdasarkan survei Sustenas kalau enggak keliru.

Jumlah ASN sendiri sekitar 4,4 juta orang, yang belum memiliki rumah 1,8 juta. Apa sekarang peran pemerintah selama ini? pemerintah melakukan pembiayaan bukan yang bukan dari APBN untuk yang Rusus dan sebagainya, tapi ada pembiayaan untuk kepemilikan rumah melalui Ibu-Bapak sekalian yang sudah setuju juga. Fasilitas, likuiditas pembiayaan perumahan dari 2010 sampai 2024, sampai dari 2010 sampai 2024 itu sudah lebih dari 105 triliun, itu pun bisa me...me, nanti beliau akan menjelaskan juga lebih detail, membawa apa kredit lebih dari 300 triliun dalam pembangunan perumahan itu.

Kemudian juga ada subsidi selisih bunga yang disebarkan melalui tahun 2015 sampai 2020 dan bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan itu PP2BT itu yang kecil dari 200.

F-PG (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI):

Ketua, barangkali begini Pak Ketua, Kalau boleh interupsi.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Silakan-silakan.

F-PG (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI):

Kalau boleh Pak Menteri, *ndak* usah nanti kita rapat khusus saja, kita bahas soal ini, nanti penjelasannya kita rapat kan agak panjang persoalannya ini karena banyak masalah yang kita harus hadapi tentang ini, Pak.

Terima kasih, Pak Ketua.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Baik, saya setuju, Pak.

Untuk terkait Tapera Pak Menteri, kami akan agendakan khusus.

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):

Mungkin *anu* Pak Ketua, tidak detail, tapi secara umum, sehingga bisa diketahui *opo* itu Tapera, mungkin, sebentar. Itu saya kira kalau dari kami itu, untuk yang peran pemerintah dalam pembiayaan.

Jadi, Tapera ini sebennya salah satu bidang inovasi pembiayaan Tapera ya kan, kalau itu untuk itu, Pak Heru, silakan sebentar, Pak Heru.

Mohon izin Bapak, mohon izin supaya jelas, dimengerti nanti di luar juga.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Jadi begini, Pak, saya *nuhun sewu* Pak Menteri ya.

Saya rasa soal Tapera ini sudah menjadi ramai, penjelasan Bapak pun tidak menyelesaikan persoalan sekarang. Kami akan agendakan khusus, Pak, untuk Tapera ini, kita rapat khusus terkait Tapera, supaya nanti tuntas, Pak, karena memang kami banyak sekali mendapat pertanyaan dan seterusnya, maka bahasa saya di media, saya bilang saya minta kalau bisa pemerintah tunda dulu, karena ada keberatan dari karyawan dan keberatan dari pengusaha. Titik ini yang paling rumit, Pak, kami jawab di sini, yang mau dipotong keberatan, yang dibebani pemotong pun keberatan. Titik temu ini menurut saya yang harus dicarikan jalan keluarnya dulu.

Oleh karenanya, kami nanti akan mengundang dulu semua pihak, Pak, ya. Kami rapat dulu nanti kita undang dunia usaha, kita undang mungkin perwakilan para buruh, baru nanti kita undang teman-teman dari Tapera, saya rasa itu barangkali jalan keluarnya, Pak Menteri. *Nuhun sewu*, Pak Menteri

mohon izin ya, jadi saya sepakat dengan ini nanti saja kita dengarkan penjelasan soal Tapera ini setelah beberapa tahapan nanti kami lakukan.

Silakan Pak Menteri dilanjut.

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):

Oke, terima kasih.

Bapak Pimpinan dan Ibu-Bapak Anggota yang terhormat,

Kemudian yang lain-lain saya kira tentang yang banyak tadi kan IKN, kemudian untuk penyediaan air bersih dari Bu Iren. Terima kasih, Bu, mengangkat isu ini dari *World Water Forum*. Memang kami kemarin mengundang seluruh PDAM, seluruh juga ratusan kepala daerah, kabupaten/kota, kemudian PDAM dan kami belajar dari *Agua de Portugal* itu juga BUMN-nya Portugal, untuk apa namanya, istilahnya mereka itu *institutional reform*. Mereka, *eh*, kondisi kita sekarang ini sama dengan kondisi Portugal 30 tahun yang lalu tentang servis dari air minum, mereka 15 kurang dari 50% servis air minum di Portugal, pada 30 tahun yang lalu dan 15% sanitasi, tapi dengan *reform-nya institusional*, tapi bukan mempravitisasi, tidak mempravitisasi, makanya cocok dengan, menurut saya cocok dengan Indonesia, sehingga itu semua *voluntary* dilakukan oleh PDAM dengan satu institusi nasional untuk melakukan peningkatan servis terhadap air minum.

Kemudian mereka ternyata disepakati untuk membuat pilot programnya di Bali. Jadi nanti kita lihat hasilnya di Bali kalau itu bagus nanti pasti akan kita pakai di Indonesia.

Yang lain-lainnya saya kira apa Bu, Pak, Ibu-Bapak sekalian, itu Dapil semua saya kemungkinan kalau, Pak, yang masih ada di sini Pak Eddy Santana, jadi kalau Kapal Betung–Kayu Agung–Palembang masih sudah. Ini Kapal Betung–Jambi itu *managerial*, bukan *technical*, saya sudah ke sana kemarin waktu jadi saksi Gubernur Jambi mantu, saya lihat dari kap, Kayu Agung–Palembang tetap akan dilakukan oleh Waskita dengan anggarannya Waskita, Waskita ya, kemudian dari jembatan itu sudah ditangani oleh HK, tapi dilaksanakan oleh Waskita, anggarannya dari HK.

Kemudian dari Palembang ke Betung kita punya Dukon di Betung Bayu Lincir, *eh* Tempino, itu Dukon sekarang sudah progres bagus, kemudian yang sampai Betung berarti penganggarannya sudah *clear* semua sudah manajerialnya sudah selesai. Jadi semua dari Palembang–Betung akan selesai pada tahun 2025 ini.

Kemudian dari Jambi ke Rengat, kita sedang alokasi apa usulkan di proses *loan* dengan *Islamic Development Bank*, AIIB, bersama dengan AIIB. Jadi kita *Insyah Allah* sampai rengat sudah ada programnya, Pak, tapi itu *alhamdulillah* saya bisa sempat nengok ke sana sehingga *purely manager, managerial*.

Saya kira itu apa yang kami bisa laporkan.
Mudah-mudahan bisa menjawab apa yang sudah yang menjadi *concern* Bapak-Ibu sekalian.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Baik, Baik, terima kasih Pak Menteri atas penjelasannya.

Nanti para Dirjen, mohon izin ya, tolong apa yang disampaikan oleh teman-teman semua akan kita dalam lebih lanjut, nanti di rapat dengan Direktorat Jenderal ya. sama yang terakhir *nuhun sewu*, Pak Menteri, terkait dengan padat karya, kita berharap kesimpulan rapat di waktu yang lalu yang bahwa kita akan sama minimal dengan tahun sebelumnya ini saya sebagai Ketua ini selalu di kejar oleh teman-teman Pak Menteri, ini mudah-mudahan ini nanti bisa kita selesaikan sebagaimana apa yang sudah kita sepakati.

Baik, kita langsung saja ke kesimpulan rapat, saya tidak mau mengulas lebih Panjang, silakan ditampilkan kesimpulan rapat kita pada hari ini.

Draf Kesimpulan Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kamis, 6 Juni 2024.

1. Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR untuk meningkatkan capaian serapan APBN tahun 2024 sesuai saran dan masukan Komisi V DPR RI di mana capaian per 31 Mei 2024, sebagai berikut:

- realisasi keuangan 22,07%; dan
- realisasi fisik 28,22%.

2. Terhadap anggaran Kementerian PUPR yang mengalami penambahan sebesar 10,36 triliun menjadi totalnya menjadi 157,73 triliun dari pagu anggaran tahun, pagu anggaran APBN tahun 2024 sebesar 147,37 triliun yang ditetapkan dalam Raker, RDP pada tanggal 12 September 2023, Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR untuk mengoptimalkan pemanfaatan tambahan anggaran tersebut.

3. Komisi V DPR RI memahami paparan tentang pagu indikatif tahun anggaran 2025 Kementerian PUPR sesuai surat bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan RI Nomor: S-346/MK.02/2024 dan b. surat B-2021/D.8/PP.04/04/2024, hal: Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga dan DAK Tahun 2025, tanggal 5 April 2024 sebagai berikut:

- a. Pagu kebutuhan tahun 2025 sebesar Rp212.577.234.392.000,00;
- b. Pagu indikatifnya Rp75.632.263.316.000,00;
- c. Selisih/*backlog* Rp136.944.971.076.000,00.

Selanjutnya Komisi V DPR RI bersama dengan Kementerian PUPR akan memperjuangkan peningkatan anggaran untuk membiayai program-program prioritas nasional dan program berbasis masyarakat sesuai mekanisme pembahasan RUU tentang APBN Tahun 2025 di DPR RI.

4. Komisi V DPR RI ini sepakat dengan Kementerian PUPR untuk menyesuaikan program atau kegiatan berskala nasional termasuk program berbasis masyarakat dalam RAPBN tahun 2025 sesuai saran dan masukan Komisi V DPR RI sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Teman-teman Komisi V, setuju?

ANGGOTA KOMISI V DPR RI:

Setuju.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Baik.

Pak Menteri?

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):

Setuju.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Baik.

Saya ketok.

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Kesepakatan kita capai, maka dengan demikian selesailah rapat kita pada siang hari ini dan sebelum saya tutup saya persilakan Pak Menteri menyampaikan kata-kata penutup.

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):

Terima kasih.

Bapak Pimpinan, dan
Ibu-Bapak Anggota DPR Komisi V yang terhormat dan saya hormati,

Terima kasih atas segala masukan dan kritikan yang diberikan pada kami dan kalau tadi, Pak, siapa Pak Syarief menyampaikan ini mungkin rapat terakhir kita membahas 2002 belum ya Pak, oke, tadi beliau ngomong, *gitu*.

Untuk itu, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih dan kami masih terus ya mohon terus dukungan Ibu-Bapak sekalian dan semoga kerjasama kita yang sudah kita bina selama ini akan terus berjalan dengan baik.

Pada rekan-rekan sekalian dari Anggota DPR khususnya Pak Syarief yang akan naik haji, mudah-mudahan dilancarkan ibadahnya, diberi kesehatan, dan mabrur ibadahnya.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Walaikumsalam,

Baik.

Terima kasih Pak Menteri.

Saya atas nama Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi V mengucapkan terima kasih atas rangkaian rapat kita pada hari ini dan mohon maaf manakala dalam rapat ini terjadi hal-hal yang kurang berkenan, maka dengan demikian dengan mengucap syukur, ucap syukur *alhamdulillah* rapat hari ini saya nyatakan selesai dan ditutup.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Selamat siang, dan

Salam sejahtera bagi kita semua.

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 14.23 WIB)
(KETOK PALU 3 KALI)**

Jakarta, 6 Juni 2024
a.n. **KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,**

TTD.

NUNIK PRIHATIN BUDIASTUTI, S.H.
NIP. 196912021998032002